PERKEMBANGAN TRIWULAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Kesinambungan di tengah Guncangan

Juni 2010

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Kesinambungan di Tengah Guncangan

Juni 2010

THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Investing in Indonesia's Institutions

for Inclusive and Sustainable Development

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan dalam konteks jangka panjang dan global, serta menilai terhadap prospek ekonomi dan kesejahteraan social Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan professional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia.

Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini disusun dan dihimpun oleh tim analisa makroekonomi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta dipandu oleh Shubham Chaudhuri (Lead Economist) dan Enrique Blanco Armas (Senior Economist): Andrew Blackman (rrus perdagangan, neraca pembayaran), Andrew Carter (penerimaan pemerintah dan deflator PDB), Andrew Ceber (Neraca nasional and Permintaan domestik), Fitria Fitrani (arus perdagangan), Faya Hayati (harga, harga komoditas, dan deflator PDB), Ahya Ihsan (pengeluaran pemerintah), Telisa Falianty (kondisi moneter), Neni Lestari (dektor perbankan), Diva Singh (pasar finansial, kondisi moneter, sektor perbankan), Djauhari Sitorus (sektor perbankan). Tim Bulman (ringkasan eksekutif, tenaga kerja, pendanaan pemerintah, dan deflator PDB) dan Andrew Ceber berbagi tugas penyuntingan dan produksi. Enrique Blanco Armas, Ashley Taylor, Nathan Dal Bon and Peter Milne, memberikan komentar-komentar rinci pada draft-draft awal.

Dokumen ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Fitria Fitrani, Telisa Falianty dan Ahya Ihsan.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia atas ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai *the World Bank* serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi tbulman@worldbank.org.

Daftar isi

Kata Pengantar iii

Ringkasan Eksekutif: Kesinambungan di tengah guncangan viii

A. PERKEMBANGAN TERBARU FISKAL DAN EKONOMI 1

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid terus berlanjut 1
   a. Permintaan swasta meningkat pada paruh pertama tahun 2010, mengimbangi perlambatan dalam belanja negara 1
   b. Sekarang impor meningkat lebih cepat dari ekspor, memperkecil surplus neraca perdagangan dan neraca berjalan 3
   c. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya akan terus mengalami percepatan, dan proyeksi untuk tahun 2010 telah ditingkatkan 4
2. Pasar keuangan Indonesia turun di bulan Mei karena krisis hutang Eropa 7
   a. Saham dan obligasi Indonesia melemah di bulan Mei karena arus keluar modal berukuran besar yang juga memberi tekanan kepada rupiah 7
   b. Pertumbuhan pasokan uang yang lesu dan terkedalinya inflasi membuat BI mempertahankan suku bunga rujukan tetap pada 6,5 persen 11
   c. Pertumbuhan kredit berlanjut naik, didorong oleh kredit konsumen, tetapi suku bunga kredit dan marjin bunga bersih masih tetap tinggi 12
3. Surplus neraca pembayaran meningkat pada triwulan 1, tetapi diperkirakan akan menyempit pada dua tahun berikut 13
4. Pelemahan Inflasi berlanjut tapi peningkatan sudah tampak di depan mata 14
   a. Inflasi inti bergerak tipis, sementara harga bahan pangan lebih begejolak dari biasanya 14
   b. Lemahnya inflasi inti menunjukkan bahwa tahun 2010 akan lebih lesu dibanding ramalan yang lalu, sementara kuatnya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas diperkirakan akan mendorong lebih tingginya inflasi di tahun 2011 17
5. Pertumbuhan pekerjaan menyamai laju angkatan kerja pada semester pertama tahun 2009, tetapi semua pekerjaan baru bersifat tidak resmi/informal 18
6. Penerimaan yang lebih tinggi dan belanja yang lebih rendah diperkirakan akan memperkecil defisit anggaran 18
   a. Defisit anggaran untuk tahun 2010 diperkirakan akan lebih rendah dari yang diantisipasi sebelumnya, dan defisit di tahun 2011 diperkirakan akan cukup rendah sebesar 0,4 persen dari PDB 18
   b. Penerimaan pemerintah diperkirakan akan sedikit lebih kuat dari yang diproyeksikan sebelumnya 19
   c. Realisasi belanja modal, subsidi dan belanja 'lain-lain' rendah pada awal tahun 2010, dan tampaknya akan membuat belanja setahun penuh di bawah sasaran 20
7. Keseluruhan risiko terhadap perkiraan ekonomi Indonesia telah meningkat dengan meningkatnya ketidakstabilan dalam pasar keuangan dunia 23

B. PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN INDONESIA 26

1. Tingginya Suku Bunga Kredit dan NIM di Indonesia: Apakah Langit Menjadi Batasnya? 26
   a. Indonesia memiliki NIM tertinggi di kawasannya, didorong oleh tingginya suku bunga kredit 26
   b. Struktur Pasar: Bank-bank bersifat oligopoli dan mendominasi sektor keuangan 27
   c. Premi Risiko: Catatan inflasi dan yield obligasi yang tinggi dan cepat berubah meningkatkan risiko 29
   d. Efisiensi: Kompetensi perbankan mungkin bukanlah yang mendorong tingginya NIM 31
   e. Temuan Utama dan Jalan di Depan 31
2. Bagaimana Deflator PDB menyimpang dari IHK pada akhir tahun 2000an, dan apa artinya terhadap proyeksi penerimaan pemerintah 34
   a. Harga investasi yang lebih tinggi telah membuka dua pengukur harga utama di Indonesia . 34
   b. Deflator PDB adalah pengukur yang lebih lengkap bagi harga-harga yang relevan untuk peramalan penerimaan pemerintah, dan dengan percepatannya pada setengah dekade yang lalu, dapat memberikan Grafikan yang lebih akurat untuk keseimbangan anggaran 36

3. Pergerakan harga komoditas yang besar dan sulit diramalkan… ternyata mempunyai peran terhadap pertumbuhan, inflasi dan pendanaan masyarakat di Indonesia 39
a. Harga-harga komoditas selalu berubah dan sulit diramal 39
b. Fluktuasi harga-harga komoditas ternyata tidak hanya mempengaruhi harga-harga dan ekonomi nominal dalam jangka pendek tapi juga mendapat respon dari beberapa kegiatan di sektor riil 41
c. Harga komoditas yang selalu berubah mempunyai dampak yang cukup besar pada penerimaan pemerintah; pada neraca, harga yang lebih tinggi menurunkan defisit anggaran 43
d. Kebijakan pemerintah dapat meringankan dampak perubahan harga komoditas 45

C. INDONESIA 2014 DAN SELANJUTNYA: SEBUAH PENGAMATAN SELEKTIF 47

1. Tantangan perubahan iklim Indonesia 47
2. Meningkatkan kesehatan kelahiran anak di Indonesia melalui sistem kesehatan yang lebih kuat 51
3. Memperkuat tanggung jawab dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 56

LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Pertumbuhan PDB triwulanan tetap berada pada atau di atas tingkat rata-rata 1
Grafik 2: Pertumbuhan mitra dagang utama terus pulih pada triwulan 1 1
Grafik 3: Belanja pemerintah mencatat penurunan terbesarnya dari yang pernah tercatat di triwulan 1 2
Grafik 4: Pulihnya investasi membawa bagian mereka dalam keseluruhan belanja pada ekonomi ke tingkat yang mendekati nilai tertinggi yang pernah tercatat 2
Grafik 5: Keluaran yang tidak diperdagangkan terus meningkat di atas sektor yang diperdagangkan 3
Grafik 6: Keluaran manufaktur Indonesia bergerak ke samping, berbeda dengan negara-negara tetangganya 3
Grafik 7: Pemulihan nilai impor berlanjut… 4
Grafik 8: … sementara nilai ekspor telah mandek 4
Grafik 9: RMB meningkat sekitar 20 persen terhadap dolar Amerika 6
Grafik 10: … dan juga telah terapresiasi relatif terhadap rupiah 6
Grafik 11: Mekanisme transmisi apresiasi Rupiah 7
Grafik 12: IDX dan indeks saham lainnya jatuh di bulan Mei karena investor yang gelisah beralih ke uang tunai dolar Amerika 8
Grafik 13:… dan yield obligasi pemerintah dalam rupiah meningkat tipis sementara milik negara tetangga tidak, menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap kejutan permintaan eksternal 8
Grafik 14: Rupiah melemah tipis di bulan Mei setelah aliran modal keluar berukuran besar memangkas lebih dari 60 persen aliran modal masuk bersih tahun berjalan… 9
Grafik 15: …dengan penjualan SBI yang dimiliki asing merupakan 90 persen dari aliran keluar tersebut 9
Grafik 16: Dibandingkan dengan akhir tahun 2008, sektor keuangan Indonesia lebih tak terlindung terhadap perubahan arah yang dapat timbul dari krisis utang Eropa … 10
Grafik 17: …tetapi investasi asing dalam SUN bertahan cukup baik tahun ini, jadi tampaknya tidak semua arus masuk merupakan “uang panas” 10
Grafik 18: Pemerintah telah mengisi lebih dari setengah target penerbitan obligasi tahun 2010-nya, umumnya dari obligasi umum dalam mata uang rupiah 11
Grafik 19: BI telah meredam dampak fluktuasi cadangan terhadap uang primer melalui operasi pasar terbuka dengan menggunakan SBI 12
Grafik 20: Laju pertumbuhan M1 dan M2 tetaplah lemah dibanding tingkat catatan historis 12
Grafik 21: Pertumbuhan kredit Tr-k-Tr masih positif di triwulan 1, dengan persetujuan kredit baru meningkat lebih dari 100 persen sejak bulan Desember… 13
Grafik 22: …dan kredit konsumen memimpin, walaupun suku bunga kredit tetap tinggi 13
Grafik 23: Harga-harga berbalik arah tetapi tetap berada di bawah rata-rata 15
Grafik 24: Sejak jatuh pada pertengahan 2009, harga konsumen Indonesia telah bertumbuh di bawah sebagian besar mitra dagangnya, hanya sebagian yang disebabkan oleh pengaturan harga energi 15

Grafik 25: Celah antara biaya ekonomis bahan bakar di Indonesia dan harga yang diatur telah stabil 16
Grafik 26: Jika harga bahan bakar telah mengalami deregulasi, dampak terhadap inflasi akan berangsur-angsur hilang dalam jangka pendek dan akan terdapat penghematan anggaran yang permanen 16
Grafik 27: Harga bahan pangan dunia menunjukkan harga bahan pangan Indonesia akan melambat pada lima bulan ke depan 17
Grafik 28: Menggunakan deflator PDB sebagai dasar proyeksi pertumbuhan PDB nominal dan bukan menggunakan CPI yang tumbuh lebih lambat, menunjukkan penerimaan dapat lebih kuat secara berarti, dan defisit anggaran lebih kecil, di tahun 2010 dan 2011 19
Grafik 29: Tarif bea ekspor kakao berdasarkan perkembangan dalam harga kakao internasional 21
Grafik 30: Tarif ekspor kakao baru … 22
Grafik 31: … menyebabkan peningkatan kecil dalam potensi penerimaan bea ekspor 22
Grafik 32: Belanja subsidi yang lebih tinggi merupakan penyumbang utama lebih tingginya defisit dalam anggaran 2010 yang telah direvisi 22
Grafik 33: Hasil anggaran triwulan sedikit di bawah tingkat tahun 2009 22
Grafik 34: Hipothesis penurunan hipotetis ekonomi yang berpusat di Eropa tidak memiliki dampak yang berarti terhadap ramalan Indonesia tahun 2010 23
Grafik 35: Dampak kejutan harga komoditas terhadap ekonomi nominal dan defisit anggaran . 25
Grafik 36: Suku bunga kredit telah turun kurang dari suku bunga tabungan setelah pemotongan suku bunga referensi BI pada tahun 2008-2009… 26
Grafik 37: …mempertahankan NIM Indonesia menjadi yang terlebar di wilayah dengan selisih yang besar 26
Grafik 38: Tabungan telah turun terhadap PDB pada dekade yang lalu sementara kredit telah meningkat … 28
Grafik 39: …berkat pertumbuhan kredit yang tinggi pada tahun-tahun sebelum 2009, tetapi tabungan bertumbuh lambat 28
Grafik 40: Bank pada umumnya merupakan sumber dana tunggal di sektor keuangan Indonesia yang baru tumbuh…. 29
Grafik 41: …dengan obligasi korporat, penawaran saham perdana dan penerbitan obligasi selama ini hanya memainkan peran kecil dalam pengumpulan modal 29
Grafik 42: Suku bunga kredit swasta di Indonesia menyertakan premi karena catatan inflasi dan yield yang tinggi dan cepat berubah 30
Grafik 43: Rata-rata suku bunga, inflasi dan yield obligasi negara di Indonesia lebih tinggi secara berarti dibanding negara-negara lain … 30
Grafik 44: …seperti juga spread antara suku bunga kredit dan tabungan Indonesia, dan yield 5 tahunan dan inflasi 30
Grafik 45: Catatan inflasi di Indonesia lebih tinggi dan cepat berubah dibanding negara-negara lainnya … 33
Grafik 46: …seperti juga dialami oleh yield obligasi pemerintah Indonesia 33
Grafik 47: Harga-harga keseluruhan ekonomi telah melewati indeks harga konsumen sejak pertengahan tahun 2000an… 35
Grafik 48: …umumnya karena percepatan dalam harga-harga investasi 35
Grafik 49: Celah antara Deflator PDB dan IHK didorong oleh harga investasi yang lebih tinggi dengan biaya konstruksi yang lebih tinggi … 36
Grafik 50: …yang meningkat kecepatannya karena peningkatan biaya masukkan yang merata selama ledakan harga komoditas dunia 36
Grafik 51: Penggunaan Deflator PDB meningkatkan peramalan seluruh penerimaan pajak sebesar, secara rata-rata, hampir 2 persentase poin secara keseluruhan, terutama ketika pertumbuhan dalam Deflator PDB meningkat di depan inflasi IHK 38
Grafik 52: Pemilihan pengukur harga untuk pertumbuhan nominal memberi dampak yang cukup berarti terhadap proyeksi penerimaan 38
Grafik 53: …dibanding pengaruh komoditas terhadap negara-negara tetangganya 39
Grafik 54: Revisi ramalan Bank Dunia tahun 2010 dan 2011 untuk Indeks Harga Energi 40
Grafik 55: Revisi ramalan Bank Dunia tahun 2010 dan 2011 untuk Indeks Harga Non-Energi 40
Grafik 56: Skenario-skenario ramalan harga energi 41
Grafik 57: Skenario-skenario ramalan harga non-energi 41
Grafik 58: Perkiraan dampak kejutan komoditas terhadap perkiraan pemerintah tahun 2010 44
Grafik 59: Perkiraan dampak kejutan komoditas terhadap perkiraan pemerintah tahun 2011 44
Grafik 60: Kendati peningkatan berarti, tingkat MMR Indonesia tetaplah tinggi dan laju peningkatan harus makin dipercepat untuk memenuhi sasaran MDG kelima 52

Grafik 61: Penggunaan layanan rawat jalan oleh perempuan melonjak setelah peluncuran ASKESKIN 53
Grafik 62: Penggunaan layanan rawat inap oleh perempuan melonjak setelah peluncuran ASKESKIN 53
Grafik 63: Indonesia mengalami kelangkaan dan ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis kehamilan 54
Grafik 64: Cakupan jumlah bidan di Indonesia sangatlah bervariasi 55
Grafik 65: Mekanisme alokasi DAK daerah 58
Grafik 66: Mekanisme pelaporan DAK 59

DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Gambar 1:Pertumbuhan PDB 60
Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (Pengeluaran) 60
Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (Produksi) 60
Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor 60
Gambar 5: Indikator konsumen 60
Gambar 6: Indikator kegiatan industri 60
Gambar 7: Aliran perdagangan riil 61
Gambar 8: Neraca Pembayaran 61
Gambar 9: Neraca pedagangan 61
Gambar 10: Cadangan internasional 61
Gambar 11: Syarat perdagangan dan harga implisit ekspor dan impor, triwulanan 61
Gambar 12: Inflasi 61
Gambar 13: Inflasi, harga bahan pangan dan inflasi keranjang kemiskinan 62
Gambar 14: Rincian tingkat inflasi CPI bulanan 62
Gambar 15: Inflasi di ekonomi negara tetangga 62
Gambar 16: Kemiskinan, pekerjaan sektor formal dan tingkat pengangguran 62
Gambar 17: Indeks saham regional 62
Gambar 18: Indeks luas dolar dan spot rupiah 62
Gambar 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal 63
Gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dolar Amerika 63
Gambar 21: Kredit internasional bank umum 63
Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ramalan menyatakan pemulihan pertumbuhan secara bertahap ix
Table 2: Permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus menjadi mendorong percepatan bertahap perekonomi Indonesia 5
Table 3: Faktor-Faktor yang mempengaruhi Marjin Bunga Netto (NIM) 32
Tabel 4: Pertumbuhan dalam PDB riil yang digembungkan oleh Deflator PDB lebih menyamai pertumbuhan dalam penerimaan pemerintah, terutama penerimaan pajak, dibanding ketika digembungkan dengan IHK 37
Tabel 5: Lintas item-item penerimaan pajak, penggunaan Deflator PDB memberi peningkatan terbesar dalam peramalan penerimaan yang paling berhubungan erat dengan harga-harga komoditas 38
Tabel 6: Produksi, penjualan dan konsumsi komoditas penting bagi ekonomi Indonesia 39
Tabel 7: Dampak kejutan harga komoditas pada indikator kemiskinan dan ekonomi utama 41
Tabel 8: Perubahan terhadap perkiraan anggaran 45
Tabel 9: Dampak kejutan harga komoditas pada indikator ekonomi utama, kemiskinan dan penerimaan dan belanja Pemerintah 46
Table 10: Alokasi DAK telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam 6 tahun terakhir 57
Tabel 11: Neraca Pembayaran 63
Table 12: Di tahun 2010 defisit diproyeksikan turun menjadi 1,0 persen PDB, dibandingkan dengan proyeksi pemerintah sebesar 2,1 persen PDB, sementara di tahun 2011 defisit dapat turun hingga 0,4 persentase poin dari PDB 64

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Bagaimana penguatan Renminbi China berdampak pada perekonomian Indonesia 6
Kotak 2: Pajak baru atas ekspor kakao 21
Kotak 3: Masalah Perubahan Iklim: Perubahan Penggunaan Hutan 48

Ringkasan Eksekutif: Kesinambungan di tengah guncangan

Indonesia terus memantapkan kinerja ekonominya yang kuat, tetapi risiko tetap besar dan cenderung kearah bawah.

Melalui lingkungan yang tidak pasti, ekonomi Indonesia terus memantapkan pemulihannya dari krisis ekonomi dan keuangan dunia. Seperti diperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat pada triwulan pertama tahun 2010, tetapi tetap berada di atas rata-rata pra-krisis, dan tampaknya telah meningkat pada triwulan kedua. Pertumbuhan harga bertahan relatif sedang secara umum, mendukung daya belanja konsumen. Aliran keuangan internasional tetaplah besar tapi juga cepat berubah, memberi tantangan bagi pembuat kebijakan. Aliran besar lanjutan di bulan Maret dan April menjadi aktiva keuangan Indonesia yang likuid berbalik arah pada saat gejolak pasar keuangan global di bulan Mei. Tetapi pihak yang berwenang tampaknya telah mengelolanya dengan baik dan dampaknya terhadap pasar keuangan dalam negeri relative kecil. Ekonomi diperkirakan akan mengalami percepatan pertumbuhan secara bertahap hingga tahun 2011, sebagian besar karena permintaan dalam negeri. Gejolak yang baru terjadi dalam kondisi keuangan dunia dan ramalan ekonomi maju yang tidak pasti telah meningkatkan risiko turun jangka pendek terhadap perkiraan, sementara perkembangan politik dalam negeri tampaknya meningkatkan risiko jangka panjang bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan agenda reformasinya yang ambisius yang diperlukan untuk meningkat di atas 7 persen pada pertengahan dekade.

Arus modal dan pasar keuangan sangatlah cepat berubah di bulan Mei, dan penyusun kebijakan telah mengelolanya dengan baik.

Perkembangan di bulan Mei menegaskan bagaimana kerapuhan lingkungan global melahirkan risiko-risiko bagi ramalan ekonomi Indonesia. Setelah aliran masuk modal berjumlah besar selama berbulan-bulan, peningkatan gejolak pasar keuangan global pada minggu-minggu pertama bulan Mei memaksa investor asing untuk menarik 5,1 miliar dolar Amerika dari simpanan SBI (sertifikat Bank Indonesia jangka pendek) mereka. Aliran keluar menyebabkan sebagian besar peningkatan cadangan devisa di bulan April kembali mengalir keluar, dan kurs tukar valuta melemah dari 9.000 rupiah menjadi 9.375 rupiah per dolar Amerika. Investasi dalam aktiva pasar keuangan (saham dan obligasi pemerintah) tampaknya lebih ketat, setidaknya melalui masa pengetatan toleransi risiko di bulan Mei. Berbeda dengan ekonomi Negara-negara *emerging* lainnya, kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia bukan dari pengendalian modal (*capital control*), melainkan mengubah kebijakan dalam hal ini tidak secara langsung membedakan pihak asing, sebagai contoh untuk membuat investasi pada instrumen jangka pendek bank sentral menjadi tidak menarik dan mendorong bank-bank untuk menggunakan pasar antar bank dan bukan BI untuk intermediasi.

Pertumbuhan, walaupun lebih lunak dari akhir tahun 2009, tetaplah kuat

Pertumbuhan triwulanan di triwulan 1 yang moderat dibandingkan dengan kuatnya pertumbuhan di akhir tahun 2009, sedikit di atas perkiraan, menjadi 1,3 persen. Angka itu masih lebih kuat dari triwulan 1/2009, mengangkat tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun menjadi 5,7 persen. Mitra-mitra perdagangan Indonesia pada umumnya menunjukkan pertumbuhan yang moderat setelah mengalami goncangan lebih besar pada pertengahan dan akhir tahun 2009 – tetapi keseluruhan pertumbuhan pada umumnya lebih kuat dari perkiraan. Lemahnya kinerja pemerintah dalam pencairan anggaran belanja di triwulan 1 membantu menjelaskan terjadinya perlambatan Indonesia – ekonomi akan bertumbuh sekitar ½ poin persentase lebih cepat pada triwulan tersebut jika pemerintah membelanjakan anggaran modalnya pada laju yang sama dengan tahun 2009. Investasi dalam peralatan & permesinan mengimbangi sebagian perlambatan ini. Dan jeda pada pertumbuhan konsumsi swasta tampaknya hanya bersifat sementara dengan adanya percepatan ulang menuju pertengahan tahun 2010. Impor (terutama minyak refinary) juga lebih cepat dibanding ekspornya, mengecilkan surplus perdagangan, seperti telah diperkirakan sebelumnya.

…dan inflasi yang moderat

Secara keseluruhan, inflasi tetaplah moderat relatif dibandingkan dengan sejarah tingkat inflasi yang ada. Inflasi inti mencapai nilai terendah pada bulan Maret dan hanya diangkat oleh tingginya harga emas dunia pada bulan Mei, menjadi 3,8 persen. Harga bahan pangan, bergejolak dan menunjukkan pertumbuhan kuat yang tidak diperkirakan sebelumnya, berlawanan dengan semester kedua tahun 2009, meningkatkan *headline* inflasi menjadi 4,3 persen di bulan Mei. Seperti biasa, peningkatan tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap biaya hidup keluarga miskin, meningkatkan tingkat inflasi mereka menjadi 5,9 persen. Inflasi Indonesia meningkat lebih sedikit dibandingkan dengan inflasi negara-negara tetangga sejak pertengahan tahun 2009. Sebagian disebabkan oleh pengaturan harga energi Indonesia, yang membuat harga konsumen

Indonesia tidak terpengaruhi oleh pemulihan harga energi dunia pada awal tahun 2009; dan sebagian lagi disebabkan karena pemulihan nilai tukar, dan dalam keseimbangan, kondisi pasokan dalam negeri yang menguntungkan dan melemahnya pertumbuhan moneter.

Harga-harga konsumen terus tumbuh kurang cepat dibanding harga keseluruhan ekonomi, dapat membiaskan proyeksi penerimaan pemerintah ke arah bawah

Harga-harga pada bagian ekonomi lainnya juga lebih lemah dari beberapa tahun belakangan, tapi menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari CPI (Indeks Harga Konsumen, IHK). Keduanya telah berbeda sejak tahun 2004, sebagian besar karena percepatan biaya konstruksi dengan meningkatnya harga komoditas dan barang-barang input lainnya. Pembedaan ini penting untuk meproyeksikan total kegiatan nominal – proyeksi menggunakan CPI beresiko menurunkan nilai nominal ekonomi. Karena penerimaan pajak non migas pemerintah bergerak lebih dekat dengan harga-harga keseluruhan ekonomi dibanding harga konsumen, akibatnya penerimaan pemerintah akan berada di bawah ramalan jika mereka didasarkan pada inflasi CPI. Pada gilirannya, artinya defisit anggaran akan diproyeksikan terlalu tinggi dan potensi ruang fiskal tidak dimanfaatkan.

…menunjukkan, buruknya pencairan anggaran pada awal tahun 2009, defisit anggaran akan lebih kecil dari yang diperkirakan

Sebetulnya hal ini tampaknya akan terjadi kembali di tahun 2010 dan 2011. Kinerja belanja pemerintah pada 5 bulan pertama tahun 2010 menurun dibanding tahun 2009, terutama dalam pengeluaran barang modal dan material. Peningkatan tarif listrik pemerintah sebesar rata-rata 10 persen akan berdampak yang sangat kecil (satu atau dua persepuluh poin persentase) terhadap inflasi. Sementara itu, proyeksi pemulihan dalam harga-harga komoditas dunia, dan permintaan investasi dalam negeri, menunjukkan bahwa deflator PDB tampaknya akan mengalami percepatan melebihi CPI, dan ekonomi nominal dapat berkembang lebih cepat dibanding proyeksi pemerintah, menunjukkan bahwa penerimaan juga dapat meningkat lebih cepat. Bersama-sama, perkembangan ini menunjukkan bahwa defisit anggaran dapat lebih kecil secara berarti dibanding proyeksi pemerintah, terutama di tahun 2011.

Ramalan pertumbuhan dan inflasi di tahun 2011 telah ditingkatkan

Naiknya harga komoditas adalah satu dari beberapa faktor yang tampaknya mendorong inflasi yang lebih tinggi memasuki tahun 2011. Faktor lain termasuk melemahnya depresiasi pada kurs tukar yang lebih rendah, penyesuaian awal rata-rata 10 persen kenaikan tarif listrik, proyeksi percepatan dalam pertumbuhan uang dan kredit, dan meningkatnya permintaan. Faktor terakhir itu diproyeksikan untuk terjadi lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, dengan revisi naik ramalan PDB tahun 2010, walaupun ramalan itu juga mengandung risiko yang lebih besar dan lebih negatif.

Tabel 1: Ramalan menyatakan pemulihan pertumbuhan secara bertahap

		2009	2010	2011
Pertumbuhan Domestik Bruto	*(presentasi tahunan)*	4.5	5.9	6.2
Indek Harga Konsumen	*(presentasi tahunan)*	4.8	5.1	6.3
Neraca pembayaran	*(USD milyar)*	12.5	6.1	5.1
Defisit anggran	*(Persen dari PDB)*	-1.6	-1.0	-0.4
Pertumbuhan mitra dagang	*(presentasi tahunan)*	-0.9	5.0	4.3

Sumber: Departemen Keuangan, BPS dan badan-badan statistik nasional lain lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia

Tetapi proyeksi ini peka terhadap ketidakpastian ramalan dari harga komoditas

Proyeksi-proyeksi tersebut, bahkan sebetulnya seluruh ramalan ekonomi Indonesia secara umum, bergantung pada perkembangan harga komoditas dunia. Harga-harga itu cepat berubah, pergerakan yang besar seringkali karena gangguan kecil dan tidak diramalkan terhadap permintaan dan penawaran. Dalam jangka waktu pendek (satu hingga dua tahun) umumnya perubahan harga yang tajam biasanya mempengaruhi harga dalam negeri dan penerimaan pemerintah. Dalam situasi normal, harga komoditi meningkat moderat (harga non-energi 15 persen lebih tinggi dari ramalan, dan harga energi 30 persen lebih tinggi) akan meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar ¼ poin persentase. Bagi keluarga miskin, pada situasi normal, pertumbuhan penerimaan dapat mengimbangi peningkatan biaya hidup mereka, yang akhirnya dapat sedikit memangkas tingkat kemiskinan. Sama halnya dengan peningkatan penerimaan pemerintah (yang peka terhadap pergerakan harga energi) akan mengimbangi peningkatan biaya subsidi energi dan dana alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengurangi defisit anggaran. (Proyeksi-proyeksi ini mengasumsikan variabel-variabel lain, termasuk

kebijakan dan nilai tukar, tidak berubah dengan adanya perubahan harga komoditi tersebut.)

Masalah-masalah struktural jangka yang lebih panjang harus dijawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat…dan menuju kepada peningkatan berkelanjutan pada kualitas kehidupan rakyat Indonesia

Reformasi kebijakan sangatlah penting untuk memastikan ramalan ekonomi Indonesia meningkat menuju jangka waktu yang lebih panjang, dan kualitas hidup penduduknya akan diuntungkan dengan pertumbuhan ini. Tantangan kebijakan bersifat multi-dimensi. Pada saat disampaikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja menyamai angkatan kerja, pertumbuhan itu seluruhnya adalah informal, bukan dalam bentuk pekerjaan dengan kualitas sebaik di sektor formal. Dukungan terhadap pertumbuhan lapangan kerja sebagian membutuhkan dukungan akses pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Saat ini hal itu dibatasi oleh sektor perbankan yang oligopolis, relative berbiaya tinggi dan persaingan yang terbatas dari sumber pinjaman non-bank. Sementara pertumbuhan harus membawa peningkatan standar kehidupan, tingkat kematian ibu bersalin tetap terlalu tinggi, karena lemah dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia, dan hambatan keuangan menghalangi ketersediaan layanan ini pada banyak keluarga. Sebagian hal ini akan dapat dijawab melalui peningkatan pembiayaan pemerintah daerah, yang banyak memberikan layanan tersebut. Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menangani agenda perubahan iklim yang ambisius, yang dapat dikatakan sebagai masalah utama bagi kesejahteraan jangka panjang dunia.

A. PERKEMBANGAN TERBARU FISKAL DAN EKONOMI

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid terus berlanjut

Pertumbuhan PDB riil di Indonesia pada Triwulan 1/2010 mengokohkan pemulihan tahun lalu, dan diperkirakan akan makin tinggi pada sisa tahun 2010 dan tahun 2011

Ekonomi Indonesia bertumbuh sejalan dengan rata-rata dekade pada triwulan 1/2010, sedikit lebih lemah dibanding paruh kedua tahun 2009 (Grafik 1) Tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun meningkat menjadi 5,7 persen pada triwulan 1 dan diperkirakan akan terus meningkat tahun ini, menjadi 6 persen di triwulan 2 dan mendekati 6,5 persen pada triwulan akhir. Percepatan demikian akan mengembangkan keseluruhan ekonomi Indonesia sebesar 5,9 persen di tahun 2010, lebih tinggi 0,3 poin persentase poin dari yang diproyeksikan terdahulu di tahun ini, dan sekitar 6,2 persen di tahun 2011.

Lingkungan eksternal Indonesia lebih kuat dari perkiraan pada awal tahun 2010, dan pada umumnya perkiraan juga telah meningkat, tetapi risiko masih terus membayangi seperti yang diGrafikkan oleh ketidakstabilan pasar uang di bulan Mei dan masalah pendanaan masyarakat Eropa

Pertumbuhan lintas mitra-mitra dagang utama Indonesia terus meningkat, lebih cepat dari perkiraan pada triwulan 1 di China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. (Grafik 2) Ramalan konsensus pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia telah direvisi naik menjadi 5,0 persen di tahun 2010. Harga komoditas internasional juga pada umumnya sedikit lebih kuat dari perkiraan pada bagian awal tahun, dan proyeksi juga telah ditingkatkan, dengan harga-harga komoditas non-energi diperkirakan pada rata-rata mendekati 20 persen dan harga energi tahun 2010 berada 30 persen di atas tingkat tahun 2009, dan akan bertahan pada kisaran itu hingga tahun 2011. Sementara ramalan ekonomi internasional telah meningkat, risiko kelemahan ramalan-ramalan tersebut tetaplah cukup brarti, seperti dicerminkan dengan gejolak baru pada pasar keuangan dunia di bulan Mei dan meningkatnya keprihatinan sekitar kesehatan pendanaan masyarakat ekonomi-ekonomi maju.

Grafik 1: Pertumbuhan PDB triwulanan tetap berada pada atau di atas tingkat rata-rata
(persen perubahan)

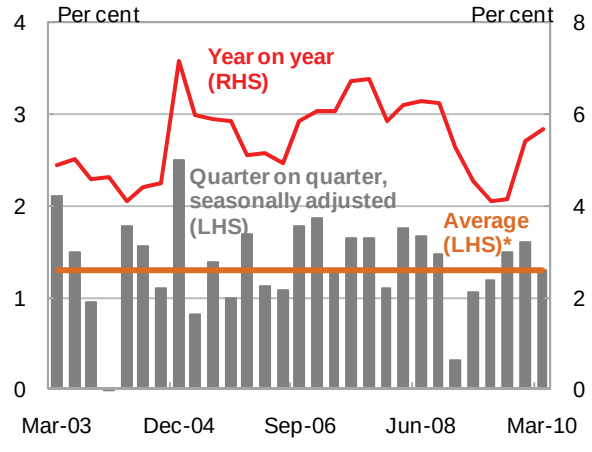

*** Rata-rata pertumbuhan Triwulan-ke-Triwulan antara triwulan 1/2000 dan triwulan 4/2009. Sumber: BPS, penyesuaian musiman Bank Dunia**

Grafik 2: Pertumbuhan mitra dagang utama terus pulih pada triwulan 1
(persen perubahan)

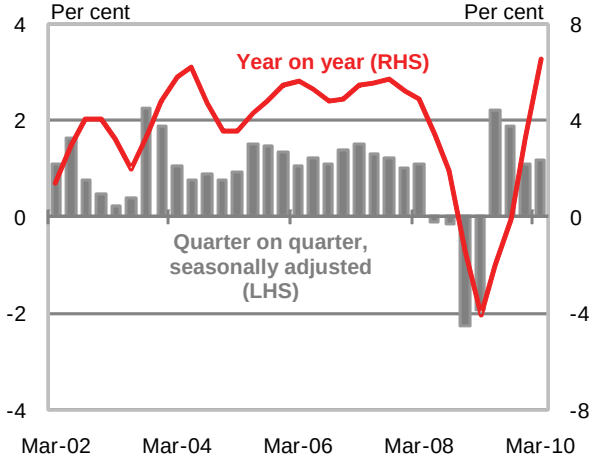

Sumber: BPS, badan-badan statistik nasional lewat CEIC, proyeksi Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia

a. Permintaan swasta meningkat pada paruh pertama tahun 2010, mengimbangi perlambatan dalam belanja negara

Belanja negara yang lemah mengurangi pertumbuhan secara berarti pada triwulan 1

Permintaan perorangan yang kuat mengikuti kembalinya pertumbuhan permintaan investasi ke tingkat sebelum penurunan, dan percepatan ini sebagai besar mengimbangi kejatuhan terbesar belanja pemerintah triwulan-ke-triwulanan yang pernah tercatat (sejak tahun 1993). (Grafik 3) Sebagian hal ini mencerminkan melunaknya belanja stimulus dari stimulus tahun 2009, dan untuk memperlambat pencairan anggaran modal dan material pada bulan-bulan pertama tahun 2010 (lihat Bagian A-6). Hal ini sangat berbeda dengan penekanan pada pencairan pada awal tahun 2009 di tengah penurunan ekonomi dunia, dan tambahan belanja untuk bahan-bahan pemilu sebelum pemilu parlemen tahun lalu. Pembelanjaan anggaran negara pada tingkat tahun 2009 akan secara langsung menyumbangkan ½ poin persentase kepada pertumbuhan PDB di triwulan 1.

…sebagian diimbangi dengan pemulihan pada investasi permesinan dan peralatan

Selama tiga triwulan berturut hingga triwulan 1/2010 belanja investasi telah tumbuh dengan kokoh, meningkat sebesar 7,9 persen pada tahun hingga triwulan 1/2010, dengan pulihnya investasi peralatan & permesinan; secara berlawanan, pertumbuhan belanja konsumsi perorangan bergerak menyamping dan pada awal tahun 2010 telah berada di bawah ekonomi agregat. (Grafik 4) Yang penting, investasi nominal (jumlah rupiah yang dibelanjakan untuk item-item investasi) telah meningkat jauh lebih cepat dari investasi riil (jumlah gedung-gedung, mesin, peralatan dan sebagainya yang dibeli oleh rupiah tersebut) sebagian besar karena pertumbuhan biaya konstruksi yang cepat (lihat Bagian B-2). Pulihnya investasi riil telah lebih lambat dibanding bagian belanja nominal yang diperuntukkan kepada investasi tersebut pada tahun-tahun terakhir. Pada pergantian ke tahun 2010 penyimpangan ini tampaknya telah kembali mantap. (Grafik 4)

Peningkatan investasi sejak pertengahan tahun 2009 dapat disandangkan kepada pemulihan kondisi-kondisi investasi, termasuk apresiasi kurs tukar valuta yang mendukung impor peralatan modal, peningkatan ketersediaan pendanaan seperti penurunan tipis suku bunga kredit dan peningkatan kredit-kredit baru, dan baru-baru saja pemulihan arus masuk penanaman modal asing (PMA) (lihat Bagian A-3). Bersama-sama dengan pertumbuhan impor modal dan penjualan semen menjelang triwulan 2, arus-arus masuk tersebut menunjukkan bahwa investasi tampaknya akan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2010.

Kuatnya pertumbuhan permintaan perorangan tampaknya akan bertahan hingga pertengahan tahun 2010

Kuatnya pertumbuhan permintaan swasta tampaknya akan berlanjut hingga pertengahan tahun. Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor meningkat pesat memasuki triwulan 2, di mana penjualan sepeda motor di bulan April hampir 70 persen lebih tinggi dibanding satu tahun yang lalu, pertumbuhan terkuat sejak puncaknya pada pertengahan tahun 2008. (Lampiran) Pengukuran konsumen yang lain juga tetap kuat atau berada pada tingkat yang tinggi. Indeks penjualan eceran Bank Indonesia meningkat dengan kuat di bulan Maret, dan berbagai survei melaporkan bahwa kepercayaan konsumen tetaplah tinggi. Semua ini berada di atas indikator investasi yang kuat (Lampiran)

Grafik 3: Belanja pemerintah mencatat penurunan terbesarnya dari yang pernah tercatat di triwulan 1
(persen pertumbuhan)

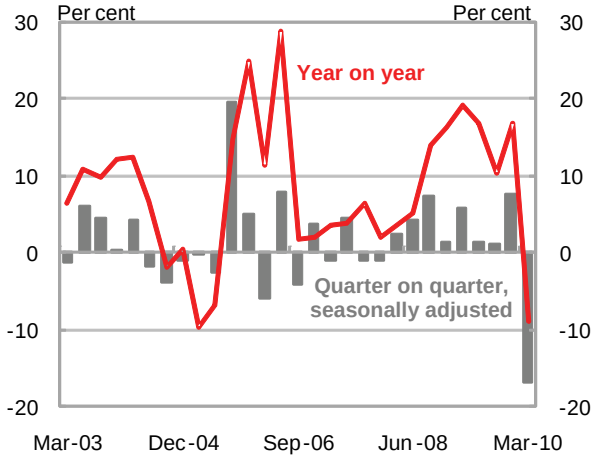

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

Grafik 4: Pulihnya investasi membawa bagian mereka dalam keseluruhan belanja pada ekonomi ke tingkat yang mendekati nilai tertinggi yang pernah tercatat
(persen PDB)

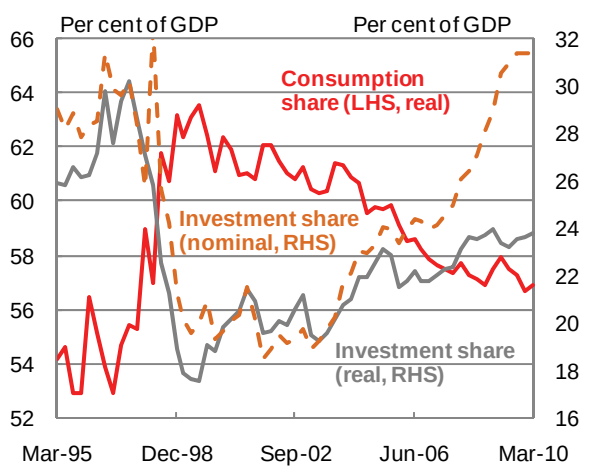

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

Pertumbuhan terus didorong oleh sektor yang berorientasi ke dalam negeri, dengan *output tradable* yang lemah tidak seperti biasanya

Output yang *non-tradable* terus menguat di triwulan 1, didorong oleh peningkatan di sektor perdagangan eceran dan kulakan, yang sebelumnya lemah pada penurunan yang terjadi satu tahun yang lalu. (Grafik 5) Tingkat pertumbuhan lintas sektor-sektor '*non-tradable*' lainnya tetap mantap atau lebih lemah pada triwulan 1. Secara keseluruhan output '*tradable*' tetap lemah, dengan produksi pertambangan, manufaktur dan pertanian seluruhnya menurun di triwulan 1, penurunan pertama terjadi sejak titik nadir ekonomi global di akhir tahun 2008. Indikator frekuensi yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ouput tetap kuat hingga pertengahan tahun 2010, dengan penjualan semen

pada tingkat pertumbuhan tertingginya sejak tahun 2008, belanja listrik industri bertumbuh dengan kuat. (Lampiran)

…terutama manufaktur

Output *tradable* yang melemah didorong oleh sektor manufaktur, dengan pertumbuhan menjadi 3,6 persen di tahun berjalan hingga triwulan 1 dan bertahan di bawah tingkat pra-krisis. Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara tetangganya, yang output manufakturnya jatuh dengan tajam selama penurunan tetapi kemudian telah pulih dengan kuat. (Grafik 6). Perlemahan manufaktur yang belakangan terjadi melanjutkan kecenderungan dekade yang lalu, dengan manufaktur turun dari 28 persen dari jumlah keluaran pada awal tahun 2000 menjadi sekitar 26 persen dari PDB di awal tahun 2010.

Grafik 5: Keluaran yang tidak diperdagangkan terus meningkat di atas sektor yang diperdagangkan *(persentase perubahan, tahun-ke-tahun)*

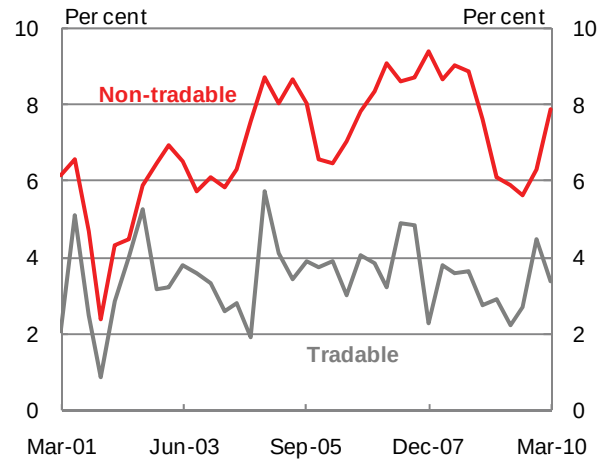

Grafik 6: Keluaran manufaktur Indonesia bergerak ke samping, berbeda dengan negara-negara tetangganya *(persentase perubahan, tahun-ke-tahun)*

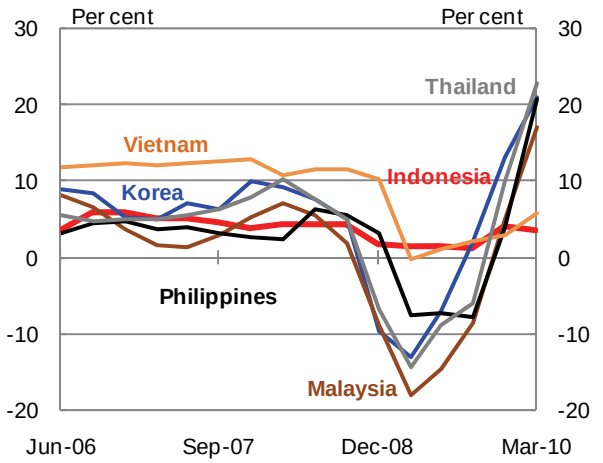

'Tidak diperdagangkan' termasuk sektor jasa yang dapat memiliki komponen yang diperdagangkan seperti kesehatan dan pendidikan; 'diperdagangkan' adalah sektor-sektor produsen barang (pertanian, pertambangan dan manufaktur). Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

Sumber: Badan-badan statistik nasional lewat CEIC

b. Sekarang impor meningkat lebih cepat dari ekspor, memperkecil surplus neraca perdagangan dan neraca berjalan

Pemulihan impor terus berlangsung lebih cepat dari ekspor, mempersempit surplus neraca perdagangan dan pembayaran

Pertumbuhan impor riil makin melampaui ekspor di triwulan 1. Setelah bangkit tapi masih lebih lambat dari ekspor pada pertengahan tahun 2009, impor mulai meningkat lebih cepat menjelang akhir tahun 2009. Permintaan dalam negeri yang kuat dan pemulihan permintaan proses ekspor mendorong peningkatan impor bahan bakar mineral, kendaraan, elektronik dan plastik. (Grafik 7) Lonjakan impor untuk masukan bahan setengah jadi dan barang modal membantu peningkatan yang dicatat bagi investasi pada triwulan 1. Pemulihan ekspor telah melambat, mengikuti kuatnya lambungan pada tahap-tahap awal pemulihan global. (Grafik 8) Pemulihan ini didorong oleh ekspor pertambangan dan mineral — terutama ke China, India, Jepang dan Korea Selatan — yang telah melesat jauh di atas tingkatan tahun 2008. Sementara ekspor-ekspor tersebut terus terlaksana dengan baik, nilai ekspor pertanian, kehutanan dan migas mulai turun kembali menjelang akhir tahun 2009 yang didorong oleh moderasi ekspor CPO ke China dan Eropa, mengikuti pengisian persediaan kembali yang dilaksanakan sebelumnya. Ekspor lemak dan minyak, produk kayu dan bahan bakar mineral ke China dan daerah Euro semuanya agak mundur memasuki triwulan kedua tahun 2010.

Laju pertumbuhan impor riil yang lebih cepat membuat ekspor netto memberi sumbangan negatif sebesar 0,2 poin persentase kepada pertumbuhan PDB di triwulan 1. Hal ini bersama-sama dengan penurunan tipis harga ekspor Indonesia relatif terhadap harga impor (kondisi perdagangan) menyempitkan surplus perdagangan sebesar 2,5 miliar dolar

Amerika. (Lampiran) Surplus perdagangan yang lebih rendah sangatlah cukup untuk mengimbangi kontraksi kecil dalam defisit pendapatan bersih Indonesia, memangkas surplus rekening berjalan hampir sebesar 2 miliar dolar Amerika di triwulan 1.

Grafik 7: Pemulihan nilai impor berlanjut…
(miliar dolar Amerika, rata-rata bergerak 3 bulanan)

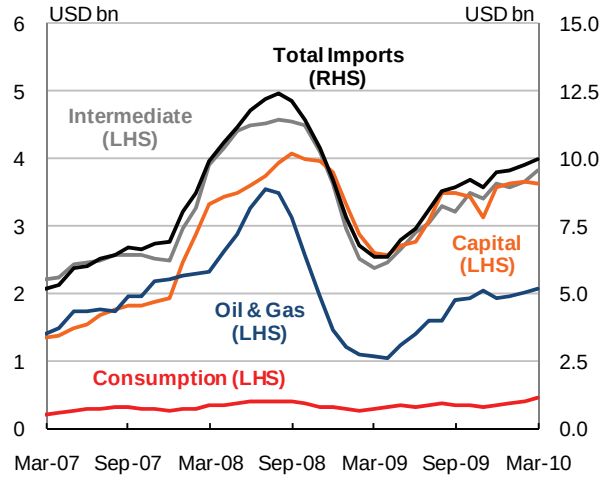

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

Grafik 8: … sementara nilai ekspor telah mandek
(miliar dolar Amerika, rata-rata bergerak 3 bulanan)

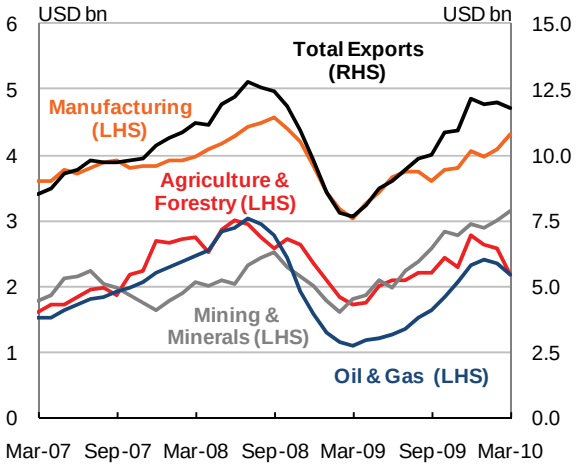

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

c. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya akan terus mengalami percepatan, dan proyeksi untuk tahun 2010 telah ditingkatkan

Proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2010 telah ditingkatkan dengan percepatan investasi yang melebihi perkiraan; dan permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan bertumbuh tidak kurang dari 5,9 persen di tahun 2010, meningkat ke sekitar 6,2 persen di tahun 2011. Ramalan pertumbuhan tahun 2010 telah ditingkatkan dari 5,6 persen karena peningkatan kondisi dalam negeri dan internasional memasuki triwulan kedua, sementara mengetahui risiko pelemahan yang berhubungan dengan gejolak pasar keuangan dan ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi maju.

Permintaan dalam negeri diperkirakan akan mendorong percepatan keseluruhan ekonomi, mengimbangi beban dari impor yang melebihi pertumbuhan ekspor. Konsumsi swasta diperkirakan akan meningkat secara bertahap, tumbuh sekitar 5,1 persen di tahun 2010 dan 5,3 persen di tahun 2011, dengan dukungan yang terus diberikan dari peningkatan pendapatan riil, dengan pertumbuhan harga konsumen tetap moderat dan pekerjaan stabil. Sektor-sektor yang menekankan pada permintaan dalam negeri (transportasi, komunikasi, berbagai jasa eceran, konsumen dan usaha) tampaknya akan terus berjalan lebih baik dibanding mereka yang lebih condong kepada eksternal (manufaktur dan yang berhubungan dengan sumber daya). Investasi juga diperkirakan akan mengalami percepatan di tahun 2010, dirangsang oleh meningkatnya harga komoditas, peningkatan bertahap dalam investasi iklim, dan daya tarik pasar dalam negeri yang berkembang. Proyeksi peningkatan dalam kondisi pendanaan dalam negeri dan kembalinya beberapa penanaman modal asing diperkirakan akan mendanai investasi dalam negeri yang meningkat. Belanja pemerintah yang lebih lemah yang terlihat pada triwulan pertama tampaknya akan berlanjut sepanjang tahun, walaupun program-program pembangunan dan inti pemerintah tampaknya akan meningkatkan porsi keseluruhan belanja mereka.

Ramalan ekonomi eksternal Indonesia telah menguat pada tiga bulan terakhir… tetapi juga diikuti oleh resiko pelemahan

Proyeksi bagi pertumbuhan mitra perdagangan utama untuk tahun 2010 telah ditingkatkan sebesar setengah poin persentase menjadi 5,0 persen. Bersamaan dengan itu, perkembangan ekonomi dunia pada bulan Mei telah memperbesar risiko pelemahan terhadap ramalan ini, terutama jika masalah-masalah pengelolaan hutang pemerintah ekonomi maju dan konsolidasi fiskal cukup banyak mempengaruhi ekonomi dunia dan ramalan keuangan.

Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2011, menyiutkan surplus perdagangan, dan menyeimbangkan neraca berjalan

Walaupun terdapat peningkatan ini di dalam proyeksi permintaan eksternal, pertumbuhan impor tetap diramalkan akan meninggalkan pertumbuhan ekspor pada tahun 2010 dan 2011, dengan kuatnya permintaan dalam negeri melampaui pertumbuhan pada tujuan-tujuan ekspor dan harga-harga komoditas Indonesia. Impor diperkirakan akan dituntun oleh impor barang modal dan mesin, mendukung kuatnya pertumbuhan dalam investasi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan permintaan akan bahan mentah dari China dan India dapat membuat ekspor komoditas terus berada di depan ekspor-ekspor lain di di tahun 2011. Surplus perdagangan kini diperkirakan akan mengecil hampir sebesar 7 miliar dolar Amerika menjadi sekitar 14 miliar dolar Amerika di tahun 2010, sebelum mengkerut tipis lebih lanjut di tahun 2011. Sementara itu, defisit pendapatan diperkirakan akan melebar, karena tingginya harga-harga komoditas akan menyebabkan pengembalian keuntungan yang lebih besar, terutama oleh perusahaan-perusahaan minyak & gas bumi. Bersama-sama ramalan-ramalan ini menunjukkan bahwa surplus neraca berjalan tampaknya akan turun dari 10,6 miliar dolar Amerika di tahun 2009 menuju keseimbangan di tahun 2011.

Table 2: Permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus menjadi mendorong percepatan bertahap perekonomi Indonesia
(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

	Annual			Year to December quarter			Revision to Annual	
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2010	2011
1. Main economic indicators								
Total Consumption expenditure	6.2	5.1	5.5	5.9	6.0	4.3	-0.6	0.1
Private consumption expenditure	4.9	5.1	5.3	4.0	5.6	5.6	-0.2	0.1
Government consumption	15.7	5.4	6.3	17.0	8.0	-2.0	-2.7	0.2
Gross fixed capital formation	3.3	9.6	8.3	4.2	10.1	7.3	1.2	1.1
Exports of goods and services	-9.7	14.9	11.1	3.7	9.6	11.4	-0.8	0.4
Imports of goods and services	-15.0	17.4	11.7	1.6	10.1	12.7	-1.0	-0.4
Gross Domestic Product	**4.5**	**5.9**	**6.2**	**5.4**	**6.0**	**6.4**	**0.3**	**0.1**
Agriculture	4.3	2.2	4.3	4.6	2.5	3.3	n/a	n/a
Industry	3.5	4.3	5.4	5.1	4.4	5.4	n/a	n/a
Services	5.7	8.2	7.9	5.9	8.4	8.0	n/a	n/a
2. External indicators								
Balance of payments (USD bn)	12.5	6.1	5.1	n/a	n/a	n/a	-0.1	0.4
Current account balance (USD bn)	10.5	2.5	0.5	n/a	n/a	n/a	-0.2	-0.4
Trade balance (USD bn)	21.0	14.2	13.2	n/a	n/a	n/a	0.2	-0.5
Financial account balance (USD bn)	3.6	2.8	4.6	n/a	n/a	n/a	-0.4	1.1
3. Other economic measures								
Consumer price index	4.8	5.1	6.3	2.6	6.4	6.0	-0.2	0.2
Poverty basket Index	5.8	6.8	7.2	2.9	8.1	7.3	0.8	0.9
GDP Deflator	8.5	9.4	12.2	6.6	11.0	12.0	-0.8	0.2
Nominal GDP	13.4	15.9	19.2	12	17.7	19.2	-0.4	0.3
4. Economic assumptions								
Exchange rate (IDR/USD)	10356	9218	9200	9475	9200	9200	-182.1	-200.0
Interest rate (SBI, 1 month)	7.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0
Indonesian crude price (USD/bl)	61.6	77.7	78.0	75.1	78.0	78.0	-0.7	-3.3
Major trading partner grow th	-0.9	5.0	4.3	3.2	4.1	4.6	0.7	0.3

Catatan: Proyeksi arus perdagangan berhubungan dengan akun nasional, yang pegerakan volume dagang sebenarnya dapat dinyatakan terlalu besar dan pergerakan harga dinyatakan terlalu kecil karena perbedaan dalam rangkaian harga

Kotak 1: Bagaimana penguatan Renminbi China berdampak pada perekonomian Indonesia

Ketimpangan dunia yang berasal dari kebijakan kurs tukar valuta negara-negara berkembang telah cukup banyak dibicarakan. Pada khususnya, ukuran surplus neraca berjalan dan cadangan devisa China biasanya disoroti oleh beberapa pengamat sebagai sumber ketidakstabilan dunia. Para mitra dagang dari negara yang mengalami surplus mengatakan bahwa kurs tukar mendorong ekspor secara atifisial, dengan mengorbankan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri. Karena makin tingginya perhatian akan topik ini, maka bermunculan spekulasi bahwa China akan melakukan penilaian ulang atas mata uangnya, Renminbi (RMB). Mekanisme transmisi kemungkinan revaluasi RMB dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dibicarakan di bawah.

RMB stabil di kisaran 6,8 yuan per dolar Amerika sejak bulan Agustus 2008, kira-kira pada waktu ekonomi dunia memasuki resesi. Antara tahun 2005 dan bulan Agustus 2008 RMB terapresiasi sekitar 20 persen terhadap dolar Amerika, dari sekitar 8,3 RMB/dolar Amerika menjadi 6,8 yang berlaku sekarang. Ramalan media dan pasar keuangan menyebutkan kemungkinan kenaikan RMB serendahnya sekitar 5 persen per tahun. Bandingkan dengan gejolak pada kurs tukar mengambang utama: pada lima bulan pertama tahun 2010, Euro telah terdepresiasi terhadap dolar Amerika sekitar 20 persen, meningkatkan kurs tukar efektif riil (REER, yang mencerminkan gerak dalam keranjang kurs tukar bilateral) China. (Grafik 9) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa RMB dapat terlalu rendah nilainya antara 12 dan 50 persen (perkiraan ini umumnya sebelum apresiasi efektif RMB dengan pelemahan tahun ini dalam Euro), dengan rata-rata perkiraan sekitar 30 persen. Karena rupiah cenderung turut menyeimbangkan diri dengan dolar Amerika pada kisaran 9.000-10.000, RMB juga telah terapresiasi terhadap rupiah sejak tahun 2005. (Grafik 10)

Grafik 9: RMB meningkat sekitar 20 persen terhadap dolar Amerika

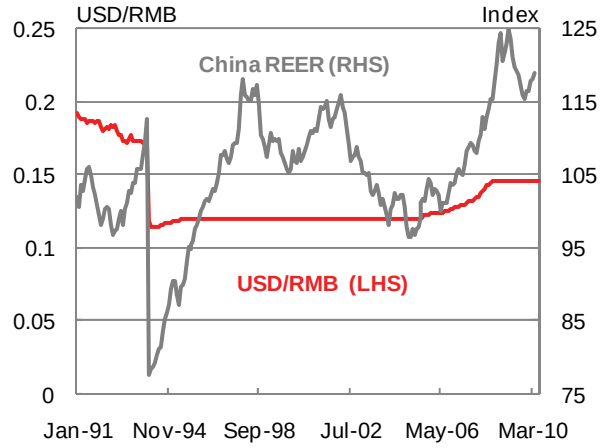

Sumber: CEIC dan perhitungan Bank Dunia

Grafik 10: … dan juga telah terapresiasi relatif terhadap rupiah

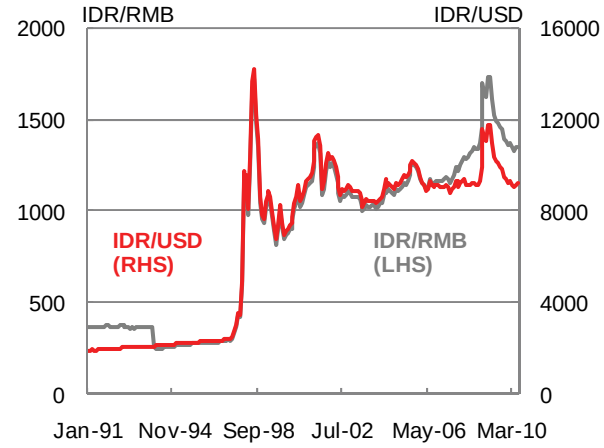

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia

Apresiasi RMB akan membawa dampak terhadap ekonomi Indonesia melalui beberapa jalur, dengan dampak yang dapat saling mengimbangi (Grafik 11). Pada jalur perdagangan bilateral, apresiasi RMB terhadap rupiah dapat menyebabkan harga-harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih menarik bagi pembeli di China dalam jangka pendek. Hal itu juga menyebabkan impor barang-barang China menjadi lebih mahal, yang dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dengan China. Dalam dampaknya melalui perdagangan pihak ketiga, sejauh ekspor-ekspor Indonesia terintegrasi secara vertikal dengan proses-proses produksi China, ekspor Indonesia dapat merosot dengan menurunnya ekspor China. Implikasi juga dapat terjadi lewat pergeseran pola PMA dengan potensi RMB yang lebih tinggi yang membuat Indonesia menjadi lebih menarik sebagai tujuan PMA dari China. Hal ini dapat mendorong pergerseran fasilitas produksi ke Indonesia, meningkatkan investasi dalam negeri. Peningkatan daya saing juga dapat menyebabkan peningkatan kurs tukar Indonesia yang kemudian akan meringankan peningkatan apapun terhadap daya saing ekspor. Jika RMB akan terapresiasi, hal itu dapat mendorong bank-bank sentral di wilayah yang bersangkutan untuk membiarkan mata uang mereka terapresiasi juga, tanpa takut kehilangan daya saing. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, bersama dengan kecilnya kemungkinan apresiasi RMB, tidak ada jawaban jelas mengenai arah dampaknya terhadap Indonesia, walaupun tampaknya dampak tersebut hanya akan berukuran kecil saja.

Terdapat beberapa penelitian yang baru dilakukan yang menekankan pada dampak ekonomi apresiasi RMB terhadap neraca perdagangan China. Ramalan ekonomi Bank Pembangunan Asia (ADB) yang terbaru membicarakan masalah regim kurs tukar Asia Timur. Laporan itu menyoroti bagaimana suatu bagian proses-proses produksi Asia Timur yang berarti terpisah secara vertikal dalam tahapan, dan dilaksanakan oleh negara-negara yang berbeda. Ditunjukkan bahwa China telah ditetapkan sebagai titik pertemuan, mengimpor banyak komponennya dari negara-negara lain, lalu mengekspornya kembali negara maju. Untuk barang-barang ini, apresiasi RMB dapat sepertinya memiliki dampak yang kecil, karena hanya biaya barang komponen pemrosesan kembali yang akan meningkat, yang berarti kemungkinan terdapat kenaikan dalam barang-barang komponen non-China. Thorbecke dan Smith (2010) menemukan bahwa apresiasi RMB terhadap dolar Amerika sebesar 10 persen akan memangkas ekspor barang terproses (komponen perakitan yang diimpor) China sebesar 4 persen, dan ekspor biasa (padat karya) sebesar 12 persen, dengan asumsi kurs tukar regional lainnya tidak berubah. Secara keseluruhan, dengan pangsa ekspor Indonesia ke China berkisar 9 persen di tahun 2009, dengan energi dan komoditas lain yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri memiliki porsi yang besar dari hal ini, apresiasi RMB tampaknya tidak akan banyak mempengaruhi ekspor Indonesia ke China.

Grafik 11: Mekanisme transmisi apresiasi Rupiah

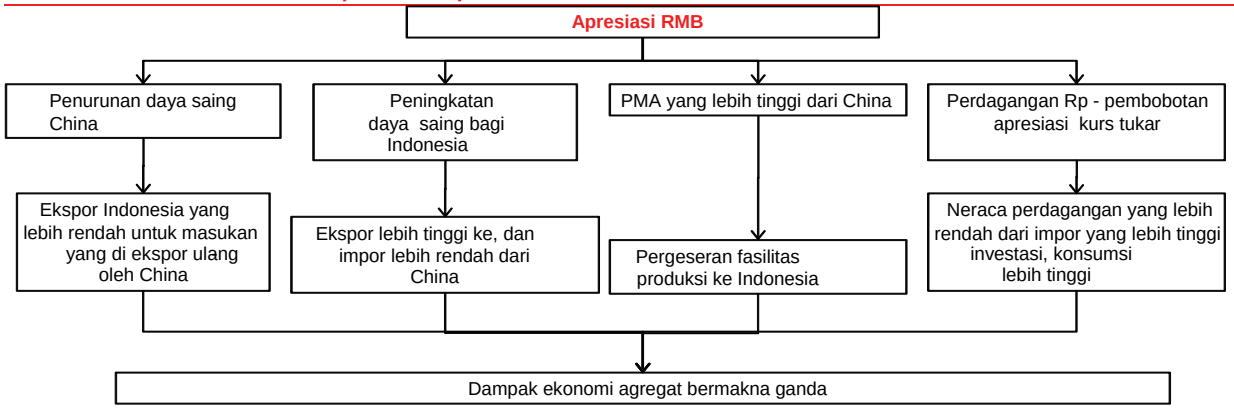

2. Pasar keuangan Indonesia turun di bulan Mei karena krisis hutang Eropa

a. Saham dan obligasi Indonesia melemah di bulan Mei karena arus keluar modal berukuran besar yang juga memberi tekanan kepada rupiah

Dipicu oleh peristiwa di Eropa, IHSG turun sebesar 5,5 persen di bulan Mei tetapi masih tetap naik 6 persen tahun berjalan, membuatnya menjadi pencetak prestasi posisi teratas di dunia

Setelah membukukan kinerja triwulan 1 yang kokoh dan meningkat ke rekor tertinggi pada akhir bulan April hingga awal Mei, peristiwa-peristiwa di Eropa memicu aksi penjualan obral jumlah besar pada pasar saham Indonesia pada hampir sepanjang bulan Mei. Penguduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tgl 5 Mei bersamaan dengan percepatan perkembangan zona Eropa, meningkatkan ketidakpastian investor dan peningkatan penghindaran resiko. Pasar sedikit pulih pada minggu terakhir bulan Mei untuk mencatat penurunan keseluruhan sebesar 5,5 persen untuk bulan itu. Dengan sebagian besar pasar-pasar dunia mengalami penurunan sekitar 5-10 persen di bulan Mei, kinerja IHSG tidaklah luar biasa. Selain itu, pada awal bulan Juni IHSG telah meningkat 6 persen dari awal tahun, sementara rata-rata tolok ukur dari 10 indeks utama dunia telah turun 5 persen pada tahun berjalan (sebagai contoh, Indeks Saham Gabungan Shanghai dan Indeks Bovespa Brasil masing-masing telah turun sebesar 20 dan 10 persen). (Grafik 12)

Yield dari obligasi pemerintah dalam rupiah meningkat tipis di bulan Mei, tidak seperti yang di region yang sama, menunjukkan Indonesia tetaplah lebih rentan dibanding sebagian besar yang lain terhadap kejutan eksternal yang mempengaruhi toleransi risiko dunia

Pada gugus pendapatan tetap, yield dari Surat Utang Negara (SUN) 5 tahunan dalam rupiah meningkat lebih dari 50 basis poin di bulan Mei, setelah jatuh ke nilai terendah yang pernah tercatat di bawah 8 persen pada akhir bulan April, karena pasar merasakan dampak krisis Yunani terhadap toleransi resiko investor (Grafik 13). Berbeda dengan Indonesia, yield dari obligasi regional lain dalam mata uang setempat adalah datar hingga negatif, dan di Amerika Serikat, yield obligasi 5 tahunan jatuh sebesar 8 persen di bulan Mei. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini: pertama-tama, obligasi Indonesia yang memiliki yield tinggi masih dianggap sebagai “aktiva beresiko” relatif terhadap investasi aman terpercaya seperti obligasi Amerika Serikat, walaupun hutang Indonesia baru-baru saja mendapatkan peningkatan peringkat dari badan-badan pemeringkat; dan kedua, sebagian besar obligasi pemerintah Indonesia dimiliki oleh pihak asing relatif terhadap negara-negara tetangganya, sehingga yield SUN menjadi lebih rentan terhadap perubahan cepat yang berasal dari kejutan eksternal. Per bulan Mei 2010, 25 persen dari keseluruhan SUN yang beredar dimiliki oleh pihak asing (bandingkan dengan kepemilikan asing sebesar 3 persen di Thailand).

Spread EMBI (indeks obligasi pasar negara berkembang dari JP Morgan) obligasi Indonesia dalam dolar Amerika, yang berperan sebagai wakil dari “risiko negara” dan telah terus menurun sejak bulan Maret 2009, juga mulai meningkat pada awal bulan Mei dan melebar hampir mencapai 100 basis poin selama berjalannya bulan untuk mencapai 296 basis poin.

Grafik 12: IDX dan indeks saham lainnya jatuh di bulan Mei karena investor yang gelisah beralih ke uang tunai dolar Amerika

(indeks saham di-indeks ke 100 pada 2 Januari 2008; Indeks Luas Dolar di-indeks ke 100 pada 21 Januari 1997)

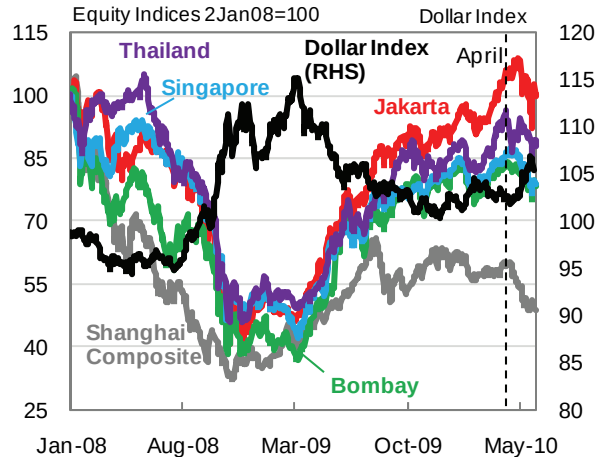

Sumber: FRB, CEIC dan Bank Dunia

Grafik 13:… dan yield obligasi pemerintah dalam rupiah meningkat tipis sementara milik negara tetangga tidak, menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap kejutan permintaan eksternal

(yield obligasi pemerintah 5 tahunan dalam mata uang setempat dalam persen)

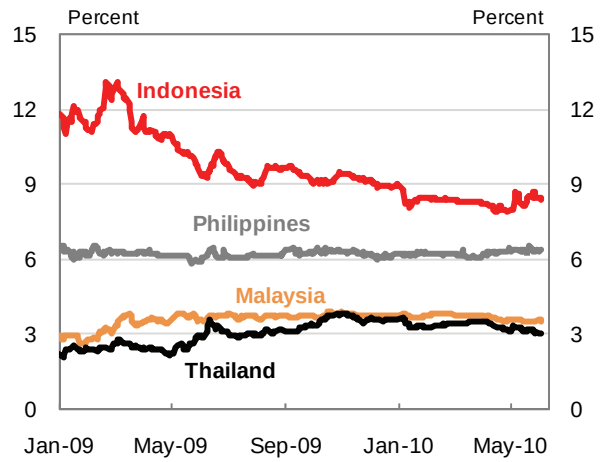

Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Penurunan toleransi risiko investor karena masalah dari Eropa menyebabkan penguatan dolar Amerika, serupa dengan akhir tahun 2008…

Sisi lain dari penjualan obral saham dan obligasi yang disebabkan oleh masalah di Eropa adalah penguatan dolar Amerika (USD). Serupa dengan krisis keuangan menjelang akhir tahun 2008, para investor di bulan Mei makin gelisah akan keadaan di Eropa dan kemungkinan konsekuensinya, sehingga mereka memulai penjualan "aktiva beresiko" secara besar-besaran demi rasa keamanan memiliki uang tunai dolar Amerika. Indeks Dolar (*Broad USD Index*) bank sentral Amerika Serikat (yang mencakup 26 mata uang yang mewakili mitra-mitra dagang utama Amerika) meningkat hampir 3 persen pada bulan April-Mei, dengan peningkatan pada bulan Mei saja sebesar 2,25 persen (Grafik 12).

…dan pelemahan tipis rupiah karena penjualan aktiva keuangan Indonesia oleh kepemilikan asing, umumnya berupa SBI, menyebabkan arus keluar modal sebesar 5,7 miliar dolar Amerika di bulan Mei

Penjualan besar-besaran saham dan obligasi pemerintah, bersama-sama dengan pencurahan masal instrumen pasar uang jangka pendek (SBI) oleh pihak asing, menekan kurs tukar rupiah/dolar Amerika di bulan Mei. Arus modal masuk bersih sebesar 9 miliar dolar Amerika ke dalam aktiva keuangan Indonesia dari bulan Januari-April berhasil mempertahankan dukungan terhadap rupiah pada empat bulan pertama tahun berjalan. Arusnya berbalik secara besar-besaran pada bulan Mei, dengan aliran bersih modal asing sebesar 5,7 miliar dolar Amerika mengalir ke luar selama berjalannya bulan (**90 persen** dari aliran ini merupakan penjualan SBI, 7 persen adalah penjualan SUN, dan 3 persen dalam saham). Sebagai akibat dari aliran keluar modal berukuran besar ini, rupiah melemah sebesar 1,8 persen di bulan Mei (Grafik 14 dan Grafik 15). Depresiasi tersebut sesungguhnya dapat jauh lebih besar jika bank sentral tidak secara aktif melakukan intervensi untuk mendukung rupiah (cadangan devisa turun sebesar 4 miliar dolar Amerika di bulan Mei karena BI membeli rupiah dan menjual valuta asing).

Grafik 14: Rupiah melemah tipis di bulan Mei setelah aliran modal keluar berukuran besar memangkas lebih dari 60 persen aliran modal masuk bersih tahun berjalan…
(aliran masuk bersih menuju saham Indonesia, obligasi pemerintah dan instrumen pasar uang dalam miliar rupiah)

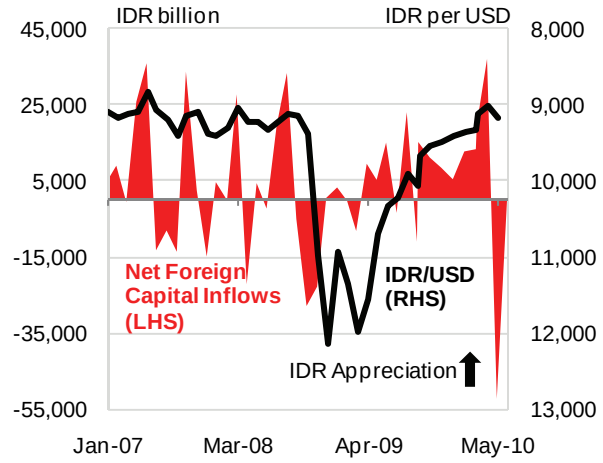

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Grafik 15: …dengan penjualan SBI yang dimiliki asing merupakan 90 persen dari aliran keluar tersebut
(kepemilikan asing atas instrumen pasar uang jangka pendek (SBI)dan pembelian netto instrumen yang sama, dalam miliar rupiah)

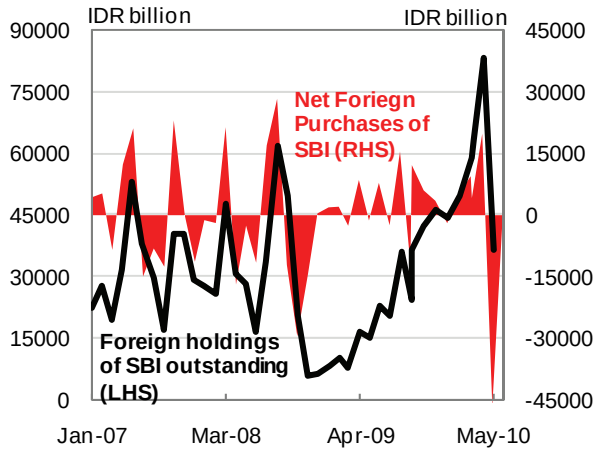

Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Aliran keluar modal berukuran besar di bulan Mei, mengikuti aliran masuk yang besar di bulan April, menunjukkan cepat berubahnya aliran ini dan manfaat peredam cadangan yang besar

Aliran keluar modal asing di bulan Mei mengikuti *aliran masuk* sebesar 4 miliar dolar Amerika, nilai tertinggi yang pernah tercatat, di bulan April, yang mencerminkan kerentanan Indonesia terhadap gejolak perubahan arah arus modal dan menegaskan status "uang panas" yang dianugerahkan terhadap investasi SBI pada khususnya. Peningkatan kerapuhan terhadap aliran modal ini sebagian disebabkan oleh rekening modal terbuka Indonesia, sehingga sangatlah penting bagi negara untuk memiliki cadangan peredam sebesar mungkin agar mampu membendung volatilitas valuta yang berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas bagian lain dari ekonomi.

Dibandingkan dengan akhir tahun 2008, kini sektor keuangan Indonesia lebih rentan terhadap perubahan arah mendadak dalam toleransi resiko… walaupun eksposur ekonomi riil tidak banyak berubah

Perbandingan dari kerentanan yang kini dimiliki Indonesia terhadap ketidakstabilan yang diperbarui dalam pasar keuangan global relatif terhadap kerentanan negara terhadap krisis dunia menjelang akhir tahun 2008 diGrafikkan pada Grafik 5. Perbedaan utama adalah bahwa arus masuk modal berukuran besar pada tahun yang lalu telah meninggalkan pasar keuangan lebih tidak terlindung sekarang dibandingkan di tahun 2008 terhadap risiko pelarian modal atau perubahan arah mendadak. Walaupun cadangan devisa telah meningkat sebesar 17,5 miliar dolar Amerika sejak bulan September 2008, penjualan besar-besaran aktiva keuangan oleh kepemilikan asing, terutama saham yang kini dimiliki oleh pihak asing sebanyak 66 persen, dapat cepat menyedot cadangan jika BI banyak melakukan intervensi pada pasar kurs valuta asing (Grafik 16).

Eksposur pemerintah dan sektor korporat, melalui hutang eksternal jangka pendek, cukup serupa dengan keadaan menjelang akhir tahun 2008 dan tampaknya relatif lebih terkendali dibandingkan dengan risiko pasar keuangan. Pada bulan Maret, cadangan berjumlah dua kali lipat hutang eksternal jangka pendek, dan setara dengan 6 bulan impor dan pembayaran utang resmi. Sementara eksposur ekonomi riil, melalui ekspor dan terutama kebergantungan pada komoditas ekspor, turun antara bulan Agustus 2008 dan pertengahan tahun 2009.

Grafik 16: Dibandingkan dengan akhir tahun 2008, sektor keuangan Indonesia lebih tak terlindung terhadap perubahan arah yang dapat timbul dari krisis utang Eropa …
(aliran masuk modal bersih, kepemilikan asing atas obligasi dan saham, cadangan dan hutang eksternal jangka pendek, dalam miliar rupiah)

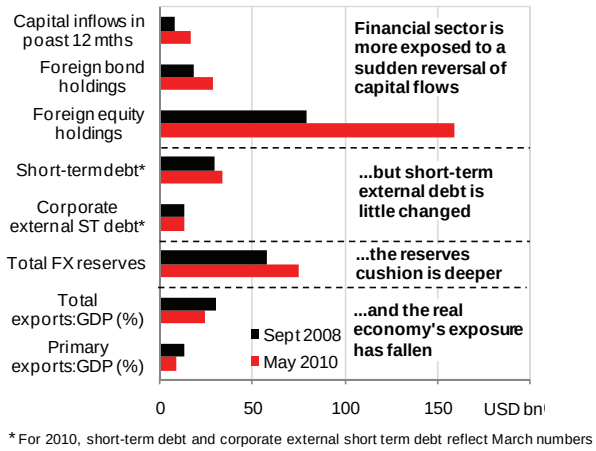

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Grafik 17: …tetapi investasi asing dalam SUN bertahan cukup baik tahun ini, jadi tampaknya tidak semua arus masuk merupakan "uang panas"
(kepemilikan SUN oleh asing dan pembelian netto dari yang sama, dalam miliar rupiah)

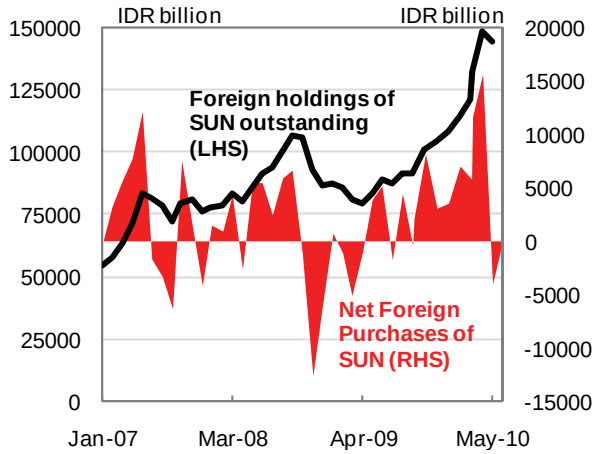

Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Walaupun terjadi penjualan besar-besaran SBI di bulan Mei, kepemilikan SUN oleh asing tetap bertahan, menunjukkan investor obligasi mungkin lebih tak terduga dibanding masa lalu

Walaupun terdapat peningkatan eksposur pasar keuangan terhadap aliran keluar modal dan investor makin menghindari pengambilan risiko, investasi uang riil dalam obligasi pemerintah hanya sedikit menurun selama bulan Mei. Bahkan setelah penjualan besar-besaran di bulan Mei, aliran masuk modal asing bersih menuju SUN berjumlah 3,92 miliar dolar Amerika untuk tahun berjalan, dan sekarang merupakan 120 persen dari jumlah aliran masuk bersih ke aktiva keuangan tahun berjalan (Grafik 17). Bahwa investasi asing dalam SUN tidak dicairkan secepat pencairan kepemilikan SBI di bulan Mei dapat menunjukkan bahwa investor obligasi pemerintah memang percaya kepada cerita fundamentil positif Indonesia dan tidak akan secepat itu menarik kembali dana mereka seperti dilakukan di masa lalu. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa singkatnya jatuh tempo SBI mendukung penarikan cepat atas investasi dibandingkan dengan SUN (yang tampaknya akan menghadapi masalah likuiditas bila banyak investor memutuskan untuk menjual).

Daripada menetapkan kendali modal yang eksplisit BI memilih menyesuaikan aturan yang membuat tujuan yang pilihan dari arus yang paling cepat berubah lebih tidak menarik dan untuk secara umum memperdalam likuiditas

Pada pertengahan bulan Juni, BI menyesuaikan peraturan mengenai pasar SBI, yang umumnya bertujuan untuk meningkatkan mekanisme transmisi kebijakan moneter, mengurangi gejolak dalam aliran portofolio dan mendukung investasi dengan jangka yang lebih panjang, dan meningkatkan likuiditas dari pasar antar bank setempat. Hal ini termasuk mensyaratkan penyimpanan SBI minimum 1 bulan memperkenalkan SBI 9 dan 12 bulanan, melipatduakan marjin bunga menjadi 100 bps dari suku bunga rujukan pada peminjaman dan tabungan *overnight* dengan bank sentral, dan menciptakan fasilitas term-deposit.

Tanpa menjadi pengendalian modal yang tegas yang ditujukan pada pihak asing, persyaratan kepemilikan minimum SBI, dengan membuat SBI sebagai instrumen yang kurang likuid, diharapkan dapat mengurangi daya tarik mereka sebagai instrumen perdagangan. Hal ini akan mengurangi jumlah yang harus diterbitkan oleh BI, dengan sendirinya mengurangi bobot mereka pada neraca (mengenai biaya-biaya tersebut, lihat Bagian B, Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi Maret 2010). Istilah fasilitas tabungan juga akan berdampak pengurangan perdagangan dan memangkas jumlah SBI jangka pendek yang harus diterbitkan BI. Investor yang mencari fasilitas investasi berjangka dan tidak membutuhkan 'transaksi pendukung' untuk mendorong pembelian valuta asing akan dapat berpindah ke tabungan berjangka. Penerbitan SBI jangka yang lebih panjang juga sejalan dengan pengurangan investasi yang ringan kaki, dan akan membantu pengembangan kurva yield yang terdefinisi dengan jelas. Akhirnya, memperlebar koridor suku bunga, setidaknya pada keadaan normal, tampaknya akan

mendorong bank-bank untuk memberi dan mengambil pinjaman dari antar mereka sendiri dibanding bergantung pada BI sebagai perantara.

Grafik 18: Pemerintah telah mengisi lebih dari setengah target penerbitan obligasi tahun 2010-nya, umumnya dari obligasi umum dalam mata uang rupiah
(penerbitan obligasi baru; obligasi dolar Amerika diubah pada kurs tukar yang berlaku pada waktu penerbitan)

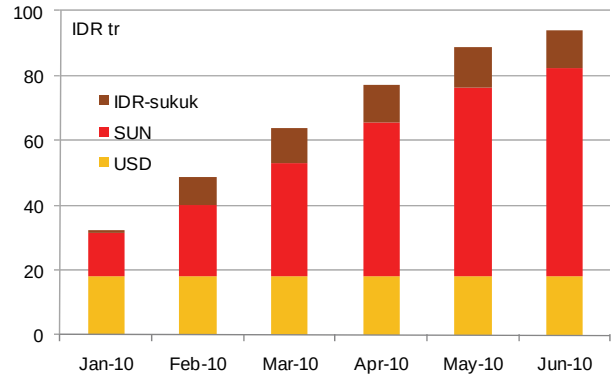

*** Data Juni hingga 15 Juni. Sumber: Departemen Keuangan**

Pada awal bulan Juni 2010, pemerintah telah menerbitkan obligasi pemerintah senilai 94 triliun rupiah (dalam mata uang rupiah dan bukan rupiah), atau lebih dari setengah dari target penerbitan obligasi bruto sebesar 175 triliun rupiah untuk tahun ini. Rata-rata masa sedikit lebih panjang pada triwulan 2 dibanding triwulan 1, dan yield penjualan sesuai dengan catatan rendahnya yield pada pasar sekunder. Penawaran sukuk (obligasi Islam) dalam mata uang rupiah ditarik dari lelang pada minggu bulan Mei waktu kelemahan terbesar dalam pasar keuangan dunia, tetapi penarikan itu tampaknya lebih erat hubungannya dengan faktor-faktor khusus pelelangan tersebut, dengan penawaran yang jauh berada di bawah harga pasar obligasi yang berlaku.

Posisi fiskal Indonesia yang kuat (terutama dibandingkan krisis utang Eropa), ramalan pertumbuhan positif dan berlanjutnya angka inflasi yang moderat, bersama-sama dengan yield tertinggi di wilayahnya, dan rekening modal yang relatif terbuka, akan mempertahankan permintaan akan obligasi pemerintah Indonesia tetap tinggi hingga akhir tahun. Sementara kemungkinan defisit tahun 2010 akan lebih kecil dari proyeksi pemerintah menunjukkan keseluruhan kebutuhan pendanaan juga tampaknya akan lebih kecil dari proyeksi pemerintah. Pemerintah telah memberi tanda bahwa ia merencanakan penerbitan samurai lainnya pada bulan Juli atau Agustus, dan penawaran instrumen Islam dalam dolar Amerika pada triwulan 3.

b. Pertumbuhan pasokan uang yang lesu dan terkedalinya inflasi membuat BI mempertahankan suku bunga rujukan tetap pada 6,5 persen

Dari Januari-April, BI meredam dampak aliran masuk modal terhadap uang dasar melalui peningkatan penerbitan SBI dan apresiasi mata uang …

Walaupun terdapat aliran masuk modal lebih dari 9 miliar dolar Amerika pada bulan Januari-April, yang memungkinkan bank sentral untuk meningkatkan cadangan devisa sebesar 9 miliar, pertumbuhan uang dasar hanyalah sebesar 0,32 persen pada empat bulan pertama tahun berjalan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan BI untuk menetralkan peningkatan cadangan melalui peningkatan penerbitan SBI (sterilisasi) dan apresiasi rupiah. Antara bulan Januari dan April, jumlah nilai SBI yang beredar meningkat lebih dari 5,5 miliar dolar Amerika dan rupiah terapresiasi sebesar 3,5 persen terhadap dolar Amerika. (Grafik 19).

…dan BI melakukan yang sebaliknya untuk meredam dampak aliran keluar modal di bulan Mei

Di bulan Mei, ketika arus kas masuk berbalik arah dan modal senilai 5,7 miliar dolar Amerika mengalir keluar Indonesia, jumlah cadangan turun sebesar 4 miliar dolar Amerika (karena BI membeli rupiah untuk menurunkan gejolak kurs tukarnya). Kali ini, pengaruh terhadap uang dasar diimbangi dengan penurunan dalam SBI yang beredar sebesar 4,8 miliar dolar Amerika dengan kadaluwarsanya beberapa surat dan BI memperkecil penerbitan baru—sehingga M0 sebetulnya sedikit bertambah pada bulan Mei. Grafik 19 menunjukkan korelasi erat antara tingkat peredaran SBI dan cadangan.

Lesunya pertumbuhan M1 dan M2 tidak umum dijumpai pada triwulan 1 tahun ini …

Selain pada uang primer pertumbuhan M1 dan M2 juga sangat lemah sejak awal tahun. M2 bertumbuh sebesar 0,39 persen dari Januari hingga Maret, setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,6 persen saja. M1 turun sebesar 0,3 persen pada triwulan pertama, atau -1,3 persen dalam perhitungan tahunan. Walaupun perlambatan M1 dapat disebabkan oleh faktor-faktor musiman seperti pembayaran pajak penghasilan, baik M1 maupun M2 kini tampaknya cukup jauh berada di bawah rata-rata pertumbuhan tahunan mereka di tahun 2006-08 masing-masing sebesar 24 persen dan 18 persen. Pertumbuhan pasokan uang tahun-ke-tahun telah mendekati 10 persen sejak akhir tahun 2009, dengan kecenderungan turun (Grafik 20).

… dan bersama-sama dengan rendahnya inflasi dan tingginya suku bunga kredit, membuat BI mempertahankan tidka naiknya suku bunga rujukan

Sejalan dengan lesunya pertumbuhan penawaran uang, peningkatan harga konsumen dan inflasi inti yang relatif terbatas, dan berlanjutnya suku bunga yang tinggi, BI mempertahankan suku bunga rujukannya pada 6,5 persen. Sebenarnya telah terjadi pelonggaran moneter tipis, karena banjirnya likuiditas pasar uang dan tingginya permintaan akan SBI telah menyebabkan turunnya suku bunga kredit *overnight* antarbank dan tingkat SBI 1 bulanan di bawah 6,5 persen sejak bulan September tahun lalu. Dengan tidak adanya kejutan besar lainnya, sebagian besar pemain pasar tidak memperkirakan peningkatan suku bunga sebelum paruh kedua tahun 2010, sementara beberapa meramalkan peningkatan pertama hanya akan dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2011.

Grafik 19: BI telah meredam dampak fluktuasi cadangan terhadap uang primer melalui operasi pasar terbuka dengan menggunakan SBI
(uang dasar dan SBI beredar dalam triliun rupiah; cadangan dalam miliar dolar Amerika)

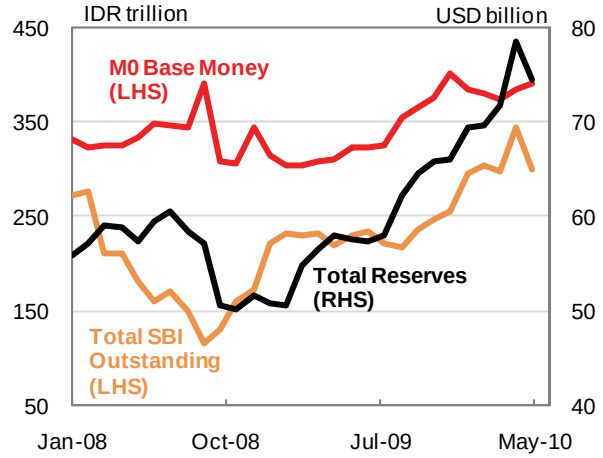

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Grafik 20: Laju pertumbuhan M1 dan M2 tetaplah lemah dibanding tingkat catatan historis
(Pertumbuhan M1 dan M2 dalam persentase perubahan tahun-ke-tahun)

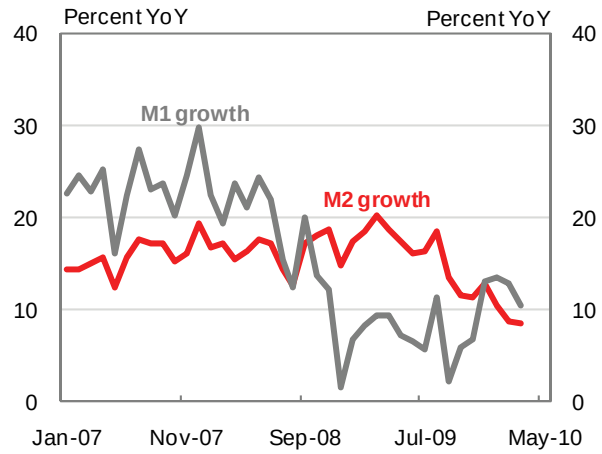

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

c. Pertumbuhan kredit berlanjut naik, didorong oleh kredit konsumen, tetapi suku bunga kredit dan marjin bunga bersih masih tetap tinggi

Pertumbuhan kredit tahun-ke-tahun mulai bangkit di triwulan 1, umumnya di dorong oleh kredit konsumen …

Pertumbuhan kredit tiga bulanan tetap positif untuk empat triwulan berturut-turut pada triwulan, walaupun sedikit turun dibandingkan triwulan 4/2009 (Grafik 21). Kredit tumbuh sebesar 3,5 persen pada tiga bulan pertama tahun 2010, atau sebesar 11,5 persen tahun berjalan hingga Maret. Sebagian besar pertumbuhan kredit triwulan 1 didorong oleh kredit konsumen, tetapi kredit modal kerja (yang merupakan 48 persen dari keseluruhan kredit) tampaknya telah benar-benar pulih dan bertumbuh sebesar 8 persen bulan-ke-bulan pada bulan Maret — peningkatan bulanan terbesar selama beberapa tahun terakhir (Grafik 22).

…tetapi suku bunga kredit riil dan NIM tetaplah tinggi

Melihat ke depan, tingginya suku bunga kredit dan marjin bunga bersih (NIM) tetap menjadi keprihatinan. Rata-rata NIM lintas sektor perbankan melonjak hingga 6,2 persen di bulan Januari, karena kredit konsumen (yang dibebankan suku bunga kredit yang lebih tinggi) melonjak sebesar 10 persen bulan-ke-bulan sementara jumlah tabungan turun di bulan Januari. Sementara kredit konsumen di Indonesia cenderung relatif tidak elastis terhadap suku bunga, permintaan modal kerja dan kredit investasi dapat tertekan dengan suku bunga kredit yang tetap bertahan tinggi. Demi mendorong bank-bank agar memberikan lebih banyak kredit, di bulan April BI mengumumkan suatu rencana untuk memberi sanksi kepada bank-bank yang memiliki rasio pinjaman terhadap tabungan (LDR) di bawah 75-80 persen dengan meningkatkan jumlah cadangan yang disyaratkan. (Analisa yang lebih rinci mengenai suku bunga kredit dan NIM dapat ditemukan pada Bagian B-1.)

Rasio kecukupan modal ditingkatkan pada triwulan 1 karena bank-

Rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) juga meningkat hampir 2 poin persentase pada triwulan 1, dari 17,4 persen di bulan Desember menjadi 19,3 persen di bulan Maret. Hal ini pada umumnya adalah untuk persiapan penerapan Basel II tahun ini, yang mengatur

bank menambah modal untuk persiapan Basel II

persyaratan pengaturan risiko operasi yang lebih besar (mendorong bank-bank untuk meningkatkan modal inti [tier 1] dan modal pelengkap [tier 2]).

Grafik 21: Pertumbuhan kredit Tr-k-Tr masih positif di triwulan 1, dengan persetujuan kredit baru meningkat lebih dari 100 persen sejak bulan Desember…
(persetujuan kredit baru dalam triliun rupiah, pertumbuhan kredit dalam persentase perubahan triwulan-ke-triwulan)

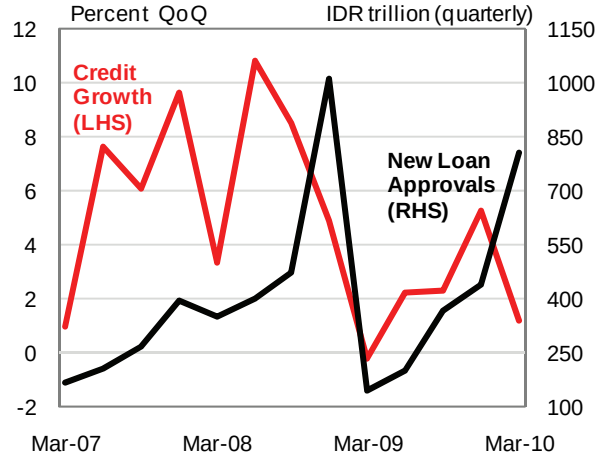

Sumber: BI dan Bank Dunia

Grafik 22: …dan kredit konsumen memimpin, walaupun suku bunga kredit tetap tinggi
(pertumbuhan kredit investasi,konsumen dan modal kerja dalam persentase perubahan tahun-ke-tahun, tingkat kredit dalam persen)

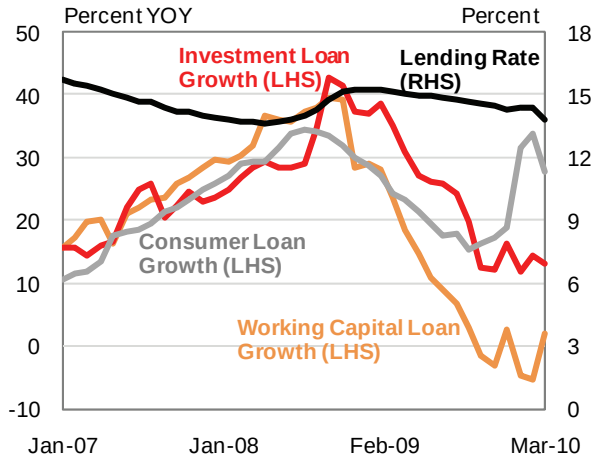

Sumber: BI dan Bank Dunia

3. Surplus neraca pembayaran meningkat pada triwulan 1, tetapi diperkirakan akan menyempit pada dua tahun berikut

Surplus neraca pembayaran meningkat di triwulan 1, dengan peningkatan pada surplus akun keuangan lebih dari cukup untuk mengimbangi penyempitan surplus perdagangan

Surplus neraca pembayaran (BoP) meningkat menjadi 6,6 miliar dolar Amerika pada triwulan 1 karena investor asing bergerak masuk ke obligasi dan surat jangka pendek, dan aliran penanaman modal asing meningkat. Faktor-faktor ini lebih dari cukup untuk mengimbangi penyempitan surplus perdagangan, dan aliran keluar modal lanjutan para penduduk Indonesia yang terus meningkatkan tabungan mereka di luar negeri. (Lampiran) Surplus keseluruhan BoP menyebabkan cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi 71,8 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Maret. Cadangan makin meningkat di bulan April, dengan catatan aliran masuk modal portofolio investasi mendorong cadangan ke tingkat tertinggi yang pernah tercatat sebesar 78,6 miliar dolar Amerika. Di bulan Mei cadangan turun menjadi 74,6 miliar dolar Amerika karena ketidakstabilan pasar keuangan.

Neraca pembayaran diperkirakan akan menyempit di tahun 2010 dan 2011, karena surplus perdagangan menyempit sementara surplus akun keuangan bertahan

Surplus BoP diperkirakan akan mengecil melewati tahun 2010 dan 2011, karena neraca berjalan mendekati keseimbangan. Aliran masuk modal bersih ke Indonesia diperkirakan akan berlanjut selama jangka menengah, walaupun ketidakpastian akan ukuran aliran meningkat dengan ketidakstabilan yang baru terjadi pada pasar-pasar keuangan di bulan Mei. Surplus neraca pembayaran berjalan akan mendukung berlanjutnya pengumpulan cadangan. Fluktuasi normal dalam penerbitan hutang masyarakat dan penarikan dan pembayaran kembali pinjaman akan terus menciptakan gejolak pada BoP triwulanan.

Ramalan arus masuk penanaman modal asing telah meningkat

Ramalan tetap menyatakan peningkatan investasi langsung bersih selama tahun 2010 dan 2011, karena pemulihan ekonomi dunia dan peningkatan kondisi pendanaan jangka panjang menyebabkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan investasi, bersama-sama dengan pembaruan penekanan pemerintah dalam peningkatan iklim investasi secara umum dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta secara khusus dalam suatu program investasi prasarana yang diperluas. Proyeksi surplus tahun 2010 terhadap investasi portofolio telah ditingkatkan karena sangat besarnya aliran masuk modal pada triwulan 1 hanya terganggu sebagian oleh aliran keluar pada triwulan 2, sementara aliran masuk modal akan lebih lesu pada semester kedua tahun 2010. Peningkatan kredit perdagangan, bersama-sama dengan penumpukkan tabungan penduduk Indonesia

(perorangan dan perusahaan) pada rekening bank-bank di luar negeri, menyebabkan peningkatan proyeksi aliran keluar modal 'investasi lainnya.' Surplus BoP bersama-sama dengan tingginya tingkat perpanjangan pembayaran hutang untuk hutang jangka pendek swasta menunjukkan bahwa masih terdapat aliran masuk modal asing yang cukup membiayai kebutuhan pendanaan eksternal Indonesia. Risiko perlemahan juga telah meningkat sejak bulan Maret (Bagian A-6).

4. Pelemahan Inflasi berlanjut tapi peningkatan sudah tampak di depan mata

a. Inflasi inti bergerak tipis, sementara harga bahan pangan lebih begejolak dari biasanya

Harga-harga mulai naik secara perlahan pada bulan-bulan awal tahun 2010 dari nilai rendahnya di akhir tahun 2009

Pemulihan tipis berlanjut untuk harga-harga yang merupakan pengukur utama. Pertumbuhan tahun-ke-tahun bagi harga-harga konsumen dan hulu telah meningkat ke tingkat tertingginya dalam setahun pada bulan Mei. Inflasi *headline* sebesar 4,2 persen, disebabkan oleh gejolak harga bahan pangan. Deflator PDB meningkat pada triwulan pertama 2010 dari kejatuhannya pada triwulan ketiga 2009. (Grafik 23) Walaupun terdapat peningkatan-peningkatan tersebut, tingkat inflasi masih tetap jauh di bawah tingkat pra-krisis dan lebih rendah dari perkiraan. Dengan hasil yang lebih lemah ini, pembuat ramalan telah secara progresif melakukan revisi pemangkasan dari proyeksi inflasi tahun 2010 mereka.

Inflasi inti masih lemah dengan ekonomi tetap berada di bawah kapasitas dan kurs tukar membatasi impor inflasi

Inflasi inti, di luar harga barang yang di atur pemerintah (administered prices), tetaplah rendah memasuki pertengahan tahun 2010, hanya naik secara terbatas pada bulan Mei menjadi 3,8 persen, sebagian besar karena harga emas yang lebih tinggi meningkatkan biaya perhiasan (menyebabkan sekitar sepertiga peningkatan di bulan Mei – yang tertinggi dari 35 sub-komponen). Harga jasa layanan dalam ekonomi, pengukur yang baik untuk inflasi pokok, yang termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan keuangan telah datar pada tahun 2010, mempertahankan inflasi inti pada nilai-nilai terendah yang pernah tercatat. Sebagian kelesuan inflasi inti ini dapat dijelaskan oleh penggunaan kapasitas yang belum kembali ke tingkat pra-krisis. Konsumen dan produsen telah terlindung dari peningkatan harga impor melalui apresiasi rupiah sebesar 10 persen terhadap dolar Amerika selama berturut-turut dari bulan Agustus 2009 hingga April 2010. Hal ini diperkirakan telah menurunkan setidaknya 1 poin persentase dari tingkat inflasi tahun-ke-tahun bulan Mei.

Harga bahan pangan merupakan satu-satunya komponen IHK yang dapat bertumbuh melampaui catatan rata-rata pada bulan-bulan pertama tahun 2010

Pergerakan harga bahan pangan mendorong inflasi headline di atas tingkat inti. Sesungguhnya, dari semua komponen IHK (Indeks Harga Konsumen, IHK), hanya harga-harga bahan pangan yang meningkat lebih cepat dari catatan rata-ratanya pada 5 bulan pertama tahun 2010 (6,6 persen tahun-ke-tahun di bulan Mei, lebih dari dua kali lipat dibanding sisa IHK yang lain). Harga bahan pangan yang lebih tinggi timbul dari harga beras yang lebih tinggi dari biasa pada awal tahun 2010 karena masalah dengan distribusi dan terlambatnya panen. Ketika panen menurunkan harga-harga biji-bijian di bulan Maret hingga Mei, kondisi penanaman yang buruk menyebabkan lonjakan harga berbagai bumbu – misalnya, harga cabai merah naik sebesar 40 persen antara bulan April dan Mei, menyebabkan sekitar seperempat dari keseluruhan inflasi pada periode tersebut.

Grafik 23: Harga-harga berbalik arah tetapi tetap berada di bawah rata-rata
(persen pertumbuhan tahun-ke-tahun)

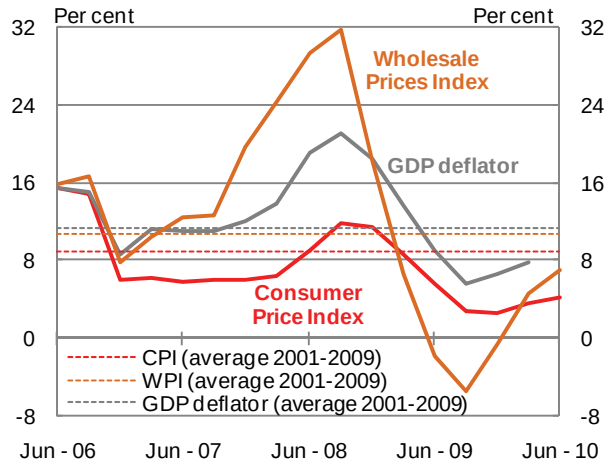

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Grafik 24: Sejak jatuh pada pertengahan 2009, harga konsumen Indonesia telah bertumbuh di bawah sebagian besar mitra dagangnya, hanya sebagian yang disebabkan oleh pengaturan harga energi
(rata-rata inflasi bulanan sejak September 2009)

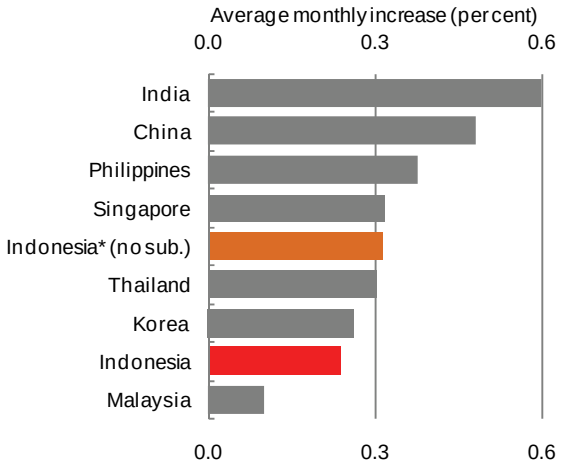

* Dalam skenario inflasi Indonesia ini harga-harga bahan bakar yang diatur bergerak bersama harga ekonomis bahan bakar dari Februari 2009. Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Harga bahan pangan yang lebih tinggi mengimbangi lesunya harga konsumen lainnya bagi rumah tangga miskin

Peningkatan harga-harga bahan pangan dasar ini mempengaruhi keluarga miskin pada khususnya. Porsi pangan dalam keranjang konsumsi keluarga miskin rata-rata mencapai 63 persen, dan kuatnya pertumbuhan harga-harga bahan pangan ini bertanggung jawab sebanyak 95 persen dari peningkatan biaya hidup pada lima bulan pertama tahun 2010, mengangkat tingkat inflasi keranjang kemiskinan menjadi 5,9 persen, lebih besar dari tingkat headline. (Lampiran)

Kenaikan harga konsumen Indonesia tidak sebesar kenaikan negara-negara tetangganya sejak inflasi jatuh di bulan September 2009, tetapi hanya sebagian karena adanya harga bahan bakar yang tetap

Tingkat inflasi jatuh di bulan September 2009. Sejak itu harga-harga konsumen Indonesia telah meningkat lebih rendah di banding sebagian besar mitra-mitra dagang regionalnya. (Grafik 24) Inflasi negara tetangganya yang relatif lebih besar secara sebagian mencerminkan lambungan kegiatan ekonomi mereka yang lebih kuat, kurs tukar mereka yang lebih stabil, dan lebih besarnya jalur pemulihan mereka dalam harga-harga energi dunia pada ekonomi mereka. Harga energi Indonesia yang diatur menyebabkan konsumen hanya mengalami sebagian dari jatuhnya harga energi pada semester kedua tahun 2008, tetapi mereka juga tidak mengalami peningkatan 30 persen dari biaya ekonomis bahan bakar dari awal tahun 2009 yang lebih dari sepertiga bagian lebih tinggi dari harga yang diatur. (Grafik 25)

Bila harga bensin dan solar telah mengalami deregulasi ketika harga yang diatur menyamai biaya ekonomis di bulan Februari 2009, disinflasi Indonesia akan lebih kecil selama tahun 2009. Pada bulan Mei 2010 inflasi sesuai skenario ini dan inflasi sebenarnya akan menyatu: sekali kurs tukar dan harga bahan bakar internasional kembali stabil (tambahan ruang fiskal akan bersifat tetap). (Grafik 26) (Kotak 1 menjelaskan bagaimana pergerakan dalam harga bahan bakar yang diatur mempengaruhi IHK.) Tingkat inflasi bulanan sesuai skenario ini akan secara rata-rata kurang dari 0,1 poin persentase lebih tinggi sejak antara bulan September 2009 dan Mei 2010, atau 0,6 poin persentase selama 8 bulan penuh. Selama periode ini harga-harga konsumen Indonesia masih akan tetap meningkat kurang dari peningkatan yang dialami sebagian besar mitra dagang regionalnya, menunjukkan bahwa lemahnya inflasi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pengaturan harga bahan bakar tetapi sebaliknya mencerminkan tekanan harga terbatas pada keseluruhan ekonomi. (Grafik 24) Akan tetapi, sesuai kedua skenario, tingkat headline Indonesia masih tetap lebih tinggi dibanding sebagian besar mitra dagangnya (Lampiran).

Grafik 25: Celah antara biaya ekonomis bahan bakar di Indonesia dan harga yang diatur telah stabil
(rupiah per liter)

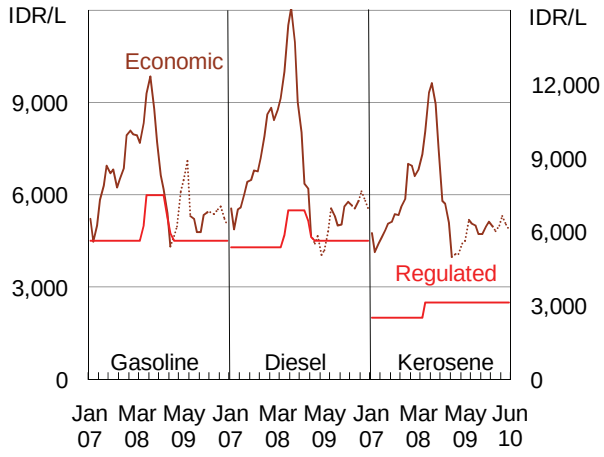

Garis putus-putus menunjukkan harga pasar Departemen Energi diperhitungkan dari pergerakan harga penyulingan di Singapura dan kurs tukar rupiah. Sumber: CEIC, Departemen Energi dan Bank Dunia.

Grafik 26: Jika harga bahan bakar telah mengalami deregulasi, dampak terhadap inflasi akan berangsur-angsur hilang dalam jangka pendek dan akan terdapat penghematan anggaran yang permanen
(inflasi headline)

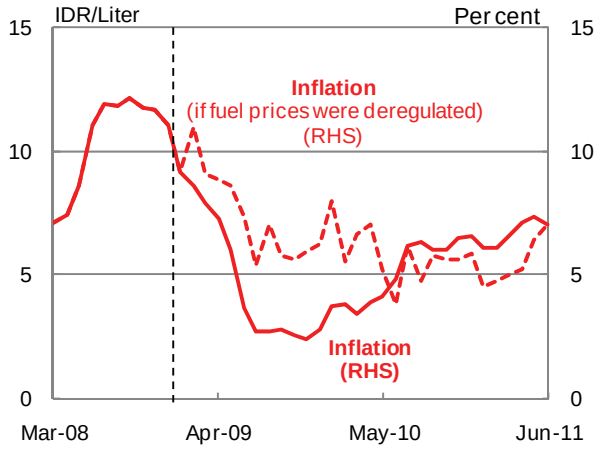

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Pertumbuhan harga keseluruhan ekonomi juga berada di bawah tren

Lemahnya pertumbuhan harga juga berlangsung lintas deflator harga implisit (IPD) neraca nasional pada triwulan 1. Harga-harga investasi terus melambat tajam dan masih belum pulih, meningkat sebesar 1,1 persen triwulan-ke-triwulan, pada kisaran nilai terendahnya dalam 8 tahun, dengan jatuhnya harga gedung bersamaan dengan penurunan harga semen yang pertama kali dalam 3 tahun. Kelemahan ini tetap mengganjal antara pertumbuhan dalam IHK dan deflator PDB yang rendah pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010. Akan tetapi dengan ramalan harga logam dan mineral akan meningkat sebanyak 30 persen di tahun 2010 dari tingkat harga mereka di tahun 2009, biaya investasi tampaknya akan mengalami percepatan kembali menjelang akhir tahun 2010.

Syarat perdagangan Indonesia (seperti ditunjukkan oleh akun-akun nasional) sedikit lebih rendah pada triwulan 1 dan tahun-ke-tahun, didorong oleh harga-harga impor yang lebih kuat (barang-barang dan jasa). Walaupun terjadi penurunan, harga ekspor mencatat dua triwulan dengan pertumbuhan yang kuat yang didukung oleh peningkatan berukuran sangat besar dari harga-harga produk pertambangan dunia. Harga kulakan ekspor juga adalah yang terbesar lintas seluruh golongan di bulan April dan Mei dan kekuatan ini tampaknya akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun. Akhirnya, IPD konsumsi perorangan membayangi rendahnya pertumbuhan IHK, tumbuh sebesar 1,5 persen antara triwulan 4/2009 dan triwulan 1/2010. Keseluruhan kelesuan lintas IPD memastikan kelesuan serupa pada deflator PDB relatif terhadap dekade yang lalu, meningkat sebesar 1,9 persen triwulan-ke-triwulan, yang menyebabkan peningkatan ringan pada tingkat tahun-ke-tahun menjadi 7,8 persen.

b. Lemahnya inflasi inti menunjukkan bahwa tahun 2010 akan lebih lesu dibanding ramalan yang lalu, sementara kuatnya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas diperkirakan akan mendorong lebih tingginya inflasi di tahun 2011

Inflasi diperkirakan akan meningkat pada semester kedua tahun 2010, dengan berlanjutnya pemulihan pertumbuhan permintaan dan kredit, pengaturan harga dipindahkan mendekati biaya ekonomis, dan menyusutnya depresiasi kurs tukar yang lebih kuat ke dalam harga konsumen

Ramalan bagi semester kedua tahun 2010 tetaplah bahwa pertumbuhan harga konsumen akan mengalami percepatan, dengan inflasi dua kali lipat dari tingkat triwulan 1 dan triwulan 2 yang ringan. Beberapa pembatasan kapasitas dalam negeri tampaknya akan timbul kembali, dengan lebih kuatnya permintaan, terutama dengan adanya kondisi pemberian pinjaman yang menguntungkan termasuk kuatnya pertumbuhan dalam kredit konsumen. Sementara persetujuan parlemen terhadap kenaikan tarif listrik rata-rata sebesar 10 persen yang berlaku mulai bulan Juli merupakan langkah awal dalam menghubungkan harga energi yang diatur dengan biaya ekonomis energi tersebut. Sementara peningkatan tarif terbesar terjadi pada pelanggan komersial dan perumahan kelas atas, dan tarif bagi kebanyakan konsumen perumahan tidak berubah, ini berarti kenaikan tarif tersebut akan membawa dampak langsung yang kecil terhadap IHK, biaya masukan yang lebih tinggi akan memberi sedikit pengaruh terhadap inflasi inti.

Akan tetapi, kelesuan yang tidak diperkirakan pada semester pertama tahun 2010, dan mudah berubahnya harga bahan pangan, menyebabkan penurunan proyeksi inflasi tahunan 2010 menjadi 5,1 persen (turun 0,2 poin persentase), dengan revisi turun terhadap proyeksi pertumbuhan deflator PDB juga. Percepatan harga pada semester kedua tahun 2010 diperkirakan akan meningkatkan inflasi tahun-ke-tahun ke tingkat 6,4 persen pada akhir tahun, di atas target inflasi BI pada 5,0 persen (± 1 persen).

Grafik 27: Harga bahan pangan dunia menunjukkan harga bahan pangan Indonesia akan melambat pada lima bulan ke depan

(harga pangan dunia, dalam termin rupiah, dimajukan 5 bulan, persentase perubahan tahun-ke-tahun)

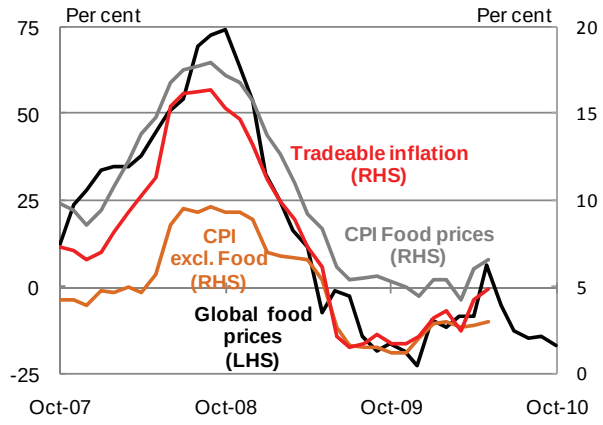

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Ramalan harga-harga bahan pangan dunia akan datar di tahun 2010 dan 4 persen lebih rendah di tahun 2011. Harga bahan pangan dalam negeri terhubung secara luas dengan pasar-pasar dunia, dengan pergerakan harga-harga dunia membutuhkan waktu hingga 12 bulan untuk berrdampak terhadap harga eceran. Harga bahan pangan dunia cenderung menuntun harga dalam negeri sekitar lima bulan ke depan dan, jika hubungannya berlanjut, perkembangan terbaru harga bahan pangan dunia menunjukkan bahwa harga bahan pangan dalam negeri akan mundur pada bulan-bulan yang akan datang. (Grafik 27) Hal ini juga akan didukung oleh harga kulakan pertanian yang menunjukkan kelemahan terbesar dari semua komponen harga kulakan pada tiga bulan terakhir. Hal ini konsisten dengan perkiraan inflasi pemulihan harga di bulan Juli, terutama dapat disebabkan oleh perkiraan yang terlalu besar atas dampak banyaknya publikasi mengenai peningkatan tarif listrik pada harga perumahan.

Revisi peningkatan ramalan untuk PDB, MTP dan harga-harga komoditas mendorong perkiraan inflasi tahun 2011 menjadi 6,5 persen

Pemulihan bertahap kegiatan ekonomi menyerap kapasitas yang tidak dimanfaatkan, dan percepatan dalam kredit, akan memicu inflasi tarikan-permintaan sejak awal tahun 2011. Serupa dengan itu, permintaan dunia yang lebih tinggi dari perkiraan atas bahan masukkan, seperti bahan baku, logam dan minyak, yang telah menyebabkan peningkatan revisi peramalan bagi indeks-indeks harga komoditas dunia, akan mewujudkan biaya pasokan yang lebih tinggi bagi usaha-usaha dan mengalir melalui barang-barang konsumsi sejak awal tahun 2011. Kekuatan ini telah memperkuat ramalan harga untuk tahun 2011 dengan revisi naik dalam ramalan inflasi tahunan tahun 2011 sebesar 0,3 poin persentase menjadi 6,3 persen. Pertumbuhan deflator PDB, pada 12,2 persen, diperkirakan akan maju jauh di depan IHK di tahun 2011 dengan harga-harga investasi sebagai pengganjal di antara kedua jajaran tersebut.

5. Pertumbuhan pekerjaan menyamai laju angkatan kerja pada semester pertama tahun 2009, tetapi semua pekerjaan baru bersifat tidak resmi/informal

Data pasar tenaga kerja terbaru, sampai bulan Agustus 2009, menunjukkan lapangan pekerjaan informal meningkat lebih cepat dari angkatan kerja, tetapi lebih sedikit pekerjaan formal berkualitas lebih baik

Survei pasar tenaga kerja terbaru, untuk bulan Agustus 2009, melaporkan lapangan pekerjaan terus bertambah cepat dibanding angkatan kerja sejalan dengan pulihnya ekonomi Indonesia dari perlambatan pada pergantian tahun 2009. Seluruh pertumbuhan pekerjaan merupakan tidak resmi/informal. Jumlah pekerja sektor formal (didefinisikan secara sempit) jatuh sebesar 3,2 persen, atau lebih dari 1 juta, dalam tahun berjalan hingga bulan Agustus 2009.[1] Pada khususnya, jumlah 'pekerja' jatuh sebesar 3,5 persen, dan jumlah pemberi pekerjaan dengan staf tetap turun tipis. Di lain pihak, jumlah pekerja lepas di pertanian, umumnya pelarian pekerja yang kehilangan pekerjaannya di sektor formal atau perkotaan, juga turun, sebesar 3,6 persen. Keseluruhan tambahan 2,3 juta pekerja adalah di antara pemberi pekerjaan dengan pekerja tidak tetap (meningkat sebesar 660.000 menjadi 24,7 juta), pekerja sukarela, dan pekerja lepas bukan di pertanian (semua dianggap sebagai informal).

Tingkat pengangguran terbuka turun ke 7,9 persen, dari 8,4 persen satu tahun sebelumnya dan 8,1 persen dari survei yang lalu pada bulan Februari 2009. Pengangguran turun baik bagi lelaki maupun perempuan, dan untuk mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, tetapi meningkat bagi lulusan sekolah menengah dan universitas. (Lampiran)

Penciptaan pekerjaan bukanlah sektor dengan pertumbuhan tercepat. Pekerjaan bertumbuh paling banyak di jasa sosial (hampir mencapai 1 juta, atau 7,1 persen) pada tahun berjalan hingga bulan Agustus 2009. Walaupun demikian transportasi & komunikasi melaporkan pengurangan pekerjaan, di tengah kuatnya pertumbuhan kegiatan di sektor tersebut. Di lain pihak, walau keluaran manufaktur tidak berkembang dan nilai tambah perdagangan kulakan & eceran meningkat dengan lemah, pekerjaan di sektor-sektor tersebut meningkat masing-masing sebesar 2,3 persen dan 3,4 persen, bersama-sama menciptakan lebih dari 1 juta pekerjaan baru.

6. Penerimaan yang lebih tinggi dan belanja yang lebih rendah diperkirakan akan memperkecil defisit anggaran

a. Defisit anggaran untuk tahun 2010 diperkirakan akan lebih rendah dari yang diantisipasi sebelumnya, dan defisit di tahun 2011 diperkirakan akan cukup rendah sebesar 0,4 persen dari PDB

Pemerintah memproyeksikan defisit masing-masing sebesar 2,1 dan 1,7 persen PDB untuk tahun 2010 dan 2011

Proyeksi defisit anggaran milik pemerintah sendiri lebih besar untuk kedua tahun, sebesar 2,1 persen dari PDB di tahun 2010 dan 1,7 persen PDB di tahun 2011. Proyeksi pemerintah untuk tahun 2010 belum direvisi sejak bulan Maret dan tidak memperhitungkan realisasi penerimaan dan belanja ke dalam triwulan kedua tahun 2010. Berdasarkan proyeksinya akan pertumbuhan CPI, pemerintah meramalkan ekonomi nominal akan bertumbuh sekitar 11 persen pada tahun 2010 dan 2011. Penerimaan pemerintah diproyeksikan tumbuh sebesar 14 persen di tahun 2010 dan 10 persen di tahun 2011, dibandingkan dengan pertumbuhan belanja sebesar 18 persen di tahun 2010 dan 7 persen di tahun 2011.

Proyeksi alternatif pertumbuhan ekonomi dan ramalan pencairan yang lebih rendah menunjukkan defisit anggaran akan lebih kecil secara signifikan,

Dengan asumsi pertumbuhan PDB nominal yang lebih cepat dan lebih tingginya harga minyak yang mendorong penerimaan, dan lemahnya pencairan triwulan 1 berlanjut sepanjang tahun, defisit anggaran di tahun 2010 diperkirakan sebesar 1,0 persen dari PDB, dan akan lebih kecil lagi di tahun 2011 menjadi sekitar 0,4 persen PDB, sebagian besar karena ramalan pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih cepat mendukung penerimaan pajak (proyeksi tahun 2011 ini mengasumsikan belanja inti pemerintah tetap

[1] Sektor formal didefinisikan sebagai responden yang melaporkan bekerja sebagai pemberi kerja dengan pekerja tetap, atau sebagai pekerja. Sektor informal mencakup pekerja sendiri, pemberi kerja dengan pekerja sementara, dan pekerja lepas dan sukarela. Semua pembedaan tersebut merupakan perkiraan, dan kondisi sangat bervariasi diantara pekerja sektor 'formal' dan 'informal' (lihat Bagian C, Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi September 2009).

mendekati 1,0 persen dari PDB di tahun 2010 dan serendah 0,4 persen di tahun 2011

konstan sebagai bagian dari PDB nominal, setelah menggunakan asumsi harga minyak yang lebih rendah dibanding milik pemerintah).

Grafik 28: Menggunakan deflator PDB sebagai dasar proyeksi pertumbuhan PDB nominal dan bukan menggunakan CPI yang tumbuh lebih lambat, menunjukkan penerimaan dapat lebih kuat secara berarti, dan defisit anggaran lebih kecil, di tahun 2010 dan 2011

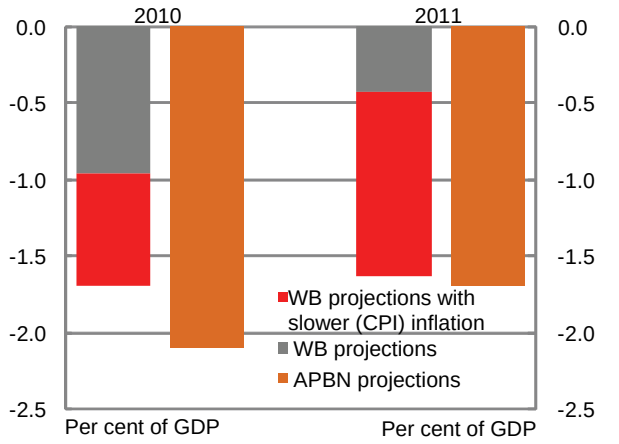

Sumber: Departemen Keuangan, Bank Dunia

Sebagian besar perbedaan dalam proyeksi antara Bank Dunia dan pemerintah mencerminkan bagaimana proyeksi basis pajak dari nilai kegiatan ekonomi. Metodologi yang sekarang dianut oleh pemerintah mengasumsikan bahwa ekonomi nominal akan berkembang dengan proyeksi pertumbuhan pada CPI (IHK) ditambah pertumbuhan dalam kegiatan riil. Pertumbuhan penerimaan yang diproyeksikan lebih cepat yang diramalkan disini mencerminkan penggunaan deflator PDB nominal, yang beberapa tahun terakhir telah meningkat lebih cepat dari CPI (lihat Bagian B-2). Juga penting adalah proyeksi harga minyak pemerintah yang lebih tinggi. Kecenderungan luas penghematan belanja juga diperkirakan akan berlanjut. Belanja inti pemerintah di tahun 2011 diasumsikan akan tetap konstan sebagai bagian dari PDB nominal, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan asumsi harga minyak yang lebih rendah.

b. Penerimaan pemerintah diperkirakan akan sedikit lebih kuat dari yang diproyeksikan sebelumnya

Meningkatnya harga komoditas tampaknya akan mendukung pertumbuhan penerimaan pemerintah yang sedikit lebih kuat di tahun 2010

Proyeksi penerimaan pemerintah pada Perkembangan Triwulanan ini hanya sedikit berubah secara agregat dari yang dilaporkan pada edisi Maret 2010. Sejak bulan Maret 2010, realisasi penerimaan pajak sedikit lebih lesu dari yang diperkirakan sebelumnya, yang diimbangi dengan beberapa penguatan dalam penerimaan bukan pajak. Secara agregat, proyeksi pertumbuhan penerimaan pemerintah di tahun 2010 telah direvisi naik hanya sebesar 15 triliun rupiah, atau 16,1 persen menjadi 17,6 persen, didorong oleh peningkatan ramalan untuk penerimaan bukan pajak. Di tahun 2011 penerimaan di proyeksikan untuk bertumbuh sebesar 17 persen, konsisten dengan pertumbuhan pada pendapatan domestik nominal, sementara pertumbuhan di penerimaan bukan pajak diperkirakan akan lebih rendah yang disebabkan oleh penerimaan yang lebih rendah dari sektor sumber daya alam.

Penerimaan pajak diperkirakan akan bertumbuh sebesar 17,7 persen di tahun 2010, sedikit lebih kecil dari yang diproyeksikan di bulan Maret, sejalan dengan revisi sedikit lebih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nominal. Hal ini telah melambatkan proyeksi pertumbuhan dalam seluruh golongan pajak, kecuali pajak perdagangan internasional yang pulih lebih cepat dari perkiraan yang dibuat sebelumnya, karena proyeksi bea ekspor yang lebih tinggi dengan penguatan harga minyak kelapa sawit internasional dan pajak baru atas ekspor biji kakao mentah, yang diperkirakan akan memberi sumbangan terbatas kepada penerimaan (lihat Kotak 2: Pajak baru atas ekspor kakao).

Proyeksi penerimaan bukan pajak tahun 2010 sedikit lebih kuat karena penguatan yang tidak diperkirakan dalam golongan penerimaan 'lain'

Perkiraan penerimaan bukan pajak di tahun 2010 meningkat sejalan triwulan 2, dengan pertumbuhan tahunan diperkirakan sebesar 17,3 persen. Penerimaan bukan pajak bergerak dengan perubahan dalam harga-harga komoditas, terutama harga minyak, dan lebih tidak peka terhadap pertumbuhan ekonomi. Golongan bukan pajak 'lainnya' bertanggung jawab atas bagian terbesar dari kuatnya proyeksi penerimaan agregat. Golongan penerimaan ini mencakup banyak item-item lainnya seperti ongkos visa, ongkos surat ijin mengemudi dan penerimaan restitusi pajak yang tidak minta kembali. Pada empat bulan pertama tahun 2010 penerimaan-penerimaan ini menunjukkan kekuatan yang cukup besar yang tidak diperkirakan, dengan tambahan proyeksi penerimaan sebesar 15,9 triliun rupiah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membayar

dividen lebih awal dari biasanya, dan setelah setahun penuh diperkirakan akan memberikan tambahan 2,2 triliun rupiah dari yang sebelumnya diproyeksikan karena dividen ini menunjukkan bahwa keuntungan operasi tahun 2009 lebih kuat dari yang diproyeksikan sebelumnya, menunjukkan pengumpulan selama sisa tahun 2010 tampaknya juga akan lebih kuat.

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2011 akan sedikit terhalang oleh proyeksi produksi minyak dan perkiraan harga yang lebih rendah, dan perubahan terhadap pengaturan pungutan pajak bagi pajak-pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan

Penerimaan pajak di tahun 2011 diperkirakan akan bertumbuh sebesar hampir 20 persen, lebih cepat dari ekonomi, dengan penerimaan pajak berfluktuasi lebih besar dari pergerakan dalam PDB nominal dengan profit perusahaan, komoditas dan harga aktiva berfluktuasi lebih besar selama siklus ekonomi. Tingkat pajak penghasilan progresif juga berarti percepatan penerimaan pajak penghasilan, tetapi hal ini hanyalah faktor yang relatif kecil di Indonesia karena pajak penghasilan perorangan hanya memiliki porsi yang sangat kecil pada keseluruhan penerimaan pajak.

Perkiraan harga dan produksi minyak yang lebih rendah, mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan migas, juga tampaknya akan memperlambat pertumbuhan penerimaan pajak, dibandingkan dengan tahun 2010. Selain itu, tanggung jawab untuk memungut pajak bumi dan bangunan dan bea pengiriman, akan secara bertahap dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari tahun 2011 hingga 2014, menurunkan penerimaan pemerintah pusat.

Pemerintah terus memperkirakan peningkatan dalam pengelolaan pajak untuk mendukung pungutan

Reformasi kebijakan pajak diperkirakan untuk berlanjut di tahun 2010 dan 2011, dengan sasaran kembar mendukung kegiatan riil melalui tarif pajak yang lebih rendah, sementara mencapai ketaatan pembayar pajak yang lebih tinggi melalui penyempurnaan pengelolaan. Di tahun 2010 pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 28 persen menjadi 25 persen, dan reformasi-reformasi lain termasuk penghapusan pajak barang mewah bagi beberapa industri manufaktur barang berharga tinggi. Pemerintah memperkirakan bahwa penerimaan yang hilang karena keringanan pajak itu akan diimbangi dengan penyempurnaan pengelolaan. Di tahun 2011, kantor pajak merencanakan untuk menekankan perhatian pada penyempurnaan pengelolaan khususnya bagi bidang penerimaan korporat, terfokus pada sektor-sektor komoditas.

Peraturan perundangan pemerintah yang baru tentang pertambangan diperkirakan akan melambatkan pertumbuhan penerimaan bukan pajak di tahun 2011

Pertumbuhan penerimaan bukan pajak diperkirakan sekitar 9,5 persen di tahun 2011, menurun porsinya dalam keseluruhan penerimaan. Sebagian besar golongan penerimaan diperkirakan akan menurun di tahun 2011. Selain perkiraan pemerintah akan lesunya produksi sumber-sumber daya alam di tahun 2011, pertumbuhan yang lebih rendah sebagian dikarenakan persyaratan pemrosesan dalam negeri yang baru, yang mengharuskan bahwa setelah periode transisi selama lima tahun, semua bijih dan mineral yang ditambang harus dimurnikan di dalam negeri. Hal ini akan membutuhkan pengeluaran modal yang tidak kecil, yang akan memangkas beberapa kewajiban bukan pajak badan, menurunkan pertumbuhan penerimaan pemerintah. Terdapat ketidakpastian yang cukup mengenai sejauh mana dampaknya terhadap perkiraan penerimaan dan akan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengharuskan persyaratan ini di tahun 2014.

Kiriman profit dari pembayaran dividen BUMN diperkirakan akan terus tumbuh mengikuti kegiatan ekonomi. Penerimaan bukan pajak 'lain-lain' juga diperkirakan akan tumbuh di tahun 2011, mengikuti kuatnya proyeksi mereka di tahun 2010.

c. Realisasi belanja modal, subsidi dan belanja 'lain-lain' rendah pada awal tahun 2010, dan tampaknya akan membuat belanja setahun penuh di bawah sasaran

Revisi anggaran tahun 2010 telah disetujui pada awal bulan Mei 2010

Anggaran yang direvisi (APBN-P) tidak mengubah belanja inti pemerintah di tahun 2010 secara berarti. Proyeksi belanja energi yang disubsidi dinaikkan dengan peningkatan asumsi harga minyak sebesar 4 persen, sementara pembayaran bunga hutang turun dengan asumsi kurs tukar valuta yang lebih kuat sebesar 3persen. Golongan 'pengeluaran lain' menunjukkan peningkatan yang berarti sebesar 44 persen, yang umumnya disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengeluaran kontingensi. Proyeksi penerimaan pemerintah yang lebih tinggi meningkatkan kewajiban transfer ke daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui peningkatan 10 persen tarif listrik, mulai berlaku sejak bulan Juli 2010 – tetapi penghematan ini tenggelam oleh naiknya harga minyak

DPR menyetujui peningkatan tarif listrik sebesar 10 persen yang mulai berlaku pada bulan Juli 2010, penyesuaian tarif listrik pertama kali yang berarti sejak tahun 2004. Rata-rata kenaikan tarif lebih rendah dari bilangan 15 persen yang diusulkan pemerintah, tetapi masih diperkirakan akan menghemat sekitar 4 triliun rupiah dari biaya subsidi listrik yang harus dibayarkan oleh pemerintah, atau 7,3 persen dari keseluruhan subsidi listrik sebesar 55,1 triliun rupiah. Akan tetapi penghematan ini kecil artinya dibandingkan dengan dampak penyesuaian dalam proyeksi harga minyak dari 65 dolar Amerika menjadi 80 dolar Amerika antara anggaran sebelumnya dan anggaran 2010 yang telah direvisi, yang meningkatkan proyeksi biaya subsidi dari 38 triliun rupiah menjadi 55 triliun dan merupakan faktor terbesar yang meningkatkan proyeksi defisit pemerintah tahun 2010 dari 1,6 persen menjadi 2,1 persen. Sementara penyesuaian tarif ini merupakan langkah awal yang penting, penyusunan mekanisme yang lebih baik untuk menghubungkan tarif dengan biaya ekonomis pasokan energi sangatlah penting untuk membatasi pengeluaran subsidi dan memastikan penggunaan berkesinambungan dari energi.

Kinerja pencairan bulan-bulan pertama yang rendah menunjukkan pelaksanaan belanja di tahun 2010 tampaknya akan di bawah perkiraan sebelumnya

Sedikit lebih rendahnya tingkat belanja sebenarnya pada triwulan 1/2010 dan perbedaan dalam asumsi harga minyak menunjukkan bahwa jumlah belanja di tahun 2010 tampaknya akan lebih rendah dari yang diperkirakan di bulan Maret. Pemerintah hanya membelanjakan 14 persen dari keseluruhan anggaran yang direvisi dalam triwulan 1/2010, agak di bawah tingkat tahun 2009 sebesar 16 persen, sebagian besar disebabkan oleh lambatnya pencairan anggaran modal, dan lebih rendahnya subsidi dan 'pengeluaran lain'. Pada triwulan 1 hanya 5 persen dari belanja modal yang dialokasikan telah dibelanjakan, dibanding 10 persen di tahun 2009.

Kotak 2: Pajak baru atas ekspor kakao

Pemerintah Indonesia merencanakan untuk menetapkan pajak atas ekspor kakao mentah. Pajak ini bertujuan untuk memastikan pasokan bagi industri pemrosesan dalam negeri. Pajak itu rencananya akan diluncurkan sebagai tanggapan dari laporan yang baru dari Departemen Industri. Laporan itu menemukan bahwa pada beberapa tahun terakhir, industri pemrosesan kakao dalam negeri telah berproduksi pada sekitar 50 persen dari keseluruhan kapasitas, dengan beberapa pabrik tidak menghasilkan apapun, karena kurangnya biji-biji kakao mentah. Indonesia sekarang merupakan eksportir kakao terbesar nomor tiga di dunia, di belakang Pantai Gading dan Ghana, dan dikatakan mengekspor sekitar 80 persen kakaonya sebagai bahan mentah. Tujuan pajak ini adalah untuk membangkitkan kembali produksi dan investasi dalam industri pemrosesan dalam negeri melalui peningkatan pasokan biji kakao mentah, dan juga untuk meningkatkan volume ekspor bernilai tambah dari produk-produk yang berhubungan dengan kakao.

Grafik 29: Tarif bea ekspor kakao berdasarkan perkembangan dalam harga kakao internasional
(Dolar Amerika per ton metriks, persen)

International cocoa price (USD/MT)	Cocoa tariff (per cent)
< 2,000	0
2,000 - 2,750	5
2,750 - 3,500	10
> 3,500	15

Sumber: Departemen Keuangan

Pemerintah Indonesia menetapkan pajak kakao yang baru menjadi undang-undang yang mulai berlaku effective sejak 1 April 2010 pada tarif awal sebesar 10 persen dari nilai ekspor. Akan tetapi waktu mulai berlakunya ditunda selama satu bulan setelah menerima keberatan dari para eksportir dan petani kakao bahwa mereka tidak dimintai pendapat mengenai pajak itu dan tidak dipersiapkan untuk peluncuran pajak itu. Tampaknya sejumlah kecil penerimaan telah dipungut pada bulan Mei 2010.

Kerangka pajak yang diusulkan serupa dengan struktur bea ekspor minyak kelapa sawit/CPO (lihat Kotak 2, Perkembangan Triwulan edisi Maret 2010), dengan penetapan tarif variabel pada ekspor kakao mentah tergantung pada harga kakao internasional. (Grafik 29) Pendekatan sederhana untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang dapat dipungut adalah menerapkan pajak tersebut ke catatan nilai ekspor yang lalu. Dengan asumsi tidak ada perubahan perilaku produksi, konsumsi atau harga internasional, perhitungan demikian memberikan perkiraan batas atas dari penerimaan yang dapat dipungut. Dari tahun 2000 hingga 2008, sedikit penerimaan akan dapat dipungut karena harga kakao internasional pada umumnya berada pada batasan bebas pajak. (Grafik 30) Di tahun 2010, sekitar 1,4 triliun rupiah dapat dipungut bila pajak itu diterapkan sepanjang tahun. (Grafik 31) Karena harga kakao dunia lebih stabil dibanding harga CPO, penerimaan dari ekspor kakao tampaknya akan lebih stabil dibanding keseluruhan penerimaan pajak ekspor.

Terdapat bermacam pendekatan pembatasan ekspor. Semuanya mempengaruhi harga pasar, sehingga dapat memicu ketidakefisienan; akan tetapi pada umumnya pajak ekspor merupakan pendekatan yang paling tidak mengganggu. Dengan asumsi Indonesia adalah penentu harga bagi pasar kakao internasional, atau dapat mempengaruhi harga internasional dengan pengendalian porsi besar pasokan dunia, tampaknya Indonesia akan mencapai tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pasokan dalam negeri dan menurunkan harga domestik. Dalam pasar kakao mentah internasional, pajak itu dapat menurunkan pasokan, meningkatkan harga. Akan tetapi Indonesia hanyalah produsen terbesar nomor tiga, maka pengaruhnya akan bergantung dari kapasitas negara-negara lain untuk mengimbangi berkurangnya pasokan kakao mentah dari Indonesia.

Sementara kebijakan ini dapat menjawab masalah langkanya pasokan bagi industri pemrosesan kakao dalam negeri, yang dikorbankan adalah petani yang mendapat kompensasi lebih rendah untuk hasil panen mereka. Hal ini dapat mendorong produsen kakao dalam negeri untuk berpaling ke komoditas lain jika hasil yang didapat lebih tinggi, walaupun mereka belumlah efisien dalam produksi komoditas lain itu dan harus mengeluarkan biaya investasi baru. Untuk suatu negara dengan kekuatan pasar yang cukup untuk menetapkan harga suatu komoditas, manfaat tarif ekspor diamati melalui harga dalam negeri yang lebih rendah dan pasokan yang lebih besar ke pasar domestik, melalui penerimaan pemerintah yang lebih tinggi dan lebih mudah dipungut, dan sedikit dampak positif pada kondisi perdagangan karena peningkatan harga dunia dari komoditas yang lebih langka. Akan tetapi manfaat ini tampaknya lebih dari cukup untuk mengimbangi ketidakefisienan ekonomi dari bea ekspor, dengan turunnya pendapatan petani mengikuti harga dalam negeri yang lebih rendah, yang menurunkan penerimaan pemerintah lewat lebih rendahnya pajak yang dibayar oleh produsen tersebut. Selain itu, dengan industri pemrosesan menjadi kurang efisien secara global karena distorsi harga yang disebabkan oleh pajak ekspor, secara politis pajak itu dapat menjadi sulit untuk dilepaskan pada tahun-tahun yang akan datang ketika industri kakao telah sampai pada keadaan harga yang menguntungkan. Bea ekspor tersebut juga dapat memicu distorsi lebih jauh ke rantai pasokan sementara, di atas segalanya, menghambat pertumbuhan industri pertanian yang merupakan keunggulan komparatif alami Indonesia.

Grafik 30: Tarif ekspor kakao baru …
(dolar Amerika per ton metriks)

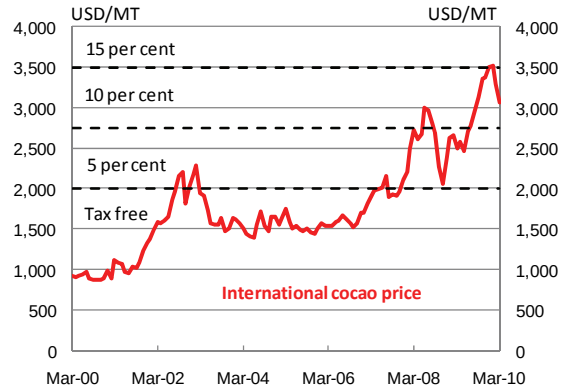

Grafik 31: … menyebabkan peningkatan kecil dalam potensi penerimaan bea ekspor
(triliun rupiah)

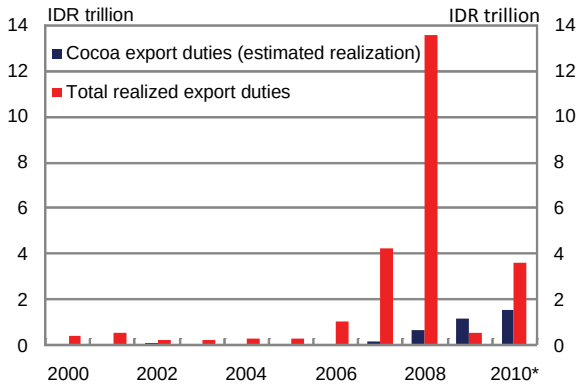

Sumber: Departemen Keuangan, BPS

*Angka 2010 adalah proyeksi BD, Sumber: Depkeu & perkiraan BD

Grafik 32: Belanja subsidi yang lebih tinggi merupakan penyumbang utama lebih tingginya defisit dalam anggaran 2010 yang telah direvisi
(perubahan anggaran 2010, triliun rupiah)

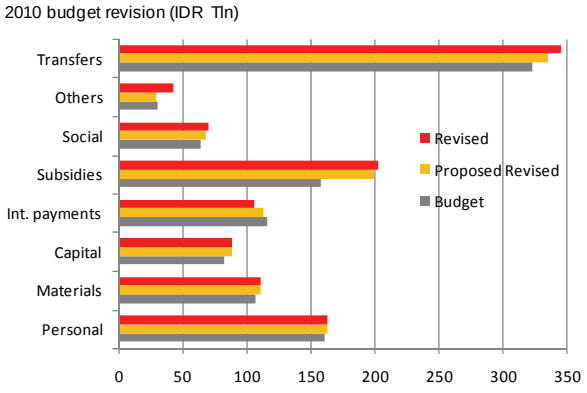

Grafik 33: Hasil anggaran triwulan sedikit di bawah tingkat tahun 2009
(persen jumlah)

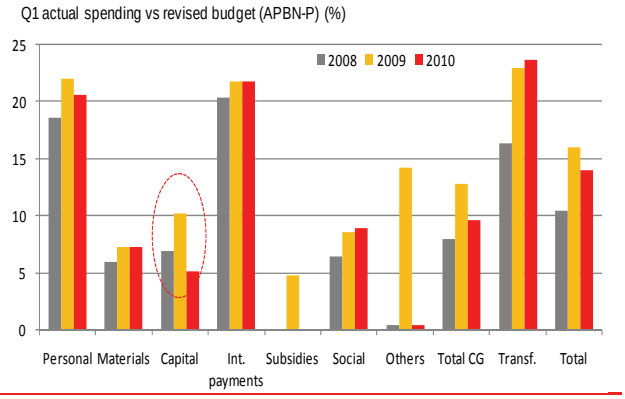

Sumber: Departemen Keuangan

Pemerintah telah mengeluarkan kerangka kebijakan fiskal dan makroekonomi untuk tahun 2011, tetapi belum mengumumkan rencana belanjanya

Anggaran tahun 2011 akan menekankan pada peningkatan kesejahteraan melalui strategi tiga jalur seperti dinyatakan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), yaitu mendukung pertumbuhan, mendukung pekerjaan (melalui insentif pajak untuk meningkatkan investasi dan ekspor dan meningkatkan belanja modal untuk prasarana), dan untuk kaum miskin (melanjutkan program-program sosial dan meningkatkan sasaran untuk pengeluaran subsidi). Belanja pemerintah pusat ditujukan untuk mendukung 11 prioritas nasional yang tercantum di dalam RPJMN (lihat Bagian C dari Perkembangan

Triwulan edisi Maret 2010). Keseluruhan belanja diperkirakan akan meningkat sebesar 7 persen dari tingkat tahun 2010 – cukup jauh di bawah proyeksi pertumbuhan dalam ekonomi nominal (yaitu setelah memperhitungkan kenaikan harga-harga). Belanja pemerintah pusat diperkirakan akan bertumbuh sebesar 7,6 persen, sementara kiriman bagi pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat sekitar 5,7 persen. Perkiraan defisit anggaran berada pada tingkat moderat sebesar 1,7 persen dari PDB, lebih rendah dari anggaran 2010 yang telah diubah sebesar 2,1 persen dari PDB tetapi di atas realisasi defisit tahun 2009 sebesar 1,6 persen.

7. Keseluruhan risiko terhadap perkiraan ekonomi Indonesia telah meningkat dengan meningkatnya ketidakstabilan dalam pasar keuangan dunia

Risiko terhadap ramalan telah meningkat dan agak bergeser ke bawah pada triwulan 2

Distribusi risiko terhadap perkiraan ekonomi jangka pendek Indonesia melebar dan bergeser lebih ke arah bawah. Perubahan pasar keuangan dunia yang cepat pada bulan April dan Mei, dan meningkatnya penekanan pada penghematan belanja negara pada ekonomi-ekonomi besar, telah melahirkan ketidakpastian baru mengenai laju pemulihan global, dan terhadap kondisi keuangan dan harga-harga aktiva. Dengan adanya gejolak yang baru dan dampaknya terhadap harga komoditas, bagian analisa risiko Triwulanan ini juga menyajikan tinjauan risiko terhadap ramalan garis dasar dari ketidakpastian yang mengelilingi proyeksi harga komoditas. Akhirnya, perkembangan politik dalam negeri telah melahirkan ketidakpastian mengenai apakah pemerintah dapat mencapai program reformasi ambisiusnya yang dimuat dalam RPJMN (lihat Bagian C dari Perkembangan Perekonomian Triwulan Indonesia edisi Maret 2010).

Risiko terhadap pemulihan ekonomi dunia telah meningkat, walau Indonesia diperkirakan tidak akan terpengaruh secara berarti

Perkembangan di triwulan 2/2010 menyoroti risiko jangka pendek terhadap proyeksi ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh lingkungan luar negeri yang lebih tidak pasti dengan pulihnya ekonomi global dari kejatuhan yang dalam di tahun 2009. Di bulan Maret, ketika ramalan terakhir disusun, risiko terhadap pemulihan ekonomi global tampaknya menurun, dengan hasil-hasil PDB dan sebagian indikator berada di atas perkiraan dan harga aktiva keuangan meningkat berlanjutan. Bulan April hingga Juni membawa peningkatan gejolak dan pelemahan harga-harga keuangan dunia dan lebih besarnya ketidakpastian akan pendanaan masyarakat ekonomi-ekonomi besar. Dengan rekening permodalan Indonesia yang relatif terbuka, aliran keluar dana modal berukuran besar pada beberapa minggu pertama bulan Mei dan pembalikan arah penumpukkan cadangan selama beberapa bulan sebelumnya menunjukkan seberapa kilatnya keadaan dapat berubah.

Grafik 34: Hipothesis penurunan hipotetis ekonomi yang berpusat di Eropa tidak memiliki dampak yang berarti terhadap ramalan Indonesia tahun 2010
(persen perubahan tahunan)

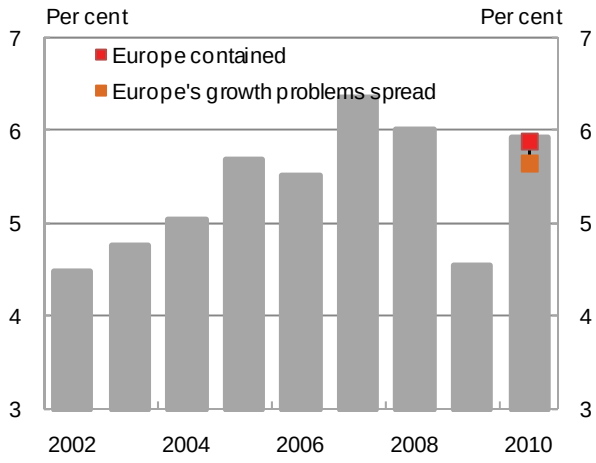

Sumber: BPS dan proyeksi Bank Dunia

Sementara itu, pemulihan yang lebih lesu lintas ekonomi-ekonomi Eropa, mengikuti pergeseran wilayah itu kepada penghematan fiskal, tampaknya hanya membawa dampak terbatas terhadap ekonomi riil Indonesia. Hubungan perdagangan langsung Indonesia dengan Eropa berukuran relatif kecil, demikian juga porsi perdagangannya – bahkan keduanya telah menurun sejak pertengahan tahun 2008. Dalam skenario ekstrim bila ekonomi Eropa mengkerut sebesar resesi tahun 2009 (4 persen), maka dampak perhitungan terhadap mitra-mitra dagang utama Indonesia hanyalah sekitar ½ poin persentase. Besarnya hanyalah sekitar 0,1 poin persentase dari proyeksi pertumbuhan Indonesia di tahun 2010. (Grafik 34) Penurunan sedalam itu tampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan pada ekonomi lain, termasuk mitra dagang lain Indonesia. Dengan hipotetis rata-rata pertumbuhan pada seluruh mitra dagang Indonesia di tahun 2010 turun menjadi 2,5 persen (benar-benar setengah dari proyeksi garis dasar), lalu dampak perhitungan langsung terhadap pertumbuhan PDB Indonesia hanya sebesar 0,4 poin persentase di tahun 2010. (Grafik 34) Taksiran ini merendahkan dampak dari keadaan yang sedemikan ekstrim, dengan pasar kredit dan aliran keuangan juga akan menerima dampak yang

berarti, dengan jatuhnya harga-harga komoditas dunia dan langkanya pendanaan untuk investasi di Indonesia akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap ramalan Indonesia.

Risiko sekitar ramalan inflasi lebih seimbang: di satu sisi terdapat ketidakpastian pemulihan dalam permintaan global, di sisi lain penyesuaian harga energi dan luangnya kondisi moneter dalam negeri

Pasar keuangan dunia dan perkembangan pertumbuhan, dan implikasinya terhadap harga-harga komoditas dunia juga melahirkan ketidakpastian yang berarti sekitar ramalan inflasi. Di sisi lain, berlanjutnya pijakan kebijakan moneter Indonesia yang relatif luang dan tanda-tanda yang baru terlihat akan potensi percepatan dalam kredit dan pasokan uang menyebabkan risiko bahwa inflasi dapat meningkat lebih cepat dari perkiraan, terutama di akhir tahun 2010 dan menuju tahun 2011. Konsensus yang berkembang menyebutkan pengaturan harga energi Indonesia harus lebih mencerminkan biaya pemasokan energi tersebut, yang secara rata-rata, melahirkan kemungkinan bagi tambahan peningkatan inflasi headline, tetapi selama hal itu tidak menyebabkan peningkatan berkelanjutan dalam perkiraan inflasi, penyesuaian ini hanya akan memiliki dampak yang sementara.

Gejolak di bulan Mei juga mempengaruhi harga komoditas, menyoroti sulitnya memperkirakan determinan utama tersebut di dalam ramalan Indonesia

Gejolak harga komoditas juga meruncing di bulan Mei. Sebagai contoh, harga minyak mentah turun sekitar 25 persen atau 20 dolar Amerika per barel antara akhir bulan April dan akhir bulan Mei. Tetapi hal ini tidak diluar kebiasaan catatan gejolak, dan memperjelas kesulitan memperkirakan determinan-determinan utama tersebut secara akurat dalam ramalan ekonomi Indonesia. Dalam dua per tiga periode 12 bulanan antara tahun 1990 dan 2000, rata-rata harga komoditas non-energi telah bergerak tidak kurang dari 15 persen, sementara harga komoditas energi telah bergerak tidak kurang dari 30 persen. (Gejolak ini, kesalahan ramalan yang baru, dan implikasinya terhadap ekonomi riil Indonesia dibicarakan pada Bagian B-3.)

Ramalan garis dasar mengandaikan harga komoditas non-energi dunia meningkat sebesar 20 persen di tahun 2010 (dari tingkat rata-rata tahun 2009) dan harga energi 30 persen lebih tinggi dari 2009. Menurunkan ramalan garis dasar tahun 2010 dengan satu dan meningkatkannya dengan satu dan dua deviasi standar 12 bulanan memberikan rasa kepekaan dari ramalan itu kepada pergerakan yang masuk akal dalam harga komoditas. (deviasi standar dalam rata-rata pertumbuhan tahunan, hanyalah sedikit di bawah deviasi standar di dalam persentase perubahan 12 bulanan. Pada skenario-skenario ini, harga-harga komoditas diasumsikan tetap berada pada tingkat yang dikejutkan ini di tahun 2011.)

Kejutan positif yang beralasan terhadap harga komoditas menunjukkan pertumbuhan PDB yang lebih cepat secara moderat, surplus perdagangan yang lebih besar dan defisit anggaran yang lebih kecil, dan peningkatan inflasi yang lebih berarti

Kejutan yang lebih besar terhadap harga-harga komoditas (harga non-energi 30 persen di atas garis dasar dan harga energi 60 persen lebih tinggi) akan meningkatkan pertumbuhan PDB di tahun 2010 sebesar 0,2 poin persentase dan sebesar 0,3 poin persentase di tahun 2011. Hal ini mencerminkan pertumbuhan pertanian dan pertambangan yang lebih cepat, sebagian darinya mengimbangi lebih lambatnya pertumbuhan dalam konstruksi dengan harga barang masukan yang lebih tinggi.

Harga komoditas yang lebih tinggi berarti pertumbuhan yang lebih cepat dalam deflator PDB, karenanya ekonomi nominal dan penerimaan pemerintah, yang juga diuntungkan dari lebih tingginya penerimaan bukan pajak dari lebih tingginya nilai produksi minyak (lihat Bagian B-2). Menurut skenario-skenario tersebut dengan peningkatan harga-harga komoditas yang luas, penerimaan diperkirakan akan meningkat lebih cepat dibanding biaya subsidi energi dan pemindahan tanggung jawab pemerintah kepada pemerintah daerah, menurunkan defisit anggaran sebanyak-banyaknya sebesar 0,5 persen dari PDB pada tahun 2011. Kejutan terhadap harga komoditas ini juga akan meningkatkan inflasi IHK, terutama bagi harga-harga bahan pangan yang terutama mempengaruhi keluarga yang lebih miskin. Dalam neraca, sekali lagi dengan pertumbuhan harga komoditas yang luas, percepatan ini tampaknya akan diimbangi oleh peningkatan pendapatan (terutama pendapatan pertanian) bagi keluarga yang lebih miskin, menunjukkan dampak tak berarti atau bahkan dampak negatif terhadap keseluruhan tingkat kemiskinan. Seluruh pengaruh tersebut berbalik pada skenario serupa dengan harga-harga komoditas yang lebih rendah.

Grafik 35: Dampak kejutan harga komoditas terhadap ekonomi nominal dan defisit anggaran
(perbedaan poin persentase dari ramalan garis dasar)

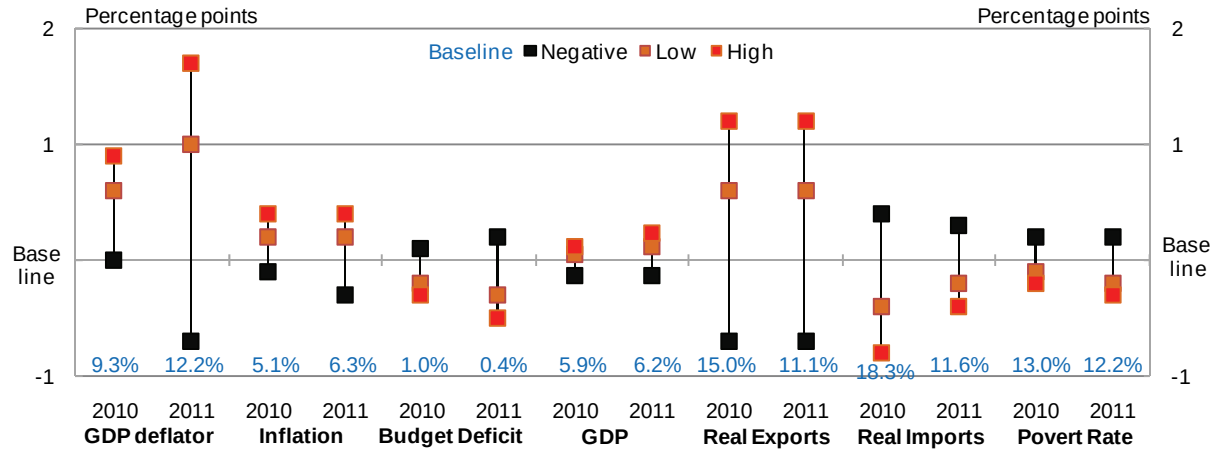

Untuk persentase tingkat pertumbuhan variabel lihat Bagian B. Sumber: Bank Dunia

Pada jangka waktu yang lebih panjang, meningkatkan laju pertumbuhan Indonesia secara berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan agenda reformasi yang ambisius

Pada jangka waktu yang lebih panjang, meningkatkan laju pertumbuhan Indonesia menjadi 7 persen dan memastikan bahwa pertumbuhan itu inklusif dan berkelanjutan, membutuhkan pemenuhan agenda reformasi ambisius yang digariskan pemerintah dalam RPJMN tahun 2010-2013 (lihat Bagian C dari Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Maret 2010). Perkembangan politik sejak akhir tahun 2009, seperti penyelidikan parlemen terhadap upaya penyelamatan Bank Century, dan lemahnya pencairan anggaran material dan modal pada 5 bulan pertama tahun 2010, menunjukkan bahwa terdapat risiko yang berarti yang menyebabkan hasil-hasil dapat tidak sebaik yang dicanangkan. Hal ini akan membawa implikasi negatif yang cukup berarti bagi proyeksi percepatan dan pertumbuhan investasi, walaupun tidaklah jelas sejauh mana perkembangan tersebut akan berdampak terhadap persepsi investor pasar keuangan.

B. PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Tingginya Suku Bunga Kredit dan NIM di Indonesia: Apakah Langit Menjadi Batasnya?

a. Indonesia memiliki NIM tertinggi di kawasannya, didorong oleh tingginya suku bunga kredit

Tingginya NIM Indonesia sebagian besar merupakan produk sampingan dari tingginya suku bunga kredit, yang harus diawasi karena dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi riil

Tingginya marjin bunga netto (NIM) dan suku bunga kredit di Indonesia telah menarik cukup banyak perhatian pada tahun lalu, dengan adanya penurunan pertumbuhan kredit di tahun 2009, dan kenyataan bahwa suku bunga kredit tidak banyak bergerak turun walaupun Bank Indonesia telah memotong 300 basis poin sejak akhir tahun 2008 hingga bulan Agustus 2009 (Grafik 12). NIM merupakan ukuran profitabilitas bank, dihitung sebagai rasio penerimaan bunga bersih (perbedaan antara pendapatan bunga dan biaya bunga) terhadap jumlah aset penghasil bunga, dinyatakan dalam persen. Sehingga NIM yang tinggi menunjukkan suku bunga kredit yang tinggi atau suku bunga tabungan yang rendah, atau keduanya. Pada angka yang hampir menyentuh 6 persen, Indonesia memiliki NIM tertinggi dibanding negara manapun di wilayahnya (Grafik 37). Karena rata-rata tingkat tabungan di Indonesia relatif cukup tinggi dibanding negara-negara tetangganya, besarnya NIM di Indonesia sebagian besar merupakan produk sampingan dari suku bunga kredit yang tinggi. Dilihat secara sempit, NIM yang tinggi mencerminkan hal yang positif, karena membuat bank-bank di Indonesia menjadi salah satu yang paling menguntungkan di wilayahnya. Akan tetapi, jika suku bunga kredit yang tinggi yang mengembangkan NIM sedemikian rupa berpotensi menghambat investasi di sektor riil sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi, maka hal itu menjadi masalah yang pantas dipelajari.

Kami menganalisis struktur pasar, premi risiko dan efisiensi sebagai faktor-faktor kontributor kepada tingginya suku bunga kredit dan NIM

Makalah ini mengamati tiga faktor yang dapat memberi kontribusi kepada tingginya suku bunga kredit dan NIM di Indonesia: struktur pasar, premi risiko dan efisiensi. Pemahaman faktor-faktor tersebut dapat membantu perumusan kebijakan-kebijakan yang membuka jalan kepada hasil yang lebih pareto efisien bagi ekonomi.

Grafik 36: Suku bunga kredit telah turun kurang dari suku bunga tabungan setelah pemotongan suku bunga referensi BI pada tahun 2008-2009…
(marjin bunga bersih, kredit, suku bunga tabungan dan referensi, persen)

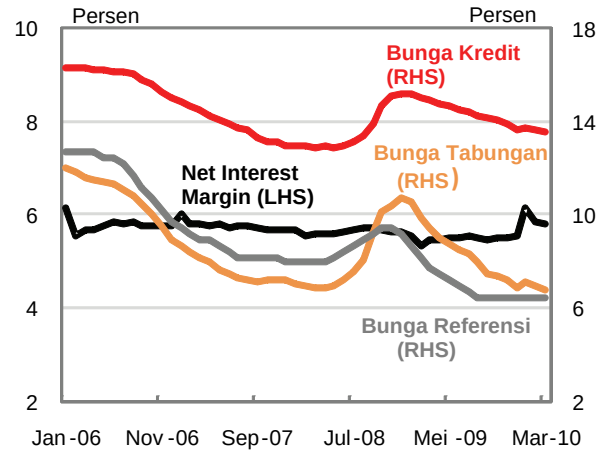

Sumber: BI dan CEIC

Grafik 37: …mempertahankan NIM Indonesia menjadi yang terlebar di wilayah dengan selisih yang besar
(rata-rata marjin bunga bersih untuk tahun 2008 dan 2009 dalam persen)

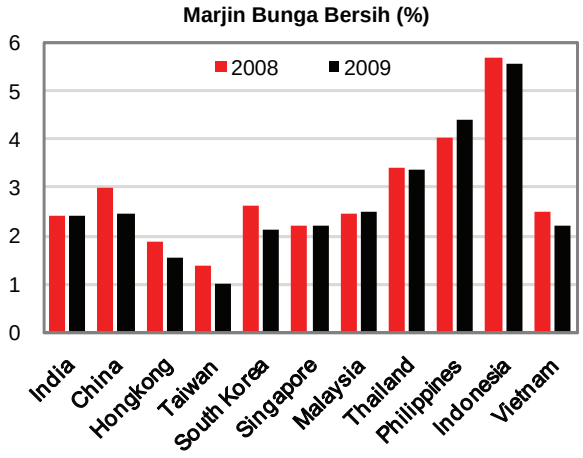

Sumber: Fitch Ratings

b. Struktur Pasar: Bank-bank bersifat oligopoli dan mendominasi sektor keuangan

Analisis rasio konsentrasi mengungkapkan bahwa sektor perbankan Indonesia bersifat oligopolis

Cara sederhana untuk mengukur struktur dan tingkat persaingan di dalam suatu industri adalah dengan menggunakan analisis rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi mengukur persentase pangsa pasar suatu industri yang dimiliki suatu jumlah perusahaan di dalam industri tersebut. Rasio 0-50 persen menunjukkan industri dengan konsentrasi rendah, berkisar dari persaingan sempurna hingga oligopoli. Konsentrasi menengah dicerminkan dengan rasio 50-80 persen, dan pada umumnya merupakan oligopoli. Industri dengan konsentrasi yang tinggi memiliki rasio 80-100 persen, dan berkisar dari oligopoli hingga monopoli penuh.

Kami melihat pada rasio konsentrasi kredit 14 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2009 dan nilainya adalah 71 persen, menunjukkan industri tersebut adalah oligopoli konsentrasi menengah. Rasio konsentrasi kredit untuk 8 bank teratas adalah 60 persen, dan untuk 4 teratas adalah 44 persen, makin menegaskan tendensi adanya oligopoli. Hasil ini tidaklah mengejutkan, karena 14 bank terbesar menguasai 80 persen total aktiva sektor perbankan Indonesia. Analisis Indeks Lerner dan Herfindahl yang dilaksanakan oleh bank sentral juga mendapatkan hasil serupa, memperkuat temuan kami. Dalam industri oligopoli seperti ini, interaksi pasar sisi penawaran dan harga-harga sangat dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan terbesar. Dengan demikian, besar kemungkinannya bahwa 14 bank teratas Indonesia memegang kendali yang sangat kuat dalam menetapkan suku bunga dan norma untuk keseluruhan sektor dengan 121 bank.

…tetapi oligopoli sektor perbankan juga ditemukan di negara-negara lain dengan suku bunga kredit dan NIM yang lebih rendah sehingga selain persaingan antar bank, kami juga melihat dinamika persaingan sektor keuangan Indonesia yang berlaku

Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa oligopoli sektor perbankan bukanlah sesuatu yang langka. Rasio konsentrasi kredit 4 bank terbesar di Malaysia dan Thailand di tahun 2009 adalah masing-masing sebesar 48 persen dan 50 persen. Selain itu, statistik Bank of Thailand mencerminkan bahwa 6 bank terbesar di Thailand mengendalikan lebih dari 80 persen dari seluruh aktiva di industri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Thailand dan Malaysia setidaknya memiliki konsentrasi yang serupa seperti Indonesia, tetapi dengan rata-rata suku bunga kredit dan NIM yang lebih rendah. Dengan demikian sektor perbankan oligopolis saja tidak cukup untuk menjelaskan tingginya suku bunga kredit dan NIM di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, persaingan di dalam sektor keuangan yang matang tidaklah terbatas hanya antara bank, tetapi juga antara bank dan lembaga keuangan non-bank dan pasar saham. Untuk memahami keseluruhan dinamika persaingan sektor keuangan Indonesia, kita juga harus mempertimbangkan faktor penawaran dan permintaan lainnya yang mempengaruhi tingkat persaingan antar bank dalam menetapkan suku bunga kredit dan tabungan.

Grafik 38: Tabungan telah turun terhadap PDB pada dekade yang lalu sementara kredit telah meningkat …
(rasio tabungan terhadap PDB dan kredit terhadap PDB dalam persen)

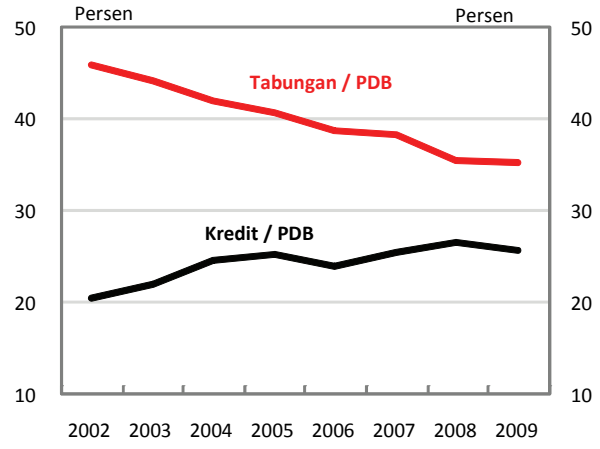

Sumber: BI dan CEIC

Grafik 39: …berkat pertumbuhan kredit yang tinggi pada tahun-tahun sebelum 2009, tetapi tabungan bertumbuh lambat
(pertumbuhan tabungan dan kredit dalam persen perubahan tahun-ke-tahun; suku bunga kredit dan tabungan dalam %)

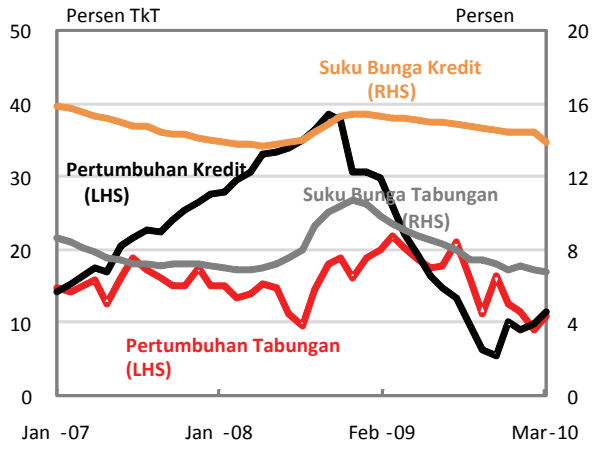

Sumber: BI dan CEIC

Mandeknya pertumbuhan tabungan dan alternatif dengan hasil yang lebih besar dibanding tabungan bank meningkatkan persaingan antar bank demi tabungan, mendorong naiknya suku bunga tabungan …

Kami menemukan perbedaan menyolok antara dinamika sisi tabungan dan sisi kredit di Indonesia. Rasio tabungan terhadap PDB telah turun secara tetap sejak dekade lalu, dari 46 persen di tahun 2002 menjadi 35 persen di tahun 2009 (Grafik 38). Lebih lanjut, rata-rata pertumbuhan bulanan untuk tabungan relatif lambat, menyentuh titik rendah 9 persen (dalam perhitungan tahun-ke-tahun) di bulan Februari tahun ini (Grafik 39). Dengan lambatnya pertumbuhan tabungan tersebut, penabung memiliki banyak alternatif yang menarik untuk melakukan investasi dana mereka, seperti produk-produk dengan hasil yang besar yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank dan obligasi pemerintah. Gabungan antara lambatnya permintaan tabungan dan pilihan investasi lain dengan hasil yang lebih besar yang tersedia bagi penabung membuat tingginya persaingan antar bank demi tabungan di Indonesia, mendorong suku bunga deposito berada di atas yield obligasi pemerintah 5 tahunan. Rata-rata suku bunga deposito 1 bulanan di Indonesia antara bulan Januari 2006 dan Maret 2010 adalah sebesar 8,7 persen, bandingkan dengan masing-masing 2,3 persen, 2,8 persen dan 3,6 persen di Thailand, Malaysia dan Filipina (Grafik 43).

…sementara tingginya pertumbuhan kredit dan alternatif kredit bank yang terbatas karena pasar modal yang belum berkembang menyebabkan rendahnya persaingan antar bank demi kredit dan tingginya keleluasaan dalam menetapkan suku bunga kredit

Dibandingkan dengan tabungan, rasio kredit terhadap PDB di Indonesia terus meningkat pada dekade yang lalu, dari 20 persen di tahun 2002 menjadi 26 persen di tahun 2009 (Grafik 38). Rata-rata pertumbuhan bulanan kredit tahun-ke-tahun dari bulan Januari 2007 hingga Maret 2010 adalah 23 persen, yang sudah menyertakan perlambatan besar pasca-krisis di tahun 2009 (Grafik 39). Berbeda dengan penabung, sebagian besar peminjam di Indonesia hanya memiliki pilihan yang terbatas untuk mengumpulkan dana selain kredit bank. Pasar modal saham dan utang secara umum masih belum berkembang baik, dengan hanya sedikit modal ventura dan bagian obligasi perusahaan yang sangat kecil (Grafik 41). Bank-bank merupakan 80 persen dari keseluruhan sektor keuangan dalam hal aktiva dan masih merupakan sumber pendanaan utama bagi sebagian besar peminjam (Grafik 40). Selain itu, lebih dari 50 persen jumlah kredit di Indonesia saat ini disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang karena tidak memiliki pilihan pendanaan lain, umumnya memiliki permintaan yang pada khususnya tidak sensitif terhadap suku bunga. Sebagai akibatnya, bank-bank menikmati permintaan dengan karakteristik debitur berkualitas baik dan mengendalikan untuk kredit-kredit mereka, dan memiliki derajat keleluasaan yang jauh lebih besar dalam menetapkan suku bunga kredit, dibandingkan dengan suku bunga tabungan, karena rendahnya persaingan dari produk-produk dan sumber-sumber lain. Dengan sendirinya, hal ini mendorong melangitnya suku bunga kredit. Rata-rata suku bunga kredit di Indonesia antara bulan Januari 2006 dan Maret 2010 adalah sebesar 15 persen, dibanding masing-masing 6,8 persen, 6 persen dan 8,9 persen di Thailand, Malaysia dan Filipina untuk jangka waktu yang sama (Grafik 43).

Walaupun bank-bank juga masih merupakan sumber pendanaan utama di Thailand dan Malaysia, pasar-pasar modal di kedua negara itu sudah cukup maju pada dekade yang lalu, sehingga mereka lebih tidak bergantung pada kredit bank

Untuk perbandingan sekilas, sementara bank-bank masih merupakan sumber pendanaan utama di wilayah yang sama, negara-negara seperti Thailand dan Malaysia telah menyaksikan perkembangan pasar modal saham dan utang yang cukup berarti pada dekade yang lalu, selain perluasan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Di Thailand, rasio peredaran obligasi terhadap PDB bergerak dari 10 persen di tahun 1997 menjadi 66 persen di tahun 2009, sementara kapitalisasi pasar saham dibanding PDB meningkat dari 23 persen di tahun 1997 menjadi 67 persen di tahun 2009. Di Malaysia, masing-masing rasio peredaran obligasi dan kapitalisasi pasar saham terhadap PDB di tahun 2009 adalah sebesar 88 persen dan 140 persen. Berkembangnya pasar modal menurunkan kebergantungan keseluruhan kegiatan ekonomi terhadap kredit bank umum. Dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, rasio jumlah peredaran obligasi Indonesia terhadap PDB adalah sekitar 17 persen di tahun 2009, dan kapitalisasi pasar saham terhadap PDB adalah 36 persen.

Grafik 40: Bank pada umumnya merupakan sumber dana tunggal di sektor keuangan Indonesia yang baru tumbuh…
(rincian kelembagaan sektor keuangan sesuai persentase jumlah aktiva)

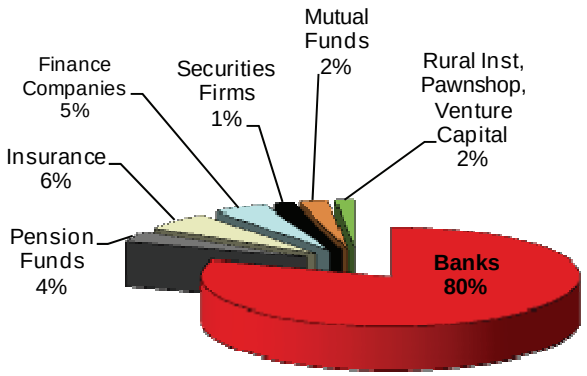

Sumber: BAPEPAM dan Bank Dunia

Grafik 41: …dengan obligasi korporat, penawaran saham perdana dan penerbitan obligasi selama ini hanya memainkan peran kecil dalam pengumpulan modal
(nilai penawaran perdana obligasi korporat, penawaran saham perdana dan penerbitan obligasi dalam triliun rupiah; jumlah lembar yang sama)

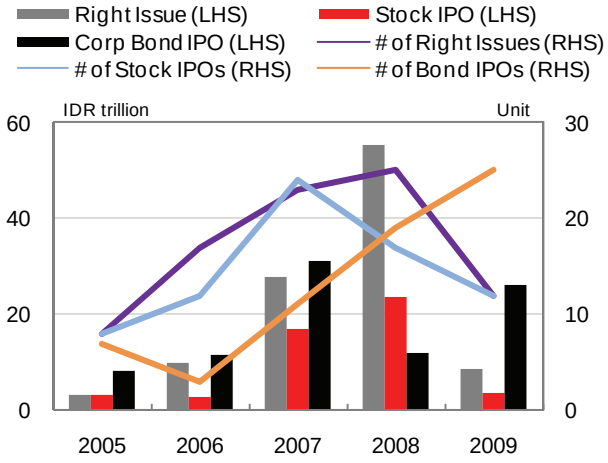

Sumber: BAPEPAM dan Bank unia

Tingginya persaingan antar bank demi tabungan dan rendahnya persaingan kredit meninggikan suku bunga tabungan dan selanjutnya menerbangkan suku bunga kredit lebih tinggi lagi di Indonesia dengan bank-bank mengincar NIM yang tinggi

Dilihat bersama-sama, tingginya persaingan antar bank dan rendahnya keleluasaan penetapan suku bunga tabungan, dan rendahnya persaingan dan tingginya keleluasaan penetapan suku bunga kredit, menyebabkan tingginya suku bunga tabungan di Indonesia relatif terhadap negara-negara lain, dan bahkan suku bunga kredit yang lebih tinggi lagi karena bank-bank mengincar NIM yang tinggi. Di bulan September 2009, BI mencoba membatasi beberapa tekanan naik dari suku bunga kredit yang tinggi dengan mendorong 14 bank utama untuk sepakat mengekang suku bunga tabungan. Walaupun mungkin berhasil sedikit menurunkan suku bunga tabungan (dari 8 persen di bulan Agustus 2009 menjadi 6,8 persen di bulan Maret 2010), tidak ada tekanan yang nyata bagi bank-bank untuk giat menurunkan suku bunga kredit, sehingga suku bunga kredit tetaplah relatif tinggi, semakin memperlebar NIM.

c. Premi Risiko: Catatan inflasi dan yield obligasi yang tinggi dan cepat berubah meningkatkan risiko

Premi risiko Indonesia umumnya lebih tinggi dari yang lain, didorong catatan inflasi yang tinggi dan cepat berubah

Suku bunga kredit menyertakan biaya modal yang bebas risiko ditambah premi risiko, yang mencakup faktor-faktor seperti perkiraan inflasi, risiko wanprestasi, risiko jangka waktu dan lainnya. Di Indonesia, premi risiko ini umumnya lebih tinggi dibanding negara-negara lain, sebagian besar disebabkan oleh catatan inflasi yang tinggi dan cepat berubah.

Grafik 42: Suku bunga kredit swasta di Indonesia menyertakan premi karena catatan inflasi dan yield yang tinggi dan cepat berubah
(suku bunga kredit dan tabungan, inflasi CPI TkT bulanan dan yield obligasi 5 tahunan dalam persen)

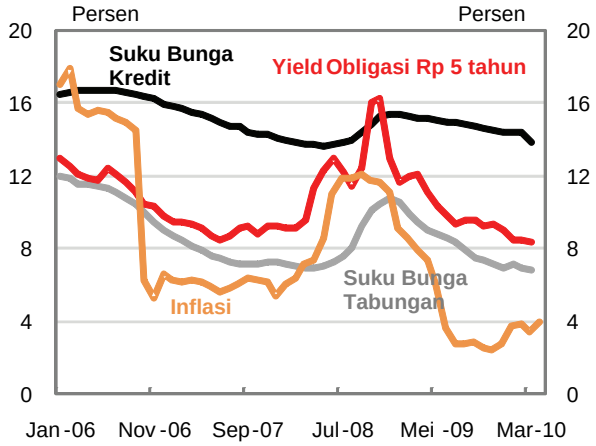

Sumber: BI dan CEIC

Pemberi kredit akan selalu menambahkan premi kepada suku bunga kredit berdasarkan perkiraan inflasi selama jangka waktu kredit. Karena catatan inflasi di Indonesia sangat tinggi dan cepat berubah, penyusunan perkiraan inflasi cukup rumit, dan merupakan penyebab utama tingginya suku bunga kredit karena bank-bank mencoba menyediakan penyangga yang cukup tebal untuk mengimbangi gejolak inflasi yang mendadak dan tidak diperkirakan. Dari bulan Januari 2006 hingga Maret 2010, rata-rata inflasi bulanan di Indonesia (dalam perhitungan tahun-ke-tahun) adalah sebesar 8,2 persen, berkisar dari nilai tertinggi 18 persen di bulan Februari 2006 ke nilai rendah 2,4 persen di bulan November 2009 (Grafik 42, Grafik 43). Sebagai perbandingan, rata-rata tingkat inflasi di Thailand, Malaysia dan Filipina pada jangka waktu yang sama adalah masing-masing 2,9 persen, 2,8 persen dan 5,4 persen. Selain itu, gejolak inflasi di negara-negara tersebut relatif lebih rendah, dengan puncak inflasi sebesar 9,2 persen dan 8,5 persen masing-masing untuk Thailand dan Malaysia, dan 12,4 persen untuk Filipina (Grafik 45). Dengan sendirinya, rata-rata suku bunga kredit dan rata-rata spread antara suku bunga kredit dan inflasi di Indonesia pada jangka waktu tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan ketiga negara tersebut (Grafik 43, Grafik 44).

Grafik 43: Rata-rata suku bunga, inflasi dan yield obligasi negara di Indonesia lebih tinggi secara berarti dibanding negara-negara lain …
(rata-rata yield obligasi negara 5 tahunan, CPI, suku bunga kredit dan tabungan dalam persen)

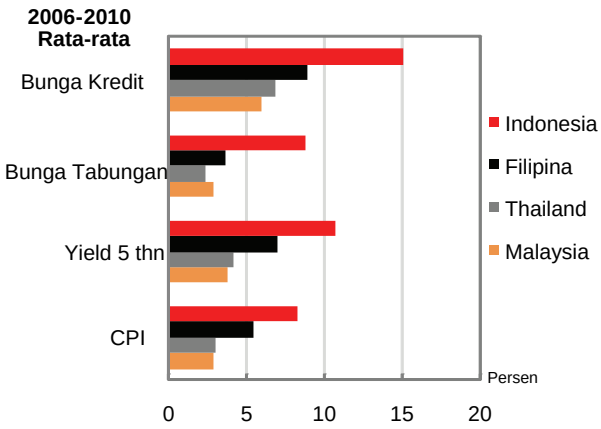

Sumber: BI dan CEIC

Grafik 44: …seperti juga spread antara suku bunga kredit dan tabungan Indonesia, dan yield 5 tahunan dan inflasi
(rata-rata spread dalam basis poin)

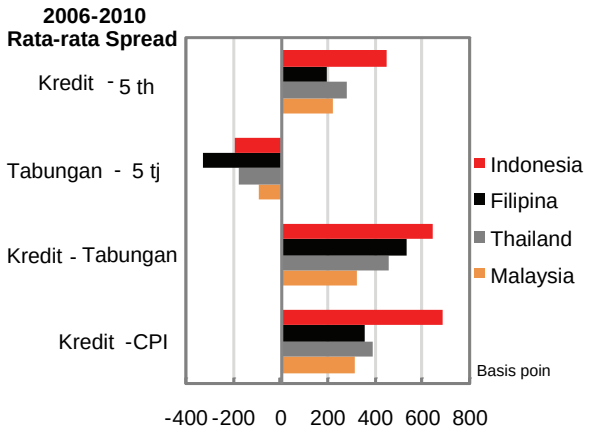

Sumber: BI dan CEIC

Yield obligasi pemerintah yang tinggi dan cepat berubah di Indonesia juga mendorong suku bunga kredit swasta yang lebih tinggi …

Selain suku bunga kredit sektor swasta, yield obligasi pemerintah di Indonesia juga umumnya lebih tinggi (dan lebih cepat berubah) dibanding negara-negara tetangganya, sekali lagi disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan ketidakpastian inflasi. Antara tahun 2006 dan 2010, rata-rata yield obligasi pemerintah 5 tahunan dalam mata uang lokal di Indonesia adalah sebesar 10,6 persen, dibandingkan dengan rata-rata yield sebesar 4 persen, 3,7 persen dan 7 persen untuk masing-masing Thailand, Malaysia dan Filipina (Grafik 43, Grafik 46). Karena yield obligasi pemerintah berperan sebagai jangkar bagi suku bunga kredit sektor swasta, yield yang tinggi dan cepat berubah tersebut juga mendorong suku bunga kredit yang tinggi di Indonesia—karena mereka mendorong suku bunga tabungan naik karena bank-bank berusaha untuk menyaingi obligasi yang menghasilkan yield yang tinggi.

…seperti juga masalah-masalah informasi yang tidak simetris yang meningkatkan risiko wanprestasi

Di samping inflasi tinggi, masalah-masalah informasi yang tidak simetris juga mendorong tingginya premi risiko Indonesia. Buruknya kualitas laporan korporasi yang disebabkan praktik akuntansi dan pengungkapan yang kurang memadai, masalah agunan dan sistem hukum yang lemah membuat kredit sebagai usaha dengan risiko yang lebih tinggi dibanding banyak negara lain. Bank-bank menyertakan hal tersebut ke dalam suku bunga kredit mereka, makin mendorong naiknya suku bunga dan NIM.

d. Efisiensi: Kompetensi perbankan mungkin bukanlah yang mendorong tingginya NIM

Hasil regresi dari 14 bank terbesar menunjukkan hubungan positif antara tingginya rasio efisiensi, rendahnya rasio biaya pendanaan dan NIM…

Pada tingkat yang lebih mikro, terdapat faktor-faktor spesifik perusahaan yang mempengaruhi NIM. Hasil-hasil dari regresi panel yang dilakukan dengan menggunakan data untuk 14 bank terbesar di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2009 menunjukkan bahwa efisiensi yang tinggi (seperti diukur melalui rasio rendahnya biaya operasi terhadap penerimaan operasi) dan rasio pinjaman terhadap tabungan (LDR), dan biaya dana yang rendah (seperti diukur melalui rasio tingginya permintaan tabungan ditambah simpanan tabungan terhadap keseluruhan tabungan) seluruhnya terhubung secara positif dan signifikan dengan NIM. Hasil-hasil ini tidak mengejutkan karena NIM merupakan ukuran profitabilitas, dihitung sebagai rasio pendapatan bunga bersih terhadap jumlah aktiva penghasil bunga, sehingga secara teoretis kami mengira mereka akan meningkat bersama-sama dengan efisiensi, LDR dan biaya pendanaan yang lebih rendah. Kami juga menemukan bahwa ukuran (yang diukur melalui jumlah aktiva) berbanding terbalik dengan NIM. Hal ini cukup mengejutkan dan walaupun dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa bank-bank yang lebih besar pada sampel memiliki biaya pendanaan yang lebih tinggi atau aktiva yang memberi yield yang lebih rendah, hal itu mungkin juga disebabkan pada kenyataan bahwa kami hanya menggunakan data untuk 14 bank terbesar di Indonesia, yang menyebabkan hasil yang sedikit timpang.(Penelitian lebih lanjut dengan sampel seluruh bank diharapkan dapat memberikan konfirmasi lebih baik)

…tetapi juga hubungan positif antara biaya operasi dan NIM, menunjukkan bahwa bank memindahkan beberapa dari biaya tersebut kepada peminjam

Salah satu hasil yang cukup menarik dan berbeda dari yang lain dari regresi kami karena pada awalnya tampaknya tidak masuk akal adalah hubungan positif antara biaya operasi dan NIM. Hal ini konsisten dengan hasil-hasil dari analisis NIM sebelumnya di Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina) yang dilakukan oleh Jude Doliente di tahun 2005. Doliente menemukan bahwa biaya-biaya operasi berhubungan positif dengan NIM pada negara-negara tersebut karena bank-bank memindahkan sebagian biaya operasi mereka kepada para peminjam dan penabung mereka. Kami dapat menduga bahwa bank-bank di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara yang lain juga dapat melakukan hal itu karena adanya faktor-faktor seperti struktur pasar non-kompetitif yang dibicarakan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk menurunkan NIM di Indonesia akan membutuhkan penurunan biaya operasi bank, atau struktur pasar yang lebih bersaing yang tidak memungkinkan bank-bank untuk memindahkan biaya-biaya tersebut kepada nasabahnya.

e. Temuan Utama dan Jalan di Depan

Dinamika kredit dan tabungan di sektor keuangan Indonesia yang relatif dangkal, bersama-sama dengan catatan inflasi yang tinggi dan cepat berubah, informasi yang tidak simetris dan ketidakefisienan tingkat mikro berakhir pada suku bunga kredit dan NIM yang tinggi di Indonesia

Makalah ini menganalisis struktur pasar, premi risiko dan efisiensi sebagai faktor-faktor kontributor utama kepada tingginya suku bunga kredit dan NIM di Indonesia.

- Kami menemukan bahwa sektor perbankan oligopolis di Indonesia bersama dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang relatif terbatas dan pasar modal saham dan utang yang belum berkembang, menyebabkan terbatasnya pilihan bagi peminjam selain kredit bank, sehingga berlajut pada rendahnya persaingan antar bank dan tingginya keleluasaan dalam menetapkan suku bunga kredit. Di lain pihak, obligasi pemerintah Indonesia dengan yield tinggi dan merosotnya basis tabungan memperketat persaingan antar bank di sisi tabungan, mendorong naiknya suku bunga tabungan. Dilihat secara bersama-sama, dinamika sisi kredit dan tabungan ini berkontribusi kepada tingginya suku bunga kredit dan tabungan di Indonesia, disamping tingginya NIM.

- Catatan inflasi dan yield obligasi yang tinggi dan cepat berubah turut meningkatkan premi risiko Indonesia dan meningkatkan suku bunga kredit sektor

swasta dan NIM karena bank-bank mencoba membangun penyangga yang cukup tebal untuk mengimbangi gejolak inflasi dan suku bunga. Masalah-masalah informasi yang tidak simetris meningkatkan risiko wanprestasi, lebih meningkatkan premi risiko.

- Pada tingkat mikro, analisis regresi kami menunjukkan bahwa walau NIM 14 bank memiliki hubungan positif dengan rasio efisiensi tinggi dan biaya pendanaan yang rendah, mereka juga memiliki hubungan positif dengan biaya operasi. Temuan ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia mungkin memindahkan sebagian biaya operasinya kepada peminjam, konsisten dengan penelitian-penelitian atas NIM sebelumnya di wilayah ini.

Sektor keuangan dan pasar modal yang lebih dalam, bersama dengan lebih terkendalinya inflasi, pelaporan perusahaan yang lebih baik, sistem hukum yang lebih sempurna, dan efisiensi tingkat perusahaan yang lebih tinggi dapat membantu menurunkan suku bunga kredit dan NIM di masa depan

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mencapai penurunan suku bunga kredit dan NIM melalui:

1) Pendalaman sektor keuangan dan pasar modal untuk memberikan lebih banyak pilihan pendanaan kepada peminjam dan meningkatkan persaingan antar bank dalam menetapkan suku bunga kredit;
2) Pengendalian tingkat inflasi agar stabil dan rendah, yang kemudian akan berakibat pada yield obligasi yang lebih rendah dan stabil pula;
3) Penyempurnaan praktik pelaporan dan pengungkapan perusahaan (sehingga bank dapat menurunkan ketergantungan pada agunan dan lebih menekankan pada pemeriksaan kredit dan analisis arus kas), dan praktik hukum yang lebih baik;
4) Penurunan biaya-biaya operasi bank, atau perubahan struktur pasar yang menurunkan kekuatan monopoli dari bank-bank.

Table 3: Faktor-Faktor yang mempengaruhi Marjin Bunga Netto (NIM)

Ringkasan Hasil Regresi Panel GLS untuk 14 bank terbesar di Indonesia dari

Variabel Dependen: NIM			
Variabel Independen	*Koefisien*	*R Kuadrat*	*T-Statistik*
(1) Biaya Operasi / Penerimaan Operasi	-0,101	0,77	-4,4
Rasio Utang terhadap Pinjaman	0,031		1,7
Permintaan & Tabungan Simpanan / total Tabungan	0,060		2,8
Total Aktiva (sebagai proksi ukuran bank)	-2.787		-2,3
Biaya Operasi	3,220		2,6
(2) Biaya Operasi / Penerimaan Operasi	-0,094	0,72	-4,1
Rasio Utang terhadap Pinjaman	0,055		2,9
Permintaan & Tabungan Simpanan / total Tabungan	0,053		2,5
Total Kredit (sebagai proksi ukuran bank)	-1,975		-1,7
Biaya Operasi	2,408		2,0
(3) Rasio Utang terhadap Pinjaman	0,045	0,94	2,8
Permintaan & Tabungan Simpanan / total Tabungan	0,077		4,4
Biaya Operasi	2,878		2,7
Total Kredit (sebagai proksi ukuran bank)	-2,756		-2,9

Grafik 45: Catatan inflasi di Indonesia lebih tinggi dan cepat berubah dibanding negara-negara lainnya …
(perubahan CPI bulanan dalam persen tahun-ke-tahun)

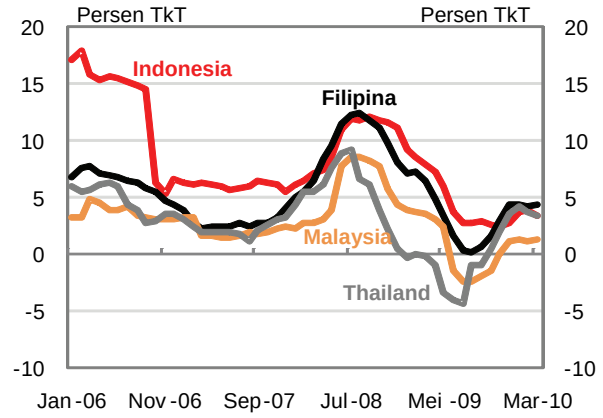

Sumber: CEIC

Grafik 46: …seperti juga dialami oleh yield obligasi pemerintah Indonesia
(yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal dalam persen)

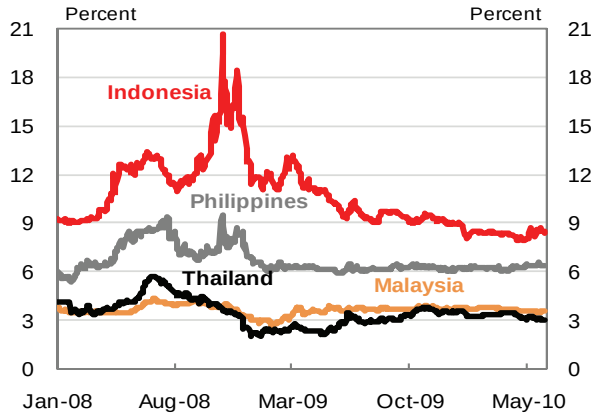

Sumber: BI dan CEIC

2. Bagaimana Deflator PDB menyimpang dari IHK pada akhir tahun 2000an, dan apa artinya terhadap proyeksi penerimaan pemerintah

a. Harga investasi yang lebih tinggi telah membuka dua pengukur harga utama di Indonesia

IHK biasanya digunakan sebagai pengukur pertumbuhan harga dalam suatu ekonomi, bagaimanapun bukan merupakan suatu pengukur yang lengkap

Sebagian besar pengamat menggunakan indeks harga konsumen (IHK) sebagai pengukur laju pertumbuhan harga pada suatu ekonomi. Indeks ini mewakili rata-rata harga gabungan konsumsi rata-rata konsumen perkotaan (dengan pembobotan jumlah belanja mereka). IHK memberikan Grafikan yang cukup baik akan laju pertumbuhan biaya hidup, akan tetapi belanja yang dilakukan oleh konsumen perkotaan tidak cukup memberikan Grafikan yang lengkap atas pengeluaran dalam suatu ekonomi. Harga-harga barang hulu di rantai produksi, yang mempengaruhi profitabilitas produsen, tekanan harga masa depan, dan persaingan global, pada umumnya lebih bervariasi dari hanya harga akhir konsumen, karena harga akhir konsumen menyertakan marjin pengecer dan distributor yang umumnya stabil. IHK tidak secara langsung memperhitungkan biaya investasi dalam peralatan & mesin untuk wirausahawan, atas pemberian jasa pemerintah, dan paling banyak mencerminkan pergerakan dalam harga impor dan ekspor secara tidak langsung. Indeks-indeks harga kulakan atau produsen (WPI atau PPI) mencoba untuk melaporkan pergerakan harga-harga tersebut.

Harga implicit yang tersirat dalam deflator neraca nasional menawarkan pengukuran harga-harga yang lebih luas

Neraca nasional mencerminkan harga-harga yang terjadi di hulu di dalam proses produksi dan juga yang terjadi di konsumen. Beberapa ahli statistik mencoba melaporkan hal tersebut secara eksplisit dengan menampilkan indeks-indeks, bersama-sama dengan indikator *neraca nasional* lainnya. Tetapi walaupun mereka tidak dilaporkan, mereka tetap tersirat di dalam pos yang ada sebagai rasio nilai nominal dan nilai riil dalam neraca nasional berdasarkan pengeluaran ataupun produksi. Pengukuran nominal mencerminkan jumlah pengeluaran dalam mata uang lokal yang berlaku (umumnya pada harga pasar) sementara pengukuran riil melaporkan volume produksi. Rasio produksi nominal terhadap riil memberikan indeks harga-harga dalam sektor tersebut – deflator harga implisit (IPD).

…dan memperkaya analisa tentang pergerakan harga sektoral

IPD membantu menjawab banyak pertanyaan. Pada tingkat agregat dan per sektor, IPD menjelaskan pertumbuhan dalam nilai kegiatan di atas pertumbuhan pada tingkat kegiatan riil (seperti pertumbuhan dalam nilai sektor manufaktur kira-kira sama dengan pertumbuhan dalam volume keluaran dan peningkatan harga keluaran tersebut); Pemahaman akan sumber-sumber pertumbuhan nominal sangat penting untuk melakukan analisa, misalnya, kemungkinan pertumbuhan dalam penerimaan kena pajak dalam sektor tersebut. IPD juga menunjukkan pergerakan harga relatif, yang berimplikasi pada pengukuran daya saing dan sebagai acuan bagi para manajer mengenai faktor-faktor produksi. Sebagai contoh bila IPD untuk sektor pertambangan tumbuh lebih cepat dari sektor manufaktur, ini mencerminkan bahwa harga barang-barang hasil pertambahan tumbuh lebih cepat pertumbuhan yang lebih cepat, dan berimplikasi pada lebih banyaknya sumber daya – baik pekerja ataupun investasi – yang dibutuhkan secara relatif untuk dialirkan ke sektor ini (pertambangan). Sedemikian pula, bila pertumbuhan harga output di satu sektor yang lebih cepat dibanding dengan upah yang dibayarkan kepada pekerjanya maka manajer mendapatkan sinyal untuk menerima lebih banyak pekerja dan membuat produksi di sektor tersebut lebih padat karya. Di saat yang sama, jika upah meningkat lebih cepat dari IHK (atau deflator konsumsi swasta), para pekerja akan dapat membeli lebih banyak dengan pendapatan mereka, menikmati peningkatan standar hidup.

Secara teknis, IPD neraca nasional mungkin merupakan ukuran harga yang lebih baik dibanding indeks harga konsumen atau kulakan. Sebagian besar badan-badan statistik (termasuk BPS) menghitung IHK sebagai suatu indeks Laspeyres, yang memperlakukan pola pembelanjaan sebagai konstan pada suatu titik waktu. Bobot pembelanjaan kemudian dianggap konstan sepanjang berlangsungnya indeks. Hal ini gagal untuk memperhitungkan substitusi konsumen dari pengeluaran untuk barang-barang dengan harga yang meningkat relatif cepat menuju barang-barang dengan harga yang relatif lebih stabil. Pada banyak negara (tetapi belum di Indonesia), ahli statistik menyusun PDB riil dengan memperbaharui jumlah-jumlah dan harga-harga masukan atau keluaran dalam suatu sektor setiap periode, sehingga memungkinkan perubahan dalam pola belanja. Dengan berjalannya waktu, substitusi pengeluaran ini akan akan memperlemah pertumbuhan deflator disbanding dengan IHK, dimana IHk ternyata IHK lebih mencerminkan laju pertumbuhan biaya hidup. (Kenyataannya indeks-indeks harga dan

IPD Indonesia tidak akan menyimpang seperti demikian karena neraca nasional Indonesia belum memungkinkan terjadinya substitusi jenis ini di dalam pola belanjanya – walau dalam praktiknya IHK sebenarnya telah melampaui IPD konsumsi swasta.)

Hubungan antara IHK dan harga keseluruhan ekonomi di Indonesia melemah sejak tahun 2004, dengan Deflator PDB berada di depan IHK

Pada paruh kedua tahun 2000an, IHK Indonesia bertumbuh lebih lambat dibanding Deflator PDB, dengan meningkatnya kecepatan Deflator PDB sementara harga konsumen tetap mempertahankan laju pertumbuhan mereka yang rata-rata (Grafik 47). Ekonomi nominal akan menjadi sekitar sepertiga lebih kecil jika hanya berkembang sesuai laju harga-harga konsumen antara tahun 2005 dan 2010. Cakupan Deflator PDB yang lebih luas tampaknya banyak menjelaskan hal ini, terutama cakupan barang-barang investasinya.

Laju pertumbuhan deflator investasi berlipat dua pada paruh kedua tahun 2000an, dan hal ini mendorong Deflator PDB ke atas IHK

Di antara IPD pengeluaran PDB, hanya harga investasi yang meningkatkan kecepatan pada paruh kedua tahun 2000an; yang lain bertumbuh pada laju yang mendekati tingkatan mereka di tahun 2000-04 (Grafik 48). Pertumbuhan tahunan deflator investasi yang dirata-ratakan mencapai hampir 9 persen pada paruh pertama tahun 2000an, tetapi telah berlipat dua menjadi 18 persen pada paruh kedua dan hal ini mendorong Deflator PDB dari rata-rata laju pertumbuhan tahunan sebesar 9 persen (2000-2004) menjadi 13 persen (2005-2010T1). Karena inflasi IHK hanya berubah sedikit antar periode, suatu celah yang makin melebar muncul di antara kedua pengukur harga.

Grafik 47: Harga-harga keseluruhan ekonomi telah melewati indeks harga konsumen sejak pertengahan tahun 2000an…
(perubahan persentase tahun-ke-tahun)

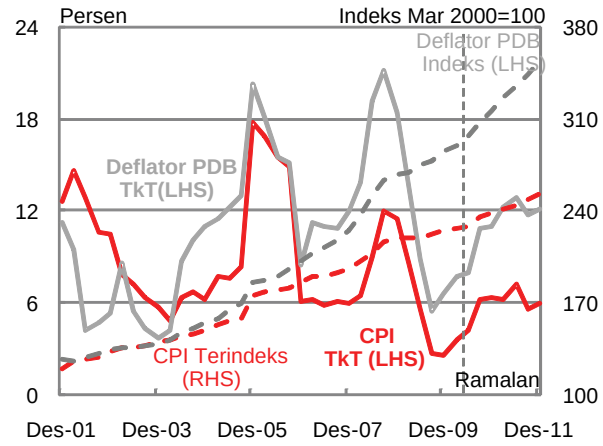

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Grafik 48: …umumnya karena percepatan dalam harga-harga investasi
(rata-rata persentase pertumbuhan tahunan)

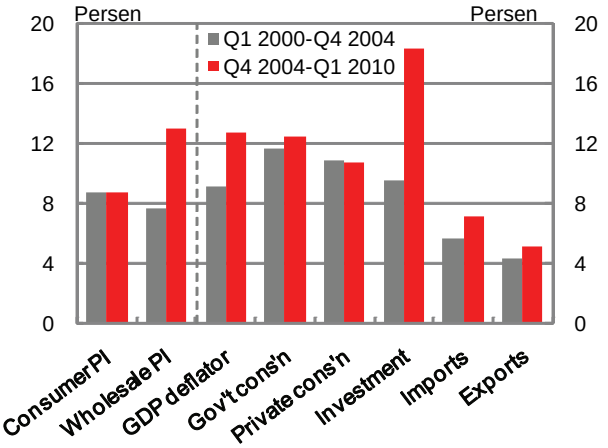

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Biaya masukan konstruksi yang lebih tinggi mendorong makin tingginya harga investasi

Peningkatan kecepatan harga-harga investasi pada paruh kedua tahun 2000an tampaknya disebabkan oleh biaya konstruksi (sekitar empat per lima keseluruhan investasi dihabiskan pada konstruksi), dan kemudian, untuk peningkatan yang tajam bagi biaya masukkan ke konstruksi. (Grafik 49) Antara tahun 2005 dan puncaknya harga-harga komoditas dunia pada pertengahan tahun 2008, harga logal dunia meningkat pada rata-rata yang disetahunkan sebesar 28 persen, dan harga batu bara (yang digunakan dalam produksi semen) meningkat sebesar 34 persen. (Grafik 50) Sementara harga semen meningkat rata-rata sebesar 8 persen pada periode tersebut, terdapat periode dengan peningkatan yang jauh lebih tinggi, seperti peningkatan sebesar 40 persen pada tahun hingga Desember 2008. Upah-upah di industri semen juga meningkat tajam pada tahun-tahun tersebut. (Grafik 50) Lebih penting lagi, Indonesia melakukan deregulasi atas harga-harga bahan bakar industri dalam negeri pada awal tahun 2005, dan harga-harganya melonjak hampir empat kali lipat antara awal tahun 2005 dan menjelang akhir tahun 2006, mempengaruhi biaya-biaya industri manufaktur yang menggunakan bahan bakar tersebut. (Grafik 50) Satu-satunya pengecualian perpisahan antara IHK dan Deflator PDB adalah pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006 ketika harga bahan bakar yang diatur (digunakan oleh rumah tangga) dinaikkan sebesar 100 persen. (Grafik 47 dan Grafik 49)

Grafik 49: Celah antara Deflator PDB dan IHK didorong oleh harga investasi yang lebih tinggi dengan biaya konstruksi yang lebih tinggi …
(persentase poin perbedaan antara pertumbuhan tahun-ke-tahun dalam Deflator PDB dan IHK (LHS), dan persentase perubahan tahun-ke-tahun (RHS))

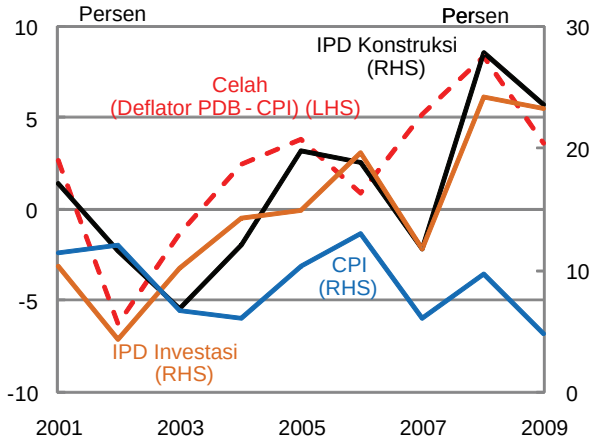

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Grafik 50: …yang meningkat kecepatannya karena peningkatan biaya masukkan yang merata selama ledakan harga komoditas dunia
(persentase poin perbedaan antara pertumbuhan tahun-ke-tahun dalam Deflator PDB dan IHK (LHS), dan persentase perubahan tahun-ke-tahun (RHS))

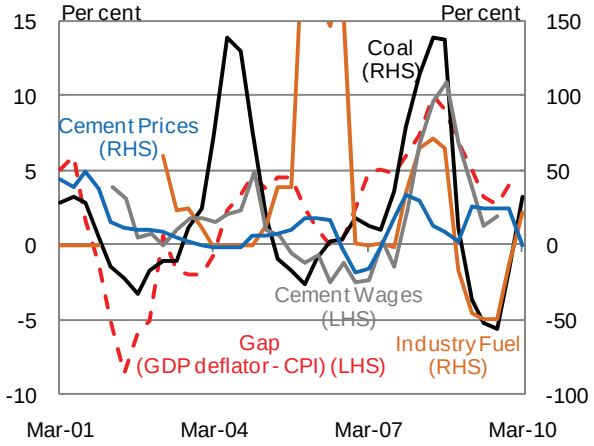

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Penguatan biaya konstruksi relatif terhadap harga-harga lainnya dalam ekonomi di proyeksikan akan berlanjut di sepanjang tahun 2010 dan 2011

Celah antara pertumbuhan Deflator PDB dan inflasi IHK inflation, yang telah menyempit pada tahun 2009 dan awal tahun 2010, diperkirakan akan melebar kembali pada sisa tahun 2010 dan tahun 2011. Harga-harga konstruksi dan investasi diperkirakan akan tetap lebih peka terhadap harga komoditas yang lebih tinggi dari harga konsumen, harga-harga komoditas dunia diperkirakan akan tetap bertahan pada tingkat pertengahan tahun 2010, cukup jauh di atas rata-rata harga tahun 2009, sementara permintaan konstruksi dapat makin meningkat.

b. Deflator PDB adalah pengukur yang lebih lengkap bagi harga-harga yang relevan untuk peramalan penerimaan pemerintah, dan dengan percepatannya pada setengah dekade yang lalu, dapat memberikan Grafikan yang lebih akurat untuk keseimbangan anggaran

Peramalan penerimaan pemerintah membutuhkan ramalan yang baik mengenai landasan penerimaan yang relevan

Penerimaan pemerintah, dikumpulkan melalui pungutan pajak dan bukan pajak dan retribusi atas nilai kegiatan, profit, omset dan sebagainya, merupakan suatu konsep nominal. Peramalan penerimaan membutuhkan ramalan landasan ekonomi yang akurat tempat penerimaan tersebut dipungut, selain sarana yang kuat untuk menghubungkan pergerakan pada landasan tersebut dengan perubahan dalam penerimaan. Pada waktunya, peramalan pergerakan nominal dalam landasan yang relevan membutuhkan peramalan atas tingkat operasi sebenarnya dan perubahan dalam nilai atau harga dari landasan tersebut.

Ketika konsumen dan harga-harga keseluruhan ekonomi bergerak bersama, pemilihan pengukuran harga untuk meramalkan pertumbuhan dalam landasan pajak tidak terlalu berpengaruh; setelah tahun 2004, ketika Deflator PDB mengalami percepatan meninggalkan pertumbuhan IHK, peramalan pertumbuhan ekonomi nominal berdasarkan ramalan inflasi IHK secara sistematis dibiaskan ke bawah. Merendahkan ramalan pertumbuhan ekonomi nominal berarti pertumbuhan pada landasan pajak, sehingga penerimaan pemerintah juga diramalkan terlalu rendah, dan hal ini telah terlihat pada penerimaan pemerintah Indonesia, dengan defisit anggaran, proyeksi-proyeksi pada paruh kedua tahun 2000an, terutama pada tahun-tahun ketika celah antara pertumbuhan dalam Deflator PDB dan inflasi IHK berukuran cukup besar.

Pertumbuhan Deflator PDB lebih dekat hubungannya dengan pertumbuhan penerimaan pemerintah dibanding dengan inflasi IHK

Hubungan antara penerimaan pemerintah dan dua pengukuran pertumbuhan harga, inflasi IHK dan pertumbuhan Deflator PDB growth. Seluruh penerimaan telah bergerak lebih dekat dengan pertumbuhan ekonomi riil yang digembungkan oleh Deflator PDB dibanding dengan pertumbuhan ekonomi riil yang digembungkan oleh IHK. (Tabel 4)

Tabel 4: Pertumbuhan dalam PDB riil yang digembungkan oleh Deflator PDB lebih menyamai pertumbuhan dalam penerimaan pemerintah, terutama penerimaan pajak, dibanding ketika digembungkan dengan IHK

(akar rata kuadrat[2] dari penerimaan pemerintah sebenarnya, persentase perubahan tahun 1994-2009)

	Persentase poin peningkatan hubungan deflator PDB		
	1994-2009	1994-2004	2005-2009
Jumlah penerimaan	**10**	**13**	**7**
Penerimaan pajak	26	24	27
Penerimaan bukan pajak	2	4	0

Sumber: Bank Dunia

Perbedaan antara IHK dan Deflator PDB menyebabkan variasi yang berarti dalam perkiraan penerimaan pemerintah

Pemilihan penggunaan Deflator PDB atau IHK sebagai pengukur harga untuk pertumbuhan ekonomi nominal memiliki dampak yang cukup berarti atas pertumbuhan dan ketepatan proyeksi-proyeksi penerimaan pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan pendekatan ekonometrik sederhana untuk meramalkan penerimaan pemerintah menurut kedua pengukur harga, yang mengatur determinan-determinan penerimaan yang lain. Satu-satunya perbedaan antara dua pendekatan tersebut adalah rangkaian nominal PDB; pendekatan pertama menghitungnya dengan menggunakan Deflator PDB sementara pendekatan kedua menggunakan IHK. Hanya dengan mengubah rangkaian PDB, dampak dari Deflator PDB berbanding dengan IHK pada perkiraan penerimaan dapat langsung diamati untuk dibandingkan dengan catatan realisasi yang terjadi.

Kekuatan ramalan dari model yang sama disempurnakan dengan menggunakan pertumbuhan dalam Deflator PDB ke tingkat kegiatan ekonomi, dan bukan menggunakan inflasi IHK. (Tabel 4) Hal ini berlaku untuk penerimaan pajak dan bukan pajak, tetapi penerimaan pajak mendapatkan manfaat terbesar dari penggunaan Deflator PDB karena mereka cenderung lebih memiliki korelasi yang bersamaan waktunya dengan kegiatan ekonomi ketika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak, yang mana landasan pajak yang relevan adalah pergerakan harga komoditas dan harapan produksi. Hubungan penerimaan pajak yang lebih erat ditunjukkan dengan peningkatan persentase poin yang relatif lebih tinggi dalam proyeksi penerimaan dalam menggunakan Deflator PDB untuk menggembungkan kegiatan ekonomi agregat (pengecualiannya adalah 'pajak bumi dan bangunan' dan 'pajak lain'). (Tabel 5) Secara umum, penggunaan Deflator PDB meningkatkan kesalahan absolut, dinyatakan sebagai persentase jumlah penerimaan pajak, sekitar 2 persen sejak 1995. (Grafik 51) Di tahun 2008, dengan percepatan yang berarti dalam Deflator PDB dibandingkan dengan inflasi IHK, penggunaan Deflator PDB memberi peningkatan 6 persentase poin relatif dibandingkan dengan model IHK. Di tahun 2004 dan 2007 metodologi IHK memberikan hasil yang lebih akurat, seperti ditunjukkan dengan nilai negatif pada (Grafik 52), yang dapat mencerminkan perubahan kebijakan pada tahun-tahun tersebut.

[2] Kesalahan akar rata kuadrat meringkas perbedaan antara dua rangkaian pada sejumlah pengamatan. Pemangkatan kesalahan-kesalahan meningkatkan beban pada kesalahan yang lebih besar, dan memungkinkan penjumlahan kesalahan positif dan negatif, dan menghitung akar pangkat duanya mengubah indikator kembali ke unit yang sedang diamati, dalam hal ini tingkat pertumbuhan tahunan dari penerimaan.

Tabel 5: Lintas item-item penerimaan pajak, penggunaan Deflator PDB memberi peningkatan terbesar dalam peramalan penerimaan yang paling berhubungan erat dengan harga-harga komoditas
(perkiraan 1994-2009*; perubahan poin persentase dalam kesalahan akar rata kuadrat)

	Persentase poin peningkatan pendekatan deflator PDB		
	1994-2009	1994-2004	2005-2009
Pajak penghasilan: Minyak & gas	55	42	121
Pajak penghasilan: Non-minyak & gas	20	26	5
PPN	16	-20	29
Pajak bumi & bangunan	-3	-3	-5
Bea pajak bumi & bangunan	7	11	5
Cukai	17	30	2
Lain-lain	-7	-4	-14
Impor	12	2	60
Ekspor	6	55	-17

* 'Bea atas pemindahan tanah & bangunan' di mulai pada tahun 1998. Sumber: Bank Dunia

Grafik 51: Penggunaan Deflator PDB meningkatkan peramalan seluruh penerimaan pajak sebesar, secara rata-rata, hampir 2 persentase poin secara keseluruhan, terutama ketika pertumbuhan dalam Deflator PDB meningkat di depan inflasi IHK
(peningkatan dalam penjumlahan kesalahan absolut dalam peramalan setiap penerimaan pajak dalam pergerakan dari model IHK menjadi Deflator PDB)

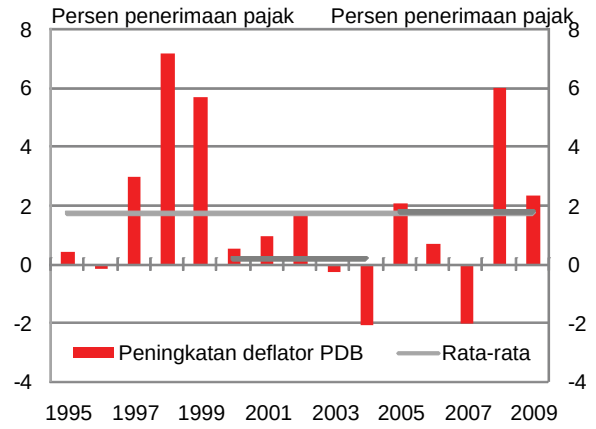

Sumber: Perkiraan Bank Dunia

Grafik 52: Pemilihan pengukur harga untuk pertumbuhan nominal memberi dampak yang cukup berarti terhadap proyeksi penerimaan
(persentase perubahan tahunan)

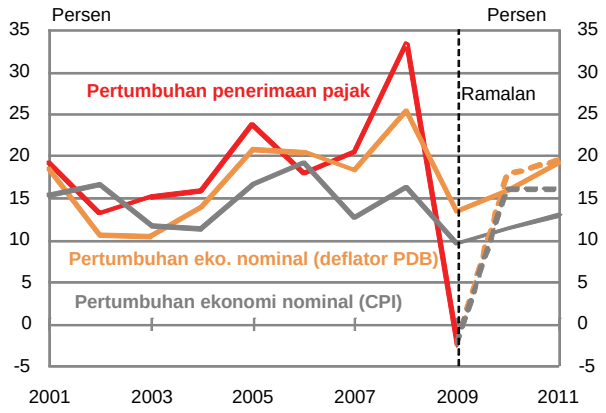

Sumber: Depkeu, Bank Dunia

Analisa ini mengusulkan bahwa penerimaan pemerintah Indonesia bisa lebih kuat di tahun 2010 dan 2011

Untuk ramalan penerimaan tahun 2010 dan 2011, dengan proyeksi Deflator PDB umumnya mengalami percepatan meninggalkan inflasi IHK, proyeksi pertumbuhan PDB nominal dengan Deflator PDB menghasilan perkiraan penerimaan pajak yang lebih besar dari proyeksi yang menggunakan ramalan inflasi IHK. Proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak saja diperkirakan memiliki masing-masing 1,6 dan 3,4 persentase poin lebih tinggi dengan menggunakan model Deflator PDB di tahun 2010 dan 2011. (Grafik 52) Perbedaan itu sama dengan sekitar Rp 10,3 triliun dan Rp 37,5 triliun masing-masing, dalam penerimaan. Celah antara kedua peramalan melebar di tahun 2011, karena penyimpangan dalam proyeksi ukuran ekonomi nominal (mencerminkan ramalan pertumbuhan berjalan yang lebih cepat dalam Deflator PDB dibanding inflasi IHK) menjadi lebih lebar.

3. Pergerakan harga komoditas yang besar dan sulit diramalkan… ternyata mempunyai peran terhadap pertumbuhan, inflasi dan pendanaan masyarakat di Indonesia

Ekonomi Indonesia sebagian besar bergantung pada produksi, konsumsi dan perdagangan komoditas, tak ayal, pergerakan harganya memiliki dampak yang besar pula

Kali ini komoditas memainkan peran yang penting dalam ekonomi Indonesia. Produksinya memiliki andil cukup berarti pada ekspor dan nilai tambah ekonomi, dan pada kapitalisasi pasar saham. Pajak-pajak dan beban produksi ini memberikan penerimaan pemerintah yang cukup besar, dan merupakan sumber dari kebanyakan kekayaan pribadi. Dan sebagian besar belanja konsumen – terutama konsumen yang lebih miskin – adalah pada produk-produk komoditas. (Tabel 6 dan Grafik 53)

Pentingnya hal di atas berikut sifat dasar komoditas yang mudah diperdagangkan, keduanya makin membuka ekonomi Indonesia terhadap pengaruh harga-harga komoditas dunia. Pengaruh tersebut seringkali cukup besar. Harga-harga komoditas dianggap sebagai salah satu harga yang paling cepat berubah di pasar-pasar internasional, dengan pergerakan yang lebih besar dari kurs tukar mengambang utama atau keseluruhan indeks-indeks pasar saham. Pada sepertiga dari periode 12 bulan antara tahun 1990 dan awal 2010 harga-harga komoditas non-energi sekurang-kurangnya bergerak 15 persen, dan harga-harga komoditas energi meningkat dan menurun setidaknya sebesar 31 persen (deviasi standar dari persentase perubahan pada rata-rata harga tahun tersebut hanyalah sedikit lebih rendah).

Tabel 6: Produksi, penjualan dan konsumsi komoditas penting bagi ekonomi Indonesia

Reasons	Annual
1. **Share of aggregate value added**	26%
2. **Share of total exports**	63%
3. *Share of GDP*	14%
4. **Share of total imports**	34%
5. *Share of GDP*	6%
6. **CPI weight (raw foods, h/hold energy)**	48%
7. *Poverty Basket CPI*	74%
8. **Share of total Government revenues**	23%
9. *Share of tax revenues*	8%
10. **Market capitlisation of Commodity shares on IDX***	18%

Sumber: ISE, CIEC, BPS, MoF, Forbes

Grafik 53: …dibanding pengaruh komoditas terhadap negara-negara tetangganya
(pangsa ekspor komoditas di tahun 2009)

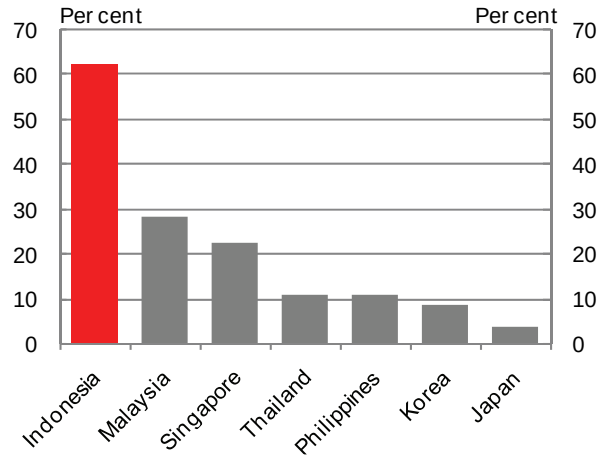

Sumber: CIEC

a. Harga-harga komoditas selalu berubah dan sulit diramal

Pergerakan harga komoditas yang selalu berubah dan rentan terhadap kejutan, membuatnya sulit diramal, sehingga revisi proyeksi secara berkala perlu dilakukan

Permintaan dan penawaran komoditas pada umumnya sangat tidak elastis, setidaknya dalam jangka pendek. Artinya pergerakan harga yang besar akan mengikuti gangguan-gangguan yang relatif kecil terhadap penawaran (kondisi pertumbuhan yang buruk, gangguan kepada mata rantai penawaran utama) dan terhadap permintaan (percepatan yang tidak diperkirakan atau kemerosotan kegiatan ekonomi di pasar-pasar konsumsi utama, perubahan pada harga-harga aktiva keuangan lainnya, terutama dolar Amerika, atau preferensi investasi peserta pasar keuangan). Selalu berubah dan mudah terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan menyulitkan upaya peramalan harga komoditas. Bank Dunia selalu melakukan penyesuaian besar secara berkala terhadap perkiraan harga komoditas energi dan non-energi, sementara proyeksi harga minyak Goldman Sachs yang dibuat pada bulan Maret 2008 yang meramalkan harga minyak meroket hingga 200 dolar Amerika per barel di tahun 2009 merupakan suatu contoh ramalan harga komoditas yang luar biasa keliru (harga minyak jatuh ke 30 dolar Amerika/barel di bulan Desember 2008 dan harga rata-ratanya di tahun 2009 hanya sedikit di bawah 60 dolar Amerika). (Grafik 54 dan Grafik 55)

Grafik 54: Revisi ramalan Bank Dunia tahun 2010 dan 2011 untuk Indeks Harga Energi
(persentase perubahan dari ramalan yang lalu)

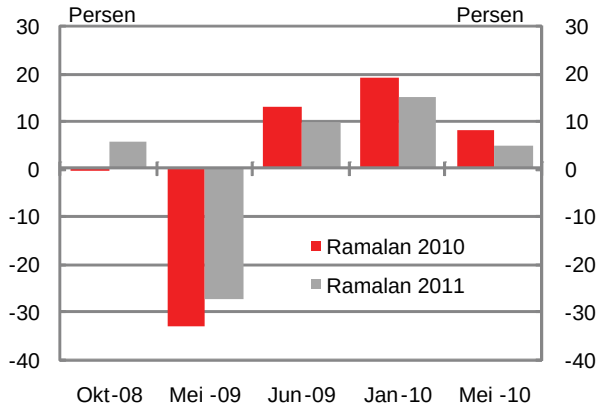

Sumber: Bank Dunia

Grafik 55: Revisi ramalan Bank Dunia tahun 2010 dan 2011 untuk Indeks Harga Non-Energi
(persentase perubahan dari ramalan yang lalu)

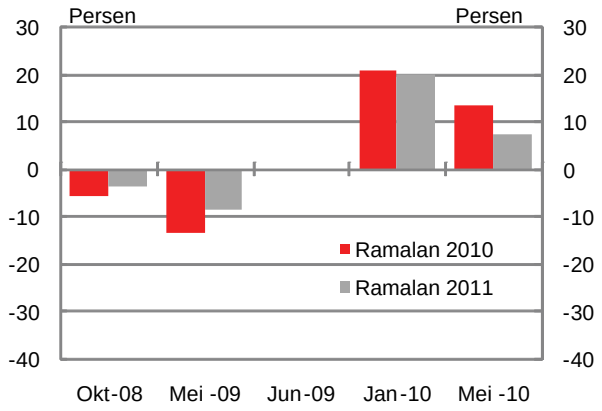

Sumber: Bank Dunia

Dengan ketidakpastian membayangi ramalan harga komoditas, rasanya perlu mempertimbangkan skenario alternatif berdasarkan catatan perubahan yang terjadi

Pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan, terutama di negara-negara yang cepat berkembang menjadi negara industri, telah membawa pembaruan permintaan komoditas, dan bersamaan dengan itu, perkiraan harga yang lebih tinggi. Dalam empat bulan pertama tahun 2010, jumlah proyeksi harga komoditas Bank Dunia untuk tahun 2010 dinaikkan 28 persen dan 21 persen, masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011 untuk harga energi, dan masing-masing 37 persen dan 28 persen untuk harga non-energi. Tetapi sewaktu ramalan yang telah direvisi menjadi lebih kuat ini diterbitkan pada awal bulan Mei, pasar keuangan dunia memuncak lagi dan ketidakpastian akan ramalan ekonomi dunia makin meningkat.

Sehubungan dengan itu patut dipertimbangkan arti dari variasi harga komoditas dari proyeksi dasar sesuai catatan jumlah tipikal bagi ramalan ekonomi Indonesia. Suatu 'kejutan kecil' meningkatkan atau menurunkan harga-harga energi dan non-energi sebesar 15 persen pada tiga triwulan terakhir tahun 2010 dan mempertahankan harga-harga pada tingkat ini pada tahun 2011; skenario 'kejutan besar' akan melipatduakan pergerakan tersebut. (Grafik 56 and Grafik 57)

Penekanannya adalah jangka pendek, dampak langsung terhadap variabel utama yang patut diperhatikan – keseimbangan umum dan tanggapan terstruktur terhadap pergeseran harga relatif tidak diperhitungkan di sini.[3] Dampak-dampak jangka pendek ini diramalkan dengan menggunakan rangkaian standar model perbedaan pertama OLS yang disingkat yang digunakan dalam menyusun proyeksi yang disajikan dalam Bagian A dari Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia. Analisa ini juga tidak menyertakan dampak yang mungkin terjadi dari pergerakan harga komoditas terhadap harga-harga lain, terutama kurs tukar mata uang – hubungannya dapat memiliki tingkat kesulitan yang serupa seperti pergerakan harga komoditas itu sendiri, dan juga merupakan tuas kebijakan dari bank sentral.

[3] Perkiraan yang lebih rinci mengenai dampak kejutan harga komoditas terhadap struktur ekonomi Indonesia, kesejahteraan ekonomi agregat, distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dapat ditemukan dalam laporan Bank Dunia (2010) "Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Komoditas Prices: Implications for Indonesia" Bab 5 oleh Peter Warr, Rina Oktaviani, Enrique Aldaz-Carroll dan Leonardo Iacovone.

Grafik 56: Skenario-skenario ramalan harga energi *(Tingkatan indeks)*

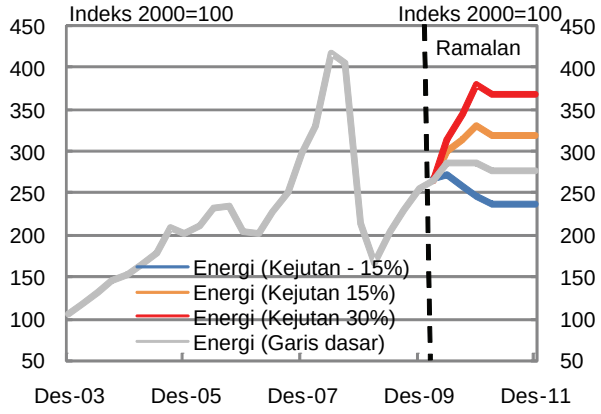

Sumber: Bank Dunia

Grafik 57: Skenario-skenario ramalan harga non-energi *(Tingkatan indeks)*

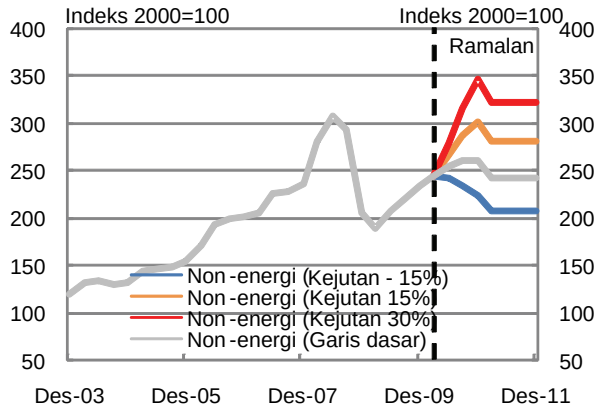

Sumber: Bank Dunia

b. Fluktuasi harga-harga komoditas ternyata tidak hanya mempengaruhi harga-harga dan ekonomi nominal dalam jangka pendek tapi juga mendapat respon dari beberapa kegiatan di sektor riil

Pergerakan harga komoditas memberikan dampak terbesar pada harga keseluruhan ekonomi, yaitu tingkat kegiatan nominal dan penerimaan pemerintah, dan pada harga-harga konsumen. Dampak belanja pemerintah lebih kecil dibanding dampak terhadap penerimaan. Terdapat tanggapan yang umumnya positif dalam kegiatan riil, bahkan dalam jangka waktu singkat dari analisa ini, dan tanggapan ini tampaknya lebih dari cukup untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup bagi rumah tangga yang lebih miskin, sehingga memperkecil tingkat kemiskinan.

Tabel 7: Dampak kejutan harga komoditas pada indikator kemiskinan dan ekonomi utama

	2010				2011			
	-15%	Dasar	15%	30%	-15%	Dasar	15%	30%
Ekspor	14,3	**15,0**	15,6	16,2	10,5	**11,1**	11,7	12,3
Impor	18,7	**18,3**	17,9	17,5	11,9	**11,6**	11,4	11,2
Neraca Perdagangan	14,3	**14,2**	13,6	13,2	16,7	**13,2**	9,1	5,3
PDB	5,8	**5,9**	6,0	6,1	6,1	**6,2**	6,4	6,5
Deflator PDB	9,3	**9,3**	9,9	10,2	11,5	**12,2**	13,2	13,9
PDB Nominal	15,7	**15,9**	16,5	16,9	18,3	**19,2**	20,4	21,3
CPI	5,0	**5,1**	5,3	5,5	6,0	**6,3**	6,5	6,7
Inflasi inti	4,2	**4,3**	4,5	4,7	5,8	**6,0**	6,1	6,3
CPI kemiskinan	6,5	**6,8**	7,1	7,4	6,8	**7,2**	7,5	7,8
Tingkat kemiskinan	13,2	**13,0**	12,9	12,8	12,4	**12,2**	12,0	11,9

Sumber: Bank Dunia

Peningkatan harga komoditas hanya berdampak ringan kepada PDB

PDB dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh pergerakan harga-harga komoditas. Jalur langsung mempengaruhi melalui perubahan produksi atau investasi karena perubahan-perubahan dalam profit yang diperkirakan oleh perusahaan. Peningkatan harga-harga komoditas dapat mendorong peningkatan produksi, dan peningkatan investasi oleh perusahaan-perusahaan produsen komoditas untuk memanfaatkan kenaikan harga. Akan tetapi, jika sebagian besar biaya masukan perusahaan adalah berupa komoditas, maka peningkatan harga komoditas dapat meninggikan harga akhir produk tersebut dan menurunkan permintaan, yang akhirnya akan menyebabkan penurunan nilai tambah. Industri-industri yang berhubungan dengan

pertambangan meningkatkan produksi dan ekspor, sementara industri-industri dengan masukan komoditas yang tinggi, seperti konstruksi, dapat memangkas produksi karena tingginya harga masukkan. Secara keseluruhan bahkan pergerakan deviasi standar penuh (skenario kejutan 'besar') dalam harga komoditas mengakibatkan peningkatan langsung yang rendah pada pertumbuhan PDB, sebesar 0,2 poin persentase dalam jangka waktu dekat, dan sedikit lebih besar di tahun 2011, setelah produksi memiliki lebih banyak waktu untuk menanggapi harga-harga yang baru.

Tingginya ekspor bersih riil masuk dalam sebuah skenario besar, dimana melambungnyaa harga membuat eksportir meningkatkan produksi dansebaliknyaimportir menyusutkan permintaannya

Ekspor dan impor Indonesia dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dunia dalam bentuk yang sedikit berbeda. Eksportir komoditas menanggapi peningkatan harga dengan meninggikan produksi, meningkatkan volume dan nilai ekspor. Beberapa importir menanggapi harga-harga komoditas yang lebih tinggi dengan menurunkan permintaan, sehingga volume turun; yang lain meminta masukan yang lebih banyak untuk sektor produsen komoditas dan untuk memasok peningkatan permintaan konsumen. Lebih lanjut, harga-harga komoditas yang lebih tinggi mendorong nilai impor Indonesia secara keseluruhan.

Kenaikan umum harga-harga komoditas energi dan non-energi, dengan lebih bergeraknya harga-harga energi dibandingkan harga non-energi, menurunkan *terms of trade* Indonesia (harga ekspor Indonesia relatif terhadap harga impornya), menyebabkan penyempitan surplus perdagangan. Hal ini terjadi karena perbedaan komposisi antara ekspor dan impor Indonesia, dan dampak dari pergerakan yang lebih besar pada harga-harga komoditas energi dibanding non-energi sesuai skenario tersebut. Sementara komoditas merupakan dua per tiga dari ekspor Indonesia, pada paruh kedua tahun 2000an ekspor minyak dan gas bumi tidak mencapai jumlah 20 persen dari keseluruhannya. Sementara itu, komoditas non-energi memiliki porsi yang lebih kecil dari keseluruhan impor, tetapi impor minyak dan gas bumi nilainya melebihi 26 persen. Dengan demikian harga-harga impor Indonesia lebih peka terhadap perubahan harga energi.

Inflasi menerima dampak, dengan jeda waktu, melalui pergerakan harga-harga pangan dunia sementara pengaturan atas harga-harga energi konsumen meredam dampak tersebut terhadap konsumen

Harga-harga konsumen dipengaruhi oleh pergerakan harga-harga komoditas melalui beberapa saluran. Yang paling langsung, biaya pangan dunia berdampak sebesar 50 persen dari rata-rata anggaran rumah tangga yang dihabiskan untuk bahan pangan (dua per tiga dari anggaran keluarga miskin). Harga-harga eceran bahan pangan cenderung bergerak beberapa bulan setelah harga dunia, terutama di daerah-daerah terpencil.[4] Grafik 27) Setelah berjalan satu tahun, peningkatan sebesar 1,0 pada harga jagung, beras, kacang kedelai, gula dan minyak goreng dunia menyebabkan peningkatan sebesar 1,0 persen pada harga-harga barang tersebut di dalam negeri.

Di tahun 2010, terdapat risiko bahwa harga-harga bahan pangan dunia akan jatuh lebih dalam dari perkiraan. Pada lima bulan pertama tahun 2010, harga gula internasional jatuh sebesar 35 persen mengikuti ramalan panen raya dunia, yang diperkirakan akan mengimbangi kelangkaan musim yang lalu. Harga beras juga turun sebesar 20 persen dan gandum turun sebesar 9 persen. Dalam hal-hal tertentu, harga-harga tersebut kini berada jauh di bawah ramalan tahun 2010. Dengan adanya jeda waktu dalam penyerapan harga pangan dunia ke harga dalam negeri, penurunan lebih lanjut sesuai dengan deviasi standar (skenario 'negatif kecil') akan menyebabkan inflasi tahun 2011 sebesar 6,0 persen, 0,3 poin persentase di bawah ramalan garis dasar. Dampak bagi tingkat inflasi keluarga miskin akan lebih besar, memangkas inflasi sebesar 0.4 poin persentase menjadi 6,8 persen di tahun 2011.

Pergerakan harga energi mendorong naiknya harga investasi dan masukan industri

Konsumen Indonesia pada umumnya cukup terlindung dari pergerakan harga energi karena terdapat sistem yang mengatur harga jual eceran energi. Deregulasi harga bahan bakar industri, ditambah dampak tidak langsung harga energi pada bahan pengganti, memiliki dampak yang lebih besar terhadap ekonomi seperti diukur oleh deflator PDB. (Lihat Bagian B-2). Kejutan harga komoditas deviasi standar yang penuh akan meningkatkan pertumbuhan deflator PDB sebesar 1 poin persentase setelah satu tahun berlalu.

[4] Varela, Aldaz – Carroll, Lacovone, Juli 2008, 'How international Price Shocks Impact Indonesia Food Prices', Catatan Teknis, Bank Dunia Indonesia

Peningkatan harga komoditas menghasilkan beberapa faktor pengimbang bagi kaum miskin; dengan penyamarataan, kejutan umum terhadap harga komoditas dapat sedikit menurunkan tingkat kemiskinan

Suatu kejutan umum terhadap harga-harga komoditas memiliki serangkaian dampak pengimbang bagi keluarga miskin. Harga pangan yang lebih tinggi menurunkan pendapatan riil, kecuali bagi beberapa keluarga miskin yang bukan produsen netto. Tetapi upah dapat meningkat lebih dari peningkatan biaya hidup, terutama bagi pekerja-pekerja di sektor yang memperoleh manfaat dari peningkatan harga-harga komoditas, khususnya yang berkecimpung dalam industri pertanian. Deviasi setengah standar yang menyamaratakan peningkatan harga-harga komoditas menghasilkan peningkatan tipis pada tingkat kemiskinan sebesar 0,1 poin persentase di tahun 2010 dan 0,2 poin persentase di tahun 2011, sejalan dgn analisa kesetimbangan umum yg dapat dihitung (CGE) atas dampak jangka pendek peningkatan harga komoditas yg terjadi antara tahun 2005 dan 2008.[5]

c. Harga komoditas yang selalu berubah mempunyai dampak yang cukup besar pada penerimaan pemerintah; pada neraca, harga yang lebih tinggi menurunkan defisit anggaran

Dengan banyaknya penerimaan pemerintah berasal dari sektor komoditas, perubahan harga akan memiliki dampak yang berarti terhadap penerimaan

Karena Indonesia merupakan produsen komoditas yang besar seperti minyak, gas dan minyak kelapa sawit (CPO), tidaklah mengherankan bila penerimaan pajak dan bukan pajak pemerintah dari sektor-sektor tersebut sangat mudah berubah. Ketika harga-harga komoditas memuncak di tahun 2008, penerimaan dari sektor sumber daya alam memberi sumbangan sebesar 32 persen dari keseluruhan penerimaan, di tahun 2009, ketika rata-rata harga energi lebih rendah sekitar 37 persen dan harga non-energi lebih rendah hampir seperempatnya, sumber daya alam hanya menyumbang 22 persen dari seluruh penerimaan pemerintah. Relatif terhadap penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak jauh lebih cepat berubah dengan 70 yang berasal dari sektor komoditas, terutama minyak dan gas bumi. Penerimaan pajak lebih tidak terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas, mendapat penerimaan dari sektor-sektor lain dan memiliki kelompok penerimaan yang lebih stabil seperti PPN dan pajak konsumsi bea dan cukai.

Penerimaan pajak menunjukkan beberapa sensitivitas terhadap perubahan harga-harga komoditas…

Penerimaan pajak dipengaruhi langsung oleh harga-harga komoditas melalui pungutan pajak pendapatan minyak dan gas bumi, profit perusahaan lain, penerimaan ekspor, dan pada tingkat yang lebih rendah dari penerimaan impor. Pertanian, pertambangan (baik migas dan non-migas) dan penggalian menyumbang 34 persen dari jumlah pajak penghasilan di tahun 2009, turun dari hampir setengah dari keseluruhan penghasilan di tahun 2008. Selain itu, hampir seluruh penerimaan ekspor berasal dari ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia, yang tarif pajaknya bergantung pada harga CPO internasional, membuat arus penerimaan yang relatif kecil ini sangat cepat berubah. Perubahan harga-harga lintas ekonomi (seperti diukur oleh deflator PDB) mempengaruhi seluruh penerimaan pajak karena pajak penghasilan, PPN, bea dan cukai akan dipungut dari pertumbuhan upah, profit dan konsumsi.

… akan tetapi, penerimaan bukan pajak jauh lebih peka terhadap fluktuasi

Penerimaan bukan pajak, yang secara umum berkisar pada sepertiga dari keseluruhan penerimaan, secara relatif lebih peka terhadap perubahan harga komoditas sehingga jauh lebih cepat berubah. (Grafik 58 dan Grafik 59 mengGrafikkan bagaimana penerimaan bukan pajak relatif lebih peka terhadap pergerakan harga komoditas pada sudut pandang peramalan.) Sebabnya adalah sekitar 70 persen dari penerimaan bukan pajak langsung berasal dari sektor sumber daya alam, terutama produksi minyak & gas, dibandingkan dengan sekitar 10 persen penerimaan pajak pada beberapa tahun terakhir. Di tahun 2009 saja, perlambatan dunia dan jatuhnya harga-harga komoditas dari puncaknya di tahun 2008, menyebabkan penurunan penerimaan bukan pajak sebesar 30,1 persen, dibanding penurunan penerimaan pajak yang hanya sebesar 2,5 persen. Sembilan puluh persen bersumber dari sektor minyak dan gas bumi, sementara sisanya umumnya merupakan kegiatan pertambangan dan kehutanan lainnya.

[5] Bank Dunia (2010) "Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Komoditas Prices: Implications for Indonesia" Bab 5 oleh Peter Warr, Rina Oktaviani, Enrique Aldaz-Carroll dan Leonardo Iacovone.

Grafik 58: Perkiraan dampak kejutan komoditas terhadap perkiraan pemerintah tahun 2010
(persen perubahan dari ramalan yang lalu)

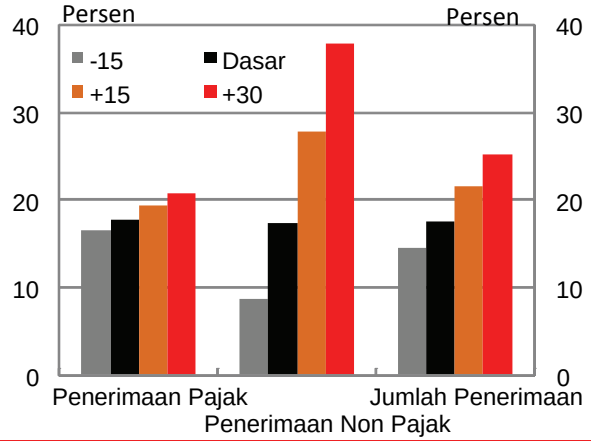

Sumber: Bank Dunia

Grafik 59: Perkiraan dampak kejutan komoditas terhadap perkiraan pemerintah tahun 2011
(persen perubahan dari ramalan yang lalu)

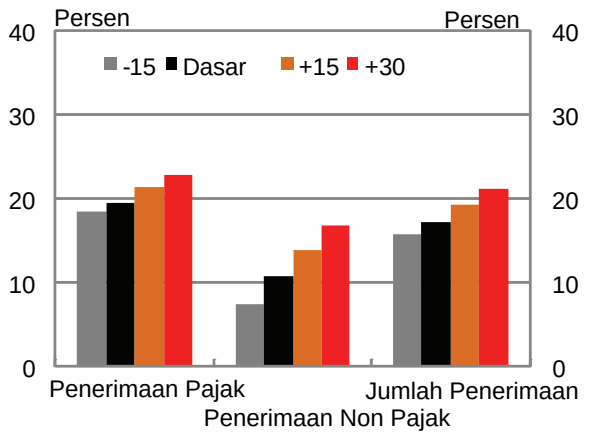

Sumber: Bank Dunia

Fluktuasi harga minyak mentah berdampak langsung terhadap belanja pemerintah pusat melalui subsidi energi dan bagi hasil

Subsidi energi dan bagi hasil penerimaan minyak dan gas bumi merupakan dua item belanja yang secara langsung dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah, dan keduanya menyerap bagian belanja pemerintah yang cukup berarti. Pada tahun 2008 subsidi energi menghabiskan lebih dari seperempat keseluruhan belanja, tetapi jumlah itu berkurang lebih dari setengahnya di tahun 2009 dengan penurunan sepertiga dari rata-rata harga minyak. Perubahan yang cepat ini menimbulkan ketidakpastian anggaran dan menghalangi perencanaan belanja. Sementara itu, golongan belanja lain yang lebih with leluasa seperti belanja materi, modal dan sosial, lebih tidak peka terhadap perubahan pada harga-harga komoditas karena mereka tidak secara otomatis berubah terhadap perubahan penerimaan di dalam suatu tahun anggaran. Sebaliknya, perubahan pada golongan belanja ini pada umumnya harus melewati proses-proses penyusunan anggaran yang panjang, yang menghabiskan banyak waktu antara pembicaraan awal dan penerapan proyek. Karena kakunya program-program belanja tersebut, peluang-peluang untuk mengubah penerimaan yang tiba-tiba tersedia menjadi program-program pembangunan pemerintah dapat terlewatkan. Di lain pihak, karena belanja pendidikan dan beberapa kiriman pemerintah daerah yang berhubungan terikat kepada keseluruhan belanja dan penerimaan pemerintah, fluktuasi dan ketidakpastian dalam besar ukuran keseluruhan anggaran menyebabkan kesulitan penyusunan perencanaan anggaran dan kemungkinan ketidakefisienan di dalam departemen pendidikan dan dalam pemerintah daerah (lihat Bagian C, Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Maret 2010).

Kejutan umum sebesar 30 persen kepada harga minyak mentah hanya akan meningkatkan belanja sekitar 4 hingga 6 persen, bila semua hal lain tidak berubah (dengan asumsi tidak ada perubahan dalam kebijakan pembelanjaan). Akan tetapi dampak langsung dari subsidi energi jauh lebih tinggi, yang meningkat sekitar 40 persen.

Kejutan positif harga komoditas mengurangi defisit anggaran, membentuk ruang fiskal

Secara keseluruhan, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan yang berarti terhadap saldo anggaran dalam hal kejutan positif terhadap harga-harga komoditas. Peningkatan penerimaan pemerintah diperkirakan akan lebih besar dari peningkatan dalam jumlah belanja pemerintah. Kejutan positif 15/30 persen kepada harga komoditas non-energi/energi akan turut menurunkan defisit anggaran sekitar 0,2 poin persentase di tahun 2010 dan 0,3 poin persentase di tahun 2011. (Tabel 8) Dengan demikian kejutan positif terhadap harga-harga komoditas membentuk ruang fiskal.

Tabel 8: Perubahan terhadap perkiraan anggaran

(persentase perubahan dari dasar, defisit anggaran dinyatakan sebagai persentase PDB)

	2010				2011			
	-15	Dasar	+15	+30	-15	Dasar	+15	+30
Jumlah penerimaan	-2,8	0,0	3,3	6,7	-4,1	0,0	5,2	9,9
- Penerimaan pajak	-1,1	0,0	1,4	2,9	-1,8	0,0	3,0	5,4
- Penerimaan non pajak	-7,5	0,0	8,9	17,5	-11,1	0,0	12,0	23,7
Belanja	-2,1	0,0	2,3	4,7	-2,7	0,0	2,9	6,1
Defisit anggaran (persen)	-1,1	-1,0	-0,8	-0,7	-0,6	-0,4	-0,1	0,1

Sumber: Perkiraan Bank Dunia

d. Kebijakan pemerintah dapat meringankan dampak perubahan harga komoditas

Indonesia dapat menerapkan kebijakan untuk meringankan dampak cepat berubahnya harga yang lebih tinggi yang menjadi sifat komoditas terhadap stabilitas makroekonomi dan terhadap populasi negara

Pengelolaan fiskal Indonesia yang berhati-hati harus dikelola untuk memperkecil kejutan-kejutan dalam parameter makroekonomi, dan untuk memungkinkan pengelolaan belanja pada waktu harga komoditas jatuh. Penyelenggaraan dana stabilisasi tidak hanya akan membantu meringankan peningkatan tekanan terhadap kurs tukar valuta tetapi juga meringankan dampak makroekonomi perubahan yang cepat dengan mencegah peningkatan belanja pada waktu ledakan komoditas. Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan stabilisasi harganya sehingga mereka menjadi lebih mudah diperkirakan, memiliki sasaran yang lebih tepat, lebih murah dan lebih efektif. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa beberapa pilihan kebijakan lebih baik dibanding yang lain dalam meringankan dampak terhadap kaum miskin. (Tabel 9) Dari sudut pandang ekspor, sangatlah penting untuk meragamkan tujuan dan produk ekspor untuk menurunkan gejolak ekspor. Pembuat kebijakan dapat menggunakan instrumen-instrumen yang menurunkan biaya-biaya transaksi, mendorong pasokan dan menurunkan gejolak harga. Instrumen seperti itu termasuk pemangkasan birokrasi untuk pengiriman barang-barang internal, yang akan menguntungkan konsumen dan produsen, dan intervensi terbatas yang menurunkan tarif dan kuota impor yang menguntungkan konsumen dengan pengorbanan dari produsen komoditas.

Kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk meringankan dampak gejolak harga bagi kaum miskin

Keluarga miskin yang merupakan konsumen netto dari komoditas-komoditas tersebut sangatlah rentan terhadap peningkatan harga yang tajam. Untuk meringankan dampak ini pemerintah memiliki berbagai pilihan kebijakan. Banyak dari pilihan ini telah dicoba oleh Pemerintah Indonesia pada waktu krisis pangan yang baru terjadi. Pada bulan Februari 2008 Pemerintah Indonesia memperkenalkan paket kebijakan untuk membantu kaum miskin untuk sementara, membantu produsen kecil dan mengendalikan inflasi harga bahan pangan. Paket itu menyertakan penghapusan tarif impor dan pajak atas kacang kedelai, subsidi langsung kepada produsen kecil makanan dari kacang kedelai, peningkatan pajak ekspor atas kelapa sawit dan minyak goreng untuk mengendalikan harga minyak goreng, program yang diperluas yang memberikan minyak goreng bersubsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah, penghapusan PPN minyak goreng, peningkatan kuota bulanan beras bersubsidi (dari 10 menjadi 15 kg) untuk 19,2 juta keluarga miskin, penghapusan tarif impor tepung, pengenduran standar fortifikasi tepung, dan penguatan peran Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tabel 9: Dampak kejutan harga komoditas pada indikator ekonomi utama, kemiskinan dan penerimaan dan belanja Pemerintah

	Kiriman ke keluarga miskin	Stabilisasi Harga Masyarakat	Transisi menuju Upaya Stabilisasi Pasar
Tanggapan langsung	• Program pemberian pangan • Meningkatkan program pembayaran tunai yang ada • Program pangan untuk kerja • Subsidi terbatas	• Menghapus pembatasan impor dan kuota makanan • Penarikan persediaan pangan	• Memangkas birokrasi dalam pengiriman barang antar daerah • Intervention terbatas dengan tarif variabel
Tanggapan jangka panjang	• Membangun program pembayaran tunai (yang Sebelumnya tak ada) atau meningkatkan targeting (bila ada)	• Meningkatkan jaringan logistik pangan • Meningkatkan prasarana desa • Meningkatkan produktivitas ladang pertanian	• Mendorong investasi dalam gudang swasta dan resi gudang • Pasar future, asuransi iklim berbasis indeks • Efisiensi pasar dalam negeri • Kontrak forward
Kebijakan yang dihindari	• Subsidi universal • Kiriman natura	• Pelarangan ekspor • Pengendalian harga	• Kuota atau pelarangan impor • Pengendalian harga

Sumber: Berdasarkan makalah yang disusun oleh Louise Cord, Eduardo Ley, Hassan Zaman, Elena Iacnchovina, C. Hull, Emmanuel Skoufias, Mark Thomas, Brian Pinto dan Tahrat Shahid

Pada jangka waktu menengah ke panjang, untuk menjadi paling efisien dalam stabilisasi harga-harga Indonesia harus menyusun kebijakan dan kelembagaan yang minim distorsi dan mendukung stabilisasi harga pasar yang lebih luas

Dalam jangka waktu menengah, pembuat kebijakan harus mendorong pengembangan instrumen berbasis pasar yang dapat bertindak sebagai pengatur keseimbangan harga. Upaya-upaya seperti ini termasuk: promosi investasi oleh sektor swasta dalam sistem pergudangan dan resi gudang; pengembangan pasar dalam negeri untuk kontrak *forward*; dan pengembangan pasar *futures* dan asuransi cuaca berbasis indeks. Sektor publik dapat mendukung pengembangan instrumen-instrumen tersebut dengan mendorong lingkungan kebijakan yang tepat dan dengan memberikan dukungan langsung untuk mengatasi kegagalan pasar pada tahap awal, selain menciptakan kepastian yang lebih besar atas peran pemerintah dalam penyeimbangan harga.

C. INDONESIA 2014 DAN SELANJUTNYA: SEBUAH PENGAMATAN SELEKTIF

1. Tantangan perubahan iklim Indonesia

Perubahan iklim adalah tantangan besar pembangunan ekonomi yang dihadapi Indonesia

Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti meningkatnya permukaan air laut, perubahan pola cuaca dan meningkatnya ketidakpastian. Dampak potensial termasuk: meningkatnya ancaman akan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian; dampak terhadap daerah pantai produktif dan mata pencaharian masyarakat; pengaruh pada cadangan air; peningkatan berjangkitnya penyakit lewat air dan nyamuk; dan kemunduran ekosistem batu karang. Perubahan-perubahan tersebut akan mengancam upaya-upaya kemajuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang telah berhasil dicapai.

Emisi gas rumah kaca Indonesia cukup mempengaruhi dunia

Bersamaan dengan itu, emisi gas rumah kaca (GHG) Indonesia cukup berarti dalam tingkatan global. Komunikasi Nasional Kedua tentang Perubahan Iklim (Desember 2009) yang baru diterbitkan oleh pemerintah melaporkan rata-rata emisi sekitar 1,66 juta gigagrams (sama dengan 1.000 ton metriks) emisi setara karbon dioksida selama periode tahun 2000-04. Perubahan penggunaan lahan dan hutan (LUCF) dan kebakaran hutan gambut merupakan penyumbang terbesar dari emisi Indonesia — lebih dari dua per tiga dari keseluruhan dalam setahun. Penggunaan energi merupakan sumber emisi kedua terbesar, akan tetapi memiliki pertumbuhan tercepat. Emisi bersumber dari sector kelistrikan tumbuh paling cepat disebabkan sebagian besar oleh perubahan pembangkit tenaga listrik menggunakan minyak menjadi batu bara. Transportasi juga merupakan konsumen bahan bakar utama, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cepat, kualitas bahan bakar yang buruk dan kurangnya investasi dalam sistem transportasi massal.

Jalur pertumbuhan energi Indonesia sekarang mengandalkan peningkatan sumber-sumber padat emisi

Emisi bahan bakar fosil per kapita Indonesia relatif rendah. Penggunaan energi per kapita tumbuh pada laju yang sebanding dengan PDB per kapita, tetapi emisi GHG per kapita ("intensitas emisi") bertumbuh lebih cepat. Artinya jalur pertumbuhan energi yang ada bergantung pada peningkatan sumber-sumber yang padat emisi, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dan makin bertambahnya penggunaan transportasi bermotor. Proyek-proyek IEA (2007) pada jalur usaha-seperti-biasa (BAU) emisi GHG bahan bakar fosil Indonesia dapat berlipat tiga pada tahun 2025.

Walaupun terdapat peluang, iklim investasi Indonesia masih merintangi pembangunan sumber daya energi alternatif swasta

Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi dengan menyelesaikan kerangka kerja kebijakan dan pengelolaan yang mengarah pada kehilangan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Indonesia juga memiliki sumber daya energi alternatif dan terbarukan yang cukup beragam, seperti panas bumi, air dan biomassa, dan juga peluang yang besar dan menarik secara ekonomi untuk menghemat energi melalui peningkatan efisiensi. Akan tetapi iklim investasi masih merupakan masalah, merintangi pembangunan sumber daya energi alternatif oleh sektor swasta.

Indonesia menyadari bahwa upaya-upaya untuk menangani perubahan iklim tidak boleh mengorbankan kaum miskin

Rencana aksi jangka menengah Pemerintah memahami bahwa perencanaan pembangunan yang baik merupakan kunci adaptasi perubahan iklim yang tepat. Kebutuhan dan perencanaan adaptasi akan menekankan pada: pengelolaan sumber daya air; pasokan sanitasi dan kesehatan air; pertanian, irigasi dan pendidikan petani; perencanaan tata ruang; pengelolaan pantai; dan pengelolaan dan persiapan manajemen risiko bencana. Dampak iklim kemungkinan besar akan menghantam secara timpang bagi kaum termiskin, pada daerah-daerah yang rentan akan kekeringan, banjir atau tanah longsor dan pada mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya alam, terutama dalam pertanian dan perikanan. Kaum miskin tidak memiliki aset dan keleluasaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, dan kehancuran yang dibawa oleh bencana alam dan cuaca ekstrim. Baik di dalam negeri maupun dunia internasional, Indonesia menekankan bahwa upaya-upaya untuk menangani perubahan iklim tidak diperkenankan untuk dilakukan bila kaum miskin menjadi korbannya.

Pemerintah memahami tantangan adaptasi

Indonesia memahami tantangan adaptasi, walaupun dibutuhkan lebih banyak penelitian dan penerapan yang konkrit. Dengan partisipasi masyarakat pada tahun-tahun mendatang, investasi Pemerintah Indonesia untuk adaptasi akan diprioritaskan pada: (a)

sektor air untuk memastikan masyarakat dapat memahami hal kelangkaan air, kekeringan atau banjir; (b) sektor kelautan dan perikanan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi tergenangnya pantai, keadaan cuaca ekstrim dan perubahan dalam produktivitas dan pembagian wilayah perikanan sebagai akibat dari perubahan suhu air laut; (c) sektor pertanian untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya kepada musim tanam/panen dan akibatnya bagi produktivitas pangan dan tanaman perkebunan; dan (d) sektor kesehatan untuk mengantisipasi meningkatnya penularan penyakit lewat nyamuk, seperti malaria dan demam berdarah, selain meningkatnya risiko penyakit saluran pernafasan dan pencernaan.

Kotak 3: Masalah Perubahan Iklim: Perubahan Penggunaan Hutan

Deforestasi yang cepat, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan degradasi lahan gambut menimbulkan emisi, menguras aset alam Indonesia, mengurangi potensi penghasil pendapatan, dan merusak sumber pencaharian masyarakat. Indonesia memancarkan gas rumah kaca (GHG) yang cukup berarti, sebagian besar berasal dari hilangnya hutan dan perubahan penggunaan lahan. Deforestasi dan kebakaran/kabut asap menurunkan potensi pembangunan Indonesia dan merusak nama baiknya di dunia internasional. Hampir seluruh deforestasi dan kebakaran hanya terjadi di 10 propinsi. Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan saja bertanggung jawab atas lebih dari setengah degradasi dan hilangnya hutan. Walaupun upaya-upaya pengukuran emisi yang lebih teliti terus berlanjut, terdapat permufakatan luas di dalam Pemerintah Indonesia bahwa kehutanan dan penggunaan lahan merupakan sasaran-sasaran mitigasi utama.

Masalah-masalah pengelolaan kehutanan dan penggunaan lahan bersifat rumit dan menantang. Penyumbang-penyumbang utama deforestasi adalah: (i) tanggung jawab politis dan hukum yang lemah; (ii) kebijakan yang lebih condong kepada usaha berskala besar dibanding usaha kecil dan menengah; (iii) distorsi insentif untuk harga dan transportasi kayu; (iv) kerangka kerja hukum yang tidak memadai untuk melindungi penduduk miskin dan penduduk asli pengguna lahan; (v) penilaian aset hutan yang terlalu rendah dan penangkapan pendapatan yang rendah; dan (vi) korupsi. Hal-hal yang mendasari tersebut menyebabkan kegiatan-kegiatan hilir meningkat yang dampaknya terlihat pada alam, juga emisi GHG dan kerugian masyarakat. Rencana apapun untuk mengubah tindakan atau memangkas deforestasi harus dipahami dengan pengertian yang lebih luas meliputi kelembagaan hulu, pengelolaan dan masalah insentif yang menyebabkan hasil-hasil hilir pada hutan dan lahan gambut. Kemajuan dalam pengelolaan hutan sangatlah penting untuk keberhasilan program REDD nasional.

Dalam menanggapi perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam hal kelembagaan, kebijakan, teknis, dana dan hukum

Akan tetapi, Indonesia menghadapi tantangan kelembagaan, kebijakan, teknis, dana dan hukum dalam menanggapi perubahan iklim. Sektor kehutanan dan energi memiliki masalah distorsi kebijakan dan pengaturan yang sudah berjalan lama dan telah dipelajari dengan baik. Deforestasi yang cepat, perambahan liar, kebakaran hutan dan degradasi lahan gambut menguras aset alam Indonesia, merusak potensi penghasil pendapatan, dan merusak sumber pencaharian masyarakat. Sektor energi Indonesia tetap menerima subsidi yang tinggi dan diatur dengan ketat, yang turut menyebabkan belanja masyarakat yang tidak efisien, merintangi investasi untuk memodernisasi sektor tersebut, dan membuat negara rentan terhadap guncangan harga energi dunia. Hal itu juga merintangi pembangunan sumber energi alternatif, seperti panas bumi, dan menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Indonesia memahami bahwa distorsi-distorsi tersebut merupakan beban yang mahal terhadap anggaran dan ekonomi. Pengelolaan yang lemah merintangi investasi, meningkatkan biaya, dan mengganggu daya saing internasional dan ketersediaan pasar (untuk kehutanan dan produk-produk lain).

Komitmen Indonesia menangani perubahan iklim makin terlihat nyata sejak tahun 2007

Komitmen Indonesia terhadap tindakan perubahan iklim makin nyata terlihat sejak tahun 2007, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi UNFCCC ke-13 di Bali dan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim. Pada tahun 2008, Pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim dan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Mengantisipasi Perubahan Iklim, suatu langkah tindakan utama untuk menerjemahkan tindakan iklim menjadi proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2009, Pemerintah merangkum pemahaman teknisnya tentang masalah-masalah dan dampak perubahan iklim (Komunikasi Nasional Kedua) dan mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pendanaan iklim dengan pembentukkan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia.

Indonesia telah mengumumkan komitmen pemecah jalur untuk memangkas emisi GHG sebesar 20 persen pada tahun 2020 melalui

Pada tahun 2009, Indonesia mengumumkan komitmen mitigasi pemecah jalur, bertujuan untuk memangkas emisi GHG sebesar 26 persen pada tahun 2020 melalui tindakan sukarela dan pemangkasan lebih lanjut hingga 41 persen dengan dukungan internasional. Tindakan berani ini membuka pintu bagi lebih banyak negara berkembang untuk membuat komitmen-komitmen untuk sebelum berlangsungnya Copenhagen COP 15.

tindakan sukarela dan tambahan 41 persen dengan bantuan internasional

Pemerintah Indonesia juga bergabung dengan Negara-negra G20 berikrar untuk secara bertahap menghapuskan subsidi bahan bakar fosil. Indonesia sedang menyusun suatu program strategis, kebijakan tahunan dan program investasi untuk mencapai pertumbuhan karbon yang rendah (*low-carbon growth*), seperti diuraikan dalam Peta Sektor Perubahan Iklim (Desember 2009) dan penyerahannya ke UNFCCC untuk memenuhi Persetujuan Copenhagen (Januari 2009).

Indonesia telah memetakan suatu program perubahan iklim yang kuat untuk tahun-tahun yang akan datang

Di dalam dokumen perencanaan pembangunan ekonominya, Pemerintah Indonesia telah memetakan suatu program aksi perubahan iklim yang kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah Indonesia menyerahkan komitmen internasionalnya ke UNFCCC sebagai pemenuhan Persetujuan Copenhagen pada akhir bulan Januari 2010. Pemerintah Indonesia berencana untuk menyusun komitmen presiden untuk memangkas emisi sebesar 26 persen menjadi kebijakan nasional melalui suatu keputusan presiden. Rencana penurunan emisi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2014 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 memberi landasan yang kuat bagi penganggaran dan penerapan. Mereka membangun di atas kerangka kerja yang dibentuk oleh Rencana Aksi Nasional Mengantisipasi Perubahan Iklim tahun 2007, Tanggapan Pembangunan terhadap Perubahan Iklim tahun 2008, dan berbagai penelitian teknis.

Pemerintah Indonesia juga melaksanakan rencana-rencananya

Indonesia sedang melaksanakan aksi terhadap emisi hutan dan lahan gambut melalui pengembangan proyek-proyek percontohan lahan gambut dan pengembangan program nasional bagi Pemangkasan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) dengan suatu rangkaian kegiatan demonstrasi yang sedang disusun. Indonesia secara bertahap menangani masalah pengelolaan di belakang emisi hutan dan lahan gambut, termasuk bagian standar keabsahan dan sistem pemeriksaan kayu. Di sektor energi, Pemerintah Indonesia telah membuat upaya-upaya peningkatan iklim investasi untuk pembangunan energi terbarukan melalui peningkatan pemberian harga dan persyaratan pengurangan (walaupun kebijakan-kebijakan tersebut masih dapat ditingkatkan). Indonesia juga mengharuskan lebih banyak tindakan efisiensi dan konservasi energi dari perusahaan-perusahaan besar, dan juga dari pemerintah-pemerintah daerah dan nasional. Di bidang adaptasi, Indonesia meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan perluasan pertanian untuk memperkuat daya tahan dan memangkas risiko dampak iklim, yang termasuk kekeringan, banjir dan serangan hama. Indonesia telah membentuk badan dan undang-undang pengelolaan bencana nasional yang mengarusutamakan perubahan iklim menjadi agenda persiapan menghadapi bencana. Dasar kelembagaan, teknis dan hukum bagi koordinasi dan implementasi tindakan-tindakan perubahan iklim telah diselenggarakan dan akan terus ditingkatkan.

Indonesia juga menggunakan pilihan pendanaan iklim internasional dan mekanisme pendanaan iklim dalam negeri

Indonesia juga menggunakan rangkaian pendanaan iklim internasinal yang tersedia dan menyusun mekanisme pendanaan iklim dalam negeri. Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia diluncurkan pada bulan September 2009 sebagai mekanisme bantuan teknis pendanaan, pembangunan kapasitas dan kegiatan demonstrasi bagi adaptasi dan mitigasi. Pemerintah Indonesia mencari bantuan pendanaan iklim melalui Dana Teknologi Bersih dan melalui Fasilitas Kemitraan Karbon Kehutanan. Pemerintah telah terpilih sebagai negara percontohan di bawah Program Investasi Kehutanan. Mekanisme pendanaan internasional lainnya (seperti Dana Adaptasi yang dikelola oleh GEF) sedang berjalan, sehingga kiriman demikian dari negara-negara maju dapat membantu memangkas biaya upaya Indonesia menuju jalur pembangunan rendah karbon yang lebih kebal akan pengaruh iklim.

Mitra-mitra pembangunan Indonesia juga membuat kontribusi yang penting

Mitra-mitra pembangunan Indonesia juga memberikan bantuan teknis, dukungan analisa dan pembangunan kapasitas melalui serangkaian mekanisme. Banyak mitra pembangunan memberikan bantuan melalui proyek-proyek yang sedang berjalan sementara yang lain sedang merancang program-program pendukung baru. Beberapa telah menyatakan dukungan terhadap Dana Perwalian Perubahan Iklim Pemerintah Indonesia. Banyak dari program-program bantuan pembangunan tersebut akan memberikan kapasitas dan dukungan bagi Pemerintah Indonesia untuk mencapai agenda perubahan iklimnya.

Persetujuan perlindungan hutan yang menakjubkan dengan Norwegia

Di bulan Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani Persetujuan Niat tentang perlindungan hutan, bertujuan untuk mendukung dan mempercepat upaya-upaya Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan emisi dari perubahan lahan dan hutan

ditandatangani pada bulan Mei 2010

melalui suatu program nasional bagi REDD. Persetujuan ini membentuk suatu pendekatan berbasis kinerja dan Norwegia akan memberikan 1 miliar dolar Amerika bila sasaran-sasaran pengelolaan, pengawasan dan pembiayaan hutan tertentu telah tercapai. Persetujuan ini meningkatkan taruhan pelaksanaan program REDD Indonesia dan meningkatkan perhatian ke tingkat presidensil.

Indonesia juga telah menggunakan Program Pinjaman Perubahan Iklim

Sejak tahun 2008 Indonesia telah terlibat di dalam rangkaian Program Pinjaman Perubahan Iklim (didukung oleh JICA dan AFD, dan Bank Dunia bergabung di tahun 2010) yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya menyusun jalur pertumbuhan rendah karbon yang lebih kebal terhadap pengaruh iklim. Operasi ini juga membantu persiapan Indonesia untuk menghadapi pemerintahan perubahan iklim dunia pasca tahun 2012 dengan menyelenggarakan suatu ketetapan kebijakan, peraturan dan kelembagaan yang lebih baik yang memungkinkan Indonesia untuk mengakses peluang-peluang pendanaan pasar karbon dan iklim dunia. Tindakan kebijakan yang disertakan di dalam program pinjaman memberi kontribusi kepada agenda pembangunan Indonesia dengan meningkatkan pengelolaan, manajemen hutan, efisiensi dan daya saing. Program pinjaman tersebut menekankan pada tiga tema bidang: (i) menjawab kebutuhan mitigasi emisi GHG Indonesia; (ii) meningkatkan upaya-upaya adaptasi dan ketahanan pada sektor-sektor utama; dan (iii) memperkuat kelembagaan dan kerangka kerja lintas kebijakan yang dibutuhkan untuk keberhasilan tanggapan perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah titik masuk yang penting bagi tindakan-tindakan yang lebih luas yang mendukung pembangunan yang baik

Menggunakan pencapaian perubahan iklim, kinerja ekonomi yang kuat dan struktur politik yang terpadu sebagai landasan yang kokoh, Indonesia kini menawarkan untuk bergerak menuju jalur pembangunan rendah karbon, selain jalur yang lebih tahan dan adaptif yang dapat membantu menurunkan kerentanan dan melindungi kaum miskin di masa depan. Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan dalam penggunaan lahan gambut, hutan dan energi yang penting bagi pembangunan yang lebih efisien dan bersahabat dengan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga akan menghadapi tantangan dalam membangun kesiapan kelembagaan dan tanggapan adaptif yang dibutuhkan untuk melindungi mereka yang rentan dan ekonomi yang lebih luas dari dampak perubahan iklim masa depan yang tidak dapat diramalkan.

2. Meningkatkan kesehatan kelahiran anak di Indonesia melalui sistem kesehatan yang lebih kuat

Menangani berbagai tantangan bidang kesehatan di Indonesia, termasuk tingkat kematian ibu melahirkan yang tinggi, merupakan prioritas nasional

Sistem kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan Pemerintah Indonesia telah menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)[6] tahun 2010-2014. Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Desember 2009 menyoroti salah satu hal masalah utama yang menghadang bidang kesehatan, yaitu bagaimana mendanai jaminan kesehatan bagi populasi Indonesia yang bertambah dan menua dalam hubungannya dengan belanja bidang kesehatan yang rendah dan langkah menuju jaminan asuransi kesehatan universal. Edisi kali ini menekankan pada masalah kesehatan lain yang tak kalah pentingnya, bagaimana menangani lambatnya penurunan angka kematian ibu bersalin. Dengan 229 kematian ibu per 100.000 kelahiran bayi hidup, rasio kematian ibu (MMR) di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Timur dan melebihi dua kali lipat Sasaran Angka Kematian Ibu Pembangunan Milenium pada tingkat 102. Pencapaian angka sasaran itu membutuhkan upaya ekstra untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk memperkuat sistem kesehatan. Laporan Bank Dunia yang baru diterbitkan—*"…and then she died": Indonesia Maternal Health Assessment* —memberikan bukti dan analisa-analisa yang menjelaskan kepada dan membantu pemerintah dalam upayanya mengembangkan strategi untuk mempercepat laju perbaikan kesehatan persalinan.

Walaupun terdapat peningkatan yang berarti, rasio kematian ibu melahirkan (MMR) Indonesia tetaplah tinggi dan laju penurunan angka tersebut harus dipercepat untuk memenuhi Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) ke-5 pada tahun 2015

Di tengah komitmen pemerintahan dan masyarakat yang kuat dan investasi selama beberapa dekade dalam intervensi yang relevan, angka kematian ibu bersalin tetap bertahan tinggi. Penggunaan layanan kesehatan persalinan di Indonesia telah meningkat secara berarti pada 15 tahun terakhir (Grafik 60). Perbandingan persalinan yang ditangani oleh penyedia jasa profesional (dokter, suster atau bidan) meningkat hampir dua kali lipat dari 40 persen antara periode tahun 1990-94 menjadi 74 persen pada periode 2003-07. Perbandingan persalinan dengan fasilitas kesehatan meningkat hampir tiga kali lipat dari 18 persen menjadi 47 persen pada periode yang sama, dengan lebih dari 90 persen dari peningkatan yang belakangan terjadi didorong oleh penggunaan fasilitas swasta. Bersamaan dengan itu, tingkat persalinan lewat operasi sesar, suatu ukuran penting dari kelengkapan rawatan kesehatan, meningkat dari 0,8 persen pada 1986-89 menjadi 6,8 persen pada 2003-07, sekali lagi sebagian besar diberikan oleh fasilitas swasta. Peningkatan penggunaan layanan kesehatan persalinan bertepatan dengan penurunan lebih dari 40 persen dari angka MMR Indonesia, yang turn dari 390 kematian ibu bersalin untuk setiap 100.000 kelahiran hidup antara tahun 1990-94 menjadi 229 menurut perkiraan terakhir (Lancet 2010). Sekitar setengah dari kemajuan ini dicapai pada lima tahun terakhir, mencerminkan percepatan laju penurunan dari sekitar 2-3 persen menjadi sekitar 5 persen setahun. Di tengah peningkatan-peningkatan yang berarti tersebut, angka MMR Indonesia tetap merupakan yang tertinggi di Asia Timur dan setidaknya 10.000 perempuan terus meninggal setiap tahun dalam hubungannya dengan persalinan. Selain itu, angka MMR Indonesia saat ini masih lebih dari dua kali lipat dari sasaran MDG kelima sebesar 102. Jika Indonesia ingin mencapai sasaran ini pada tahun 2015, maka laju penurunan kematian ibu bersalin harus makin dipercepat.

[6] RPJMN tahun 2010-14 dibahas dalam Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Maret 2010.

Grafik 60: Kendati peningkatan berarti, tingkat MMR Indonesia tetaplah tinggi dan laju peningkatan harus makin dipercepat untuk memenuhi sasaran MDG kelima
(Tren dalam MMR, penanganan bersalin oleh ahli dan persalinan dengan fasilitas kesehatan antara tahun 1990-2007)

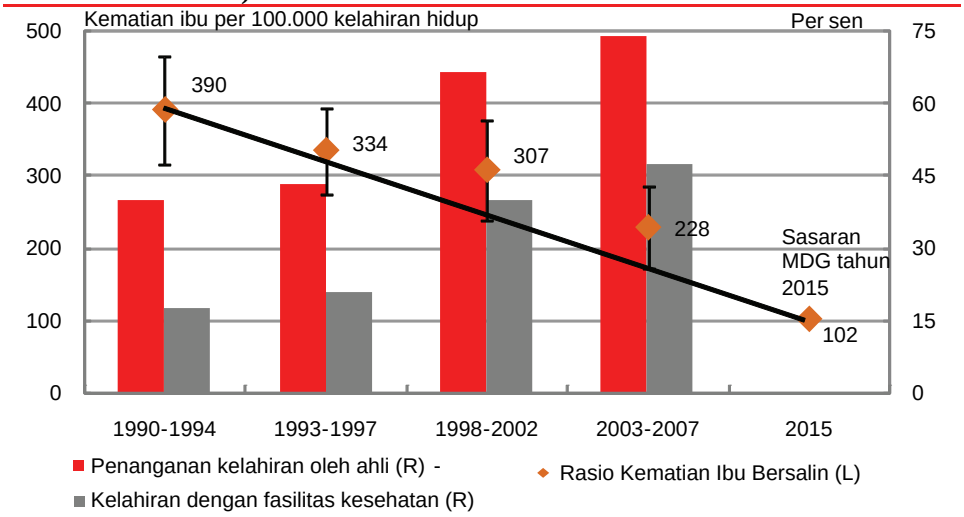

Sumber: IDHS tahun 1994-2007. Rangkaian laporan Lancet terakhir menunjukkan nilai 229 untuk MMR Indonesia.

Tingginya angka MMR Indonesia mencerminkan berbagai tantangan: Pertama, sejumlah besar perempuan miskin tetap bersalin di rumah

Tingginya angka MMR Indonesia mencerminkan berbagai tantangan. Pertama, ketersediaan layanan persalinan berkualitas tetaplah timpang. Secara umum, ketidakadilan ketersediaan fasilitas persalinan antara perempuan berada dan miskin dan mereka yang hidup di daerah perkotaan dan pedesaan telah menurun dengan peningkatan penggunaan penyedia layanan bersalin profesional.[7] Kendati demikian, yang paling berada masih memiliki ketersediaan akan fasilitas kesehatan tujuh kali lipat dibanding sejawatnya yang paling miskin dan jumlah perempuan yang terus bersalin di rumah tanpa pertolongan profesional masihlah besar. Tinjauan sampel audit kematian ibu bersalin di Jawa Barat (n=210) di tahun 2009 menunjukkan sejumlah besar perempuan yang meninggal karena persalinan hanya bergantung pada bantuan persalinan tradisional, terlambat dirujuk dan tidak mendapatkan layanan yang memadai walaupun telah dirujuk.[8]

… penggunaan layanan keluarga berencana tidak mengalami kemajuan

Selain itu, walaupun layanan kesehatan pra-persalinan dan pasca-persalinan naik ke tingkatan tinggi, layanan keluarga berencana tidak mengalami kemajuan. Kehamilan yang tidak direncanakan berada pada tingkat yang tinggi pada perempuan yang menikah maupun yang belum menikah. Tinjauan terakhir atas program keluarga berencana nasional menyoroti perlunya pelaksanaan pencegahan kehamilan pada kelompok-kelompok dengan risiko tinggi, terutama meningkatnya kelompok perempuan yang belum menikah yang aktif secara seksual dan kebutuhan mereka tidak diindahkan oleh program-program keluarga berencana. Kehamilan yang tidak direncanakan pada 24 juta perempuan dalam kelompok ini kemungkinan besar akan berakhir pada pengguguran kandungan yang tidak aman dan lebih banyak kematian ibu. Walaupun hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai pengguguran kandungan, diperkirakan di antara 700.000 dan 3 juta pengguguran kandungan terjadi setiap tahun, banyak diantaranya dilakukan secara tidak aman dengan risiko yang tinggi.[9] Penyampaian layanan keluarga berencana telah bergeser kepada pihak swasta pada dekade terakhir, dengan risiko kaum

[7] Hatt, L., C. Stanton, K. Makowiecka, A. Adisasmita, E. Achadi, dan C. Ronsmans. 2007. Did the strategy of skilled attendance at birth reach the poor in Indonesia? *Bulletin of the World Health Organization,* 85(10): 733-820.
[8] Bank Dunia (2010) " and then she died": Indonesia Maternal Health Assessment oleh Lucy Mize, Eko Pambudi, Marge Koblinsky, Susan Stout, Puti Marzoeki, Pandu Harimurti, Claudia Rokx
[9] Hull, T., dan H. Mosley 2009 Revitalization of Family Planning in Indonesia Jakarta: Government of Indonesia and the United Nations Population Fund

miskin akan menghadapi hambatan keuangan. Privatisasi tanpa kebijakan juga berarti pergeseran menuju metode pencegahan kehamilan yang bersifat lebih sementara dan lebih menguntungkan, seperti terlihat pada pergeseran ke metode suntik jangka pendek sebagai metode utama pencegahan kehamilan nasional.

… keterbatasan dana menghalangi para perempuan mencari layanan kesehatan ketika dibutuhkan

Selain itu, biaya yang mahal dan terutama ketidakpastian akan besarnya biaya pengobatan terus menghalangi para perempuan mencari layanan kesehatan ketika diperlukan. Di tahun 2005, untuk memberikan perlindungan keuangan yang lebih baik terhadap pengeluaran kesehatan yang dapat membahayakan dan untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan, Pemerintah Indonesia meluncurkan asuransi kesehatan bagi kaum miskin, ASKESKIN, yang sekarang dikenal sebagai JAMKESMAS. Program itu mencakup 76,4 juta jiwa dan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek layanan persalinan yang ada di sektor publik tersedia bagi perempuan-perempuan miskin. Program itu telah berhasil mempengaruhi tingkat permintaan akan dan insentif untuk memberikan layanan kesehatan persalinan oleh penyedia pemerintah dan swasta, seperti tercermin dalam lonjakan tingkat pasien rawat jalan dan rawat inap (Grafik 61 dan Grafik 62). Walaupun terdapat peningkatan cakupan Jamkesmas, halangan dana untuk mendapatkan pengobatan secara tepat waktu tetap ada: para perempuan tidak tahu apakah mereka berhak mendapat jaminan Jamkesmas atau tidak; mereka tidak memahami manfaat program itu dan tetap tidak yakin akan kemungkinan timbulnya biaya tambahan untuk persalinan di dalam fasilitas kesehatan. Mereka seringkali menolak rujukan akan komplikasi kandungan ke fasilitas kesehatan karena biaya perjalanan yang tidak termasuk dalam paket biaya yang dijamin.

Grafik 61: Penggunaan layanan rawat jalan oleh perempuan melonjak setelah peluncuran ASKESKIN
(Tingkat penggunaan layanan rawat jalan pada 4 minggu terakhir menurut jenis asuransi bagi perempuan umur 10-49 tahun, dalam persen)

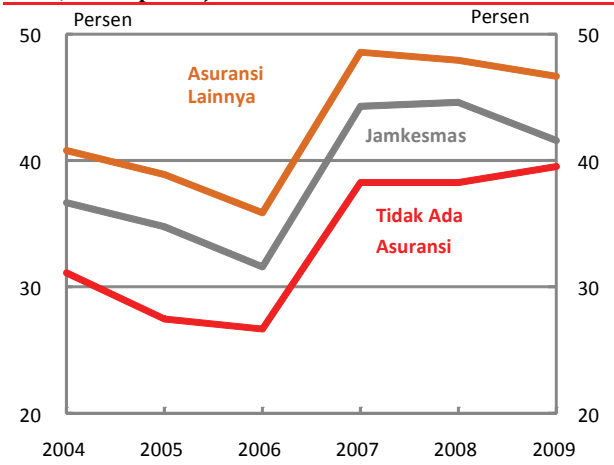

Grafik 62: Penggunaan layanan rawat inap oleh perempuan melonjak setelah peluncuran ASKESKIN
(Tingkat penggunaan layanan rawat inap pada 4 minggu terakhir menurut jenis asuransi bagi perempuan umur 10-49 tahun, dalam persen)

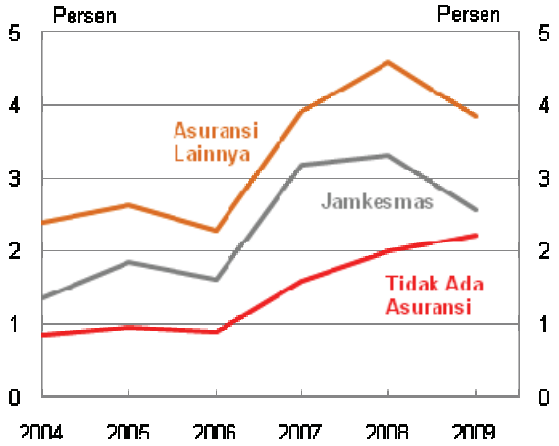

Sumber: Susenas 2004-2009

… kualitas layanan kesehatan kehamilan rendah dan masih sering menyebabkan kematian yang seharusnya tidak perlu terjadi

Dalam hal rujukan bagi perempuan dengan masalah komplikasi kehamilan, kualitas layanan gawat darurat kehamilan masihlah rendah dan masih sering menyebabkan pada kematian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bidan-bidan pedesaan tidak selalu menstabilkan kasus yang dihadapinya sebelum melakukan perujukan; puskesmas yang memberikan Layanan Kesehatan Kehamilan dan Kelahiran Darurat Dasar (BEONC) seringkali dilewatkan karena dianggap tidak mampu menangani komplikasi, sementara tidak seluruh daerah memilki rumah sakit yang memiliki Layanan Kesehatan Kehamilan dan Kelahiran Darurat Menyeluruh (CEONC). Walaupun perhatian telah ditetapkan sejak beberapa tahun terakhir dan terdapat kebijakan-kebijakan untuk memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang mampu menangani kondisi darurat kehamilan, baru sedikit daerah yang mencapai jumlah yang ditetapkan oleh standar PBB dan hanya sedikit fasilitas yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh CEONC, sehingga para perempuan tetap menghadapi risiko akan kurangnya layanan sekali mereka dirujuk ke sebuah fasilitas. Keprihatinan atas kualitas ini berlaku bagi fasilitas pemerintah maupun swasta.

… dan sementara Indonesia telah memberi perhatian khusus kepada jumlah bidan, tapi masih terdapat kelangkaan tenaga spesialis

Walaupun Indonesia telah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan jumlah bidan di seluruh daerah di Indonesia, dan terutama di daerah-daerah pedesaan, jumlah spesialis (dokter spesialis kandungan, ginekolog dan ahli anestesi), terutama spesialis kandungan, masih jauh dari cukup. Hanya terdapat 2.100 dokter spesialis kandungan bagi 230 juta jiwa di Indonesia dan distribusinya sangatlah tidak merata (Grafik 63). Selain itu, sementara upaya pemerintah telah secara garis besar mencapai sasaran satu bidan per desa, insentif keuangan telah berubah sesuai waktu; banyak bidan telah meninggalkan pedesaan untuk bekerja di daerah perkotaan dan lebih memilih menyediakan layanan swasta, membiarkan kaum miskin dengan cakupan yang lebih kecil. Akibatnya, cakupan bidan juga sangatlah bervariasi (Grafik 64). Selain itu, kualitas layanan yang diberikan oleh para bidan juga dapat ditingkatkan; penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan yang buruk menyumbang hingga 60 persen dari 130 kematian ibu bersalin (Supratrikto 2002). Kajian menyeluruh yang baru dilaksanakan atas angkatan kerja kesehatan Indonesia menarik perhatian kepada kenyataan bahwa kualitas pekerja kesehatan, dokter umum, bidan dan perawat, hanya meningkat tipis pada dekade yang lalu dan bahwa kerangka kerja aturan kebijakan yang mengatur pelatihan dasar dari penyedia layanan tersebut sangatlah tidak seragam (Bank Dunia 2008, Rokx dkk 2010).

Grafik 63: Indonesia mengalami kelangkaan dan ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis kehamilan
(Rasio dokter spesialis kehamilan dan ginekolog per 100.000 populasi menurut propinsi)

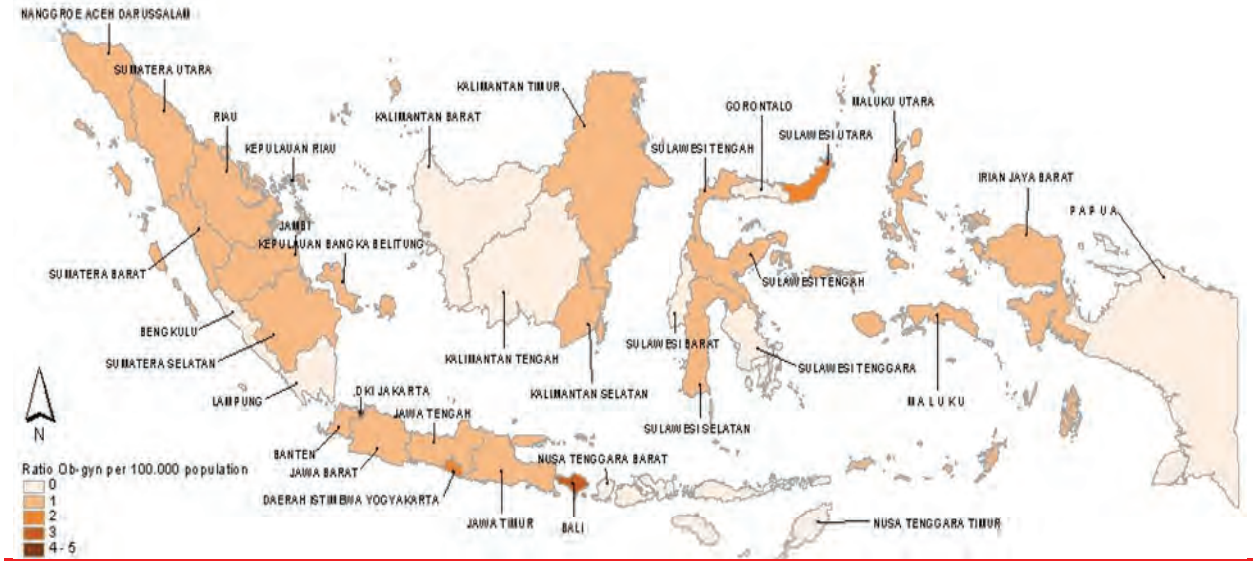

Sumber: KKI, 2007

Sebagian penjelasan mengapa layanan kesehatan masih tertinggal terletak pada belanja kesehatan yang terus berada pada tingkat rendah

Kurangnya layanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas dapat juga dijelaskan oleh tetap rendahnya belanja negara bidang kesehatan. Indonesia membelanjakan tidak sampai 2 persen dari PDB-nya untuk kesehatan, setengahnya merupakan belanja pemerintah. Hal ini merupakan salah satu tingkat belanja yang paling rendah di Asia Timur – dan di dunia – walaupun belanja pemerintah telah berlipat dua sejak tahun 2005 (Bappenas 2009). Selain itu, pada tingkat pemerintah daerah, anggaran-anggaran barulah tersedia menjelang berakhirnya tahun fiskal, yang berarti sumber daya yang telah rendah itu akhirnya tidak digunakan sama sekali (Laksono dkk, 2009).

Grafik 64: Cakupan jumlah bidan di Indonesia sangatlah bervariasi
(Rasio bidan per 100.000 populasi menurut propinsi)

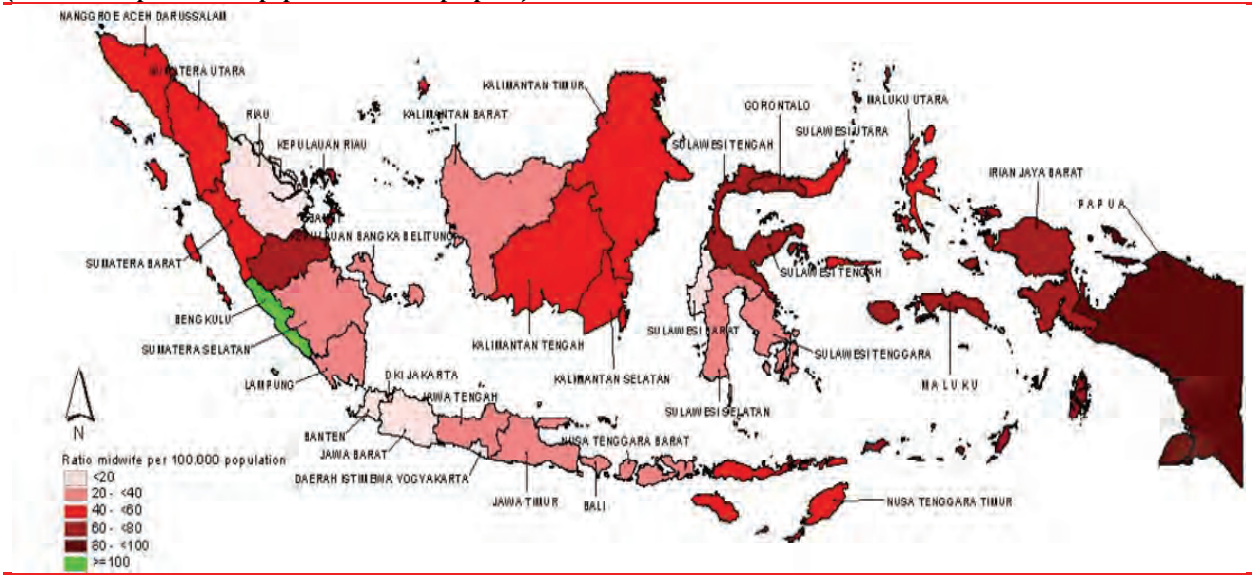

Seluruh golongan bidan; sasaran 100 per 100.000 di tahun 2010. Sumber: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2006

Akhirnya, pelaksanaan desentralisasi secara besar-besaran menjadikan pengelolaan sektor publik ke tingkat daerah , juga menciptakan tantangan-tantangan yang serius

Desentralisasi besar-besaran mempertanggungjawabkan pengelolaan sektor publik ke tingkat daerah, yang dimulai sejak tahun 2001, telah menciptakan tantangan-tantangan serius terhadap kapasitas badan-badan pusat, termasuk Depkes dan BKKBN, badan koordinasi keluarga berencana, untuk mengelola dan mengarahkan penyediaan layanan. Standar layanan minimum (MSS) untuk layanan kehamilan dasar dan untuk layanan keluarga berencana di tingkat daerah telah diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri dan buku pedoman untuk pengelola menjelaskan tanggung jawab mereka. Akan tetapi, MSS tersebut tetaplah tidak didefinisikan dengan lengkap, rumit untuk diukur dan hanya sedikit daerah yang benar-benar menerapkannya[10]. Yang dapat ditangkap adalah kualitas layanan keluarga berencana dan kesehatan secara umum telah menurun, dan ketersediaan tetap menjadi masalah utama dengan desentralisasi.

[10] Haynes dan Harahap, Governance and Accountability in the Health Sector in Indonesia; an assessment, yang segera diterbitkan

3. Memperkuat tanggung jawab dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara paling terdesentralisasi di dunia

Desentralisasi besar-besaran di tahun 2001 menghantarkan Indonesia dari salah satu negara yang paling tersentralisasi di dunia dalam hal administrasi, fiskal dan politik, menjadi salah satu yang paling terdesentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No 32/2004 (tentang Otonomi Daerah) dan UU No 33/2004 (tentang Perimbangan Keuangan), pemerintah daerah (PEMDA) kini memiliki tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat, dan juga mengelola sumber daya keuangan baru yang telah dipindahkan dari pemerintah pusat atau dikumpulkan dari daerah mereka sendiri. Dengan demikian PEMDA telah mengalami peningkatan berarti dalam sumber daya keuangan mereka, sebagian besar melalui bertambahnya kiriman dari tingkat pusat.

Kiriman dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah (PEMDA) dan PEMDA kini mengelola 38 persen dari seluruh belanja pemerintah

Kiriman dari pemerintah pusat kini merupakan sumber utama dana PEMDA. PEMDA sekarang mengelola 38 persen dari keseluruhan belanja pemerintah dan melaksanakan lebih dari setengah dari seluruh investasi pemerintah. Akan tetapi, Kajian Belanja Pemerintah (PER) yang dilakukan pada tingkat PEMDA menunjukkan bahwa PEMDA menghadapi kesulitan dalam mengelola dan membelanjakan sumber daya mereka. Beberapa PEMDA telah mengumpulkan cadangan sumber daya keuangan yang berarti, walaupun cadangan-cadangan itu secara umum tidaklah berlebihan. Dengan adanya kebutuhan investasi yang tinggi untuk layanan-layanan dasar, pengumpulan cadangan yang lebih besar dapat dipandang sebagai gejala ketidakmampuan membelanjakan sumber daya keuangan secara efektif. Desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar, seperti bagaimana meningkatkan dan mempercepat pembelanjaan, dan menurunkan ketergantungan PEMDA pada kiriman dari pemerintah pusat.

PEMDA tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi layanan dasar mereka

Mengikuti proses desentralisasi di tahun 2001, tanggung jawab investasi sebagian besar layanan juga dipindahkan ke PEMDA. Lebih dari 500 PEMDA di Indonesia (propinsi, kabupaten dan kota) sekarang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan prasarana. Ketika kebutuhan investasi diperhitungkan, PEMDA tidak memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi untuk layanan dasar, yang nilainya jauh diatas penerimaan dan surplus mereka.

PEMDA tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang berarti, membuat mereka terlalu bergantung pada kiriman dari pemerintah pusat

PEMDA tidak memiliki sumber pendapatan asli yang cukup berarti, yang secara rata-rata porsinya hanya sekitar 15 persen dari keseluruhan pendapatan. Hal ini menyebabkan kebergantungan yang tinggi terhadap kiriman pemerintah pusat untuk belanja modal. Untuk meningkatkan investasi, PEMDA harus memiliki akses terhadap aliran keuangan yang lebih luas dan pemerintah pusat harus memperkuat mekanisme pengirimannya, terutama dana hibah untuk investasi. Dalam hal pengelolaan alokasi pengeluaran, PEMDA memiliki otonomi yang besar, sehingga penguatan sistem pengiriman dana hibah permodalan antar-pemerintahan tidak akan melemahkan desentralisasi, tetapi akan memperkuat kemampuan PEMDA dalam penyediaan layanan.

Terdapat dua jenis kiriman antar-pemerintahan, DAU dan DAK

Porsi terbesar dari kiriman antar-pemerintahan kepada PEMDA terletak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di tahun 2010, bagian DAU dari keseluruhan kiriman antar-pemerintahan adalah sebesar 63 persen, sementara DAK berada di kisaran 7 persen. Secara umum DAU digunakan untuk membayar gaji dan biaya-biaya administrasi lainnya. Keseluruhan alokasi DAK untuk tahun 2010 berada di kisaran USD 2,3 miliar.

DAK adalah dana yang alokasikan bagi PEMDA untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang sejalan dengan prioritas nasional

DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada PEMDA dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang sejalan dengan prioritas nasional dan dilaksanakan sesuai yurisdiksi PEMDA. Jumlah alokasi DAK ditentukan secara tahunan di dalam APBN. Terdapat tiga jenis kriteria yang harus dipenuhi oleh PEMDA untuk menerima DAK, yaitu: kriteria umum, khusus dan teknis. Kriteria umum merujuk kepada kapasitas fiskal bersih PEMDA. Kriteria khusus berhubungan dengan apakah PEMDA menerima dana otonomi khusus atau digolongkan sebagai daerah tertinggal, dsb. Kriteria teknis melihat kondisi dari prasarana, seperti misalnya jumlah panjang keseluruhan jalan dan kondisinya. Ketiga kriteria ini digunakan dalam suatu rumus untuk menentukan alokasi DAK menurut daerah dan bidangnya.

Alokasi DAK telah bertumbuh dengan sangat cepat, walaupun sempat turun di tahun 2010

Alokasi DAK telah tumbuh dengan sangat cepat, meningkat dari Rp 2,2 miliar pada tahun 2003 menjadi Rp 24,8 miliar padai tahun 2009, dan masing-masing merupakan 0,7 persen dan 2,4 persen dari APBN. Akan tetapi, pada tahun 2010, jumlah DAK sebesar Rp 21,1 miliar mengalami penurunan sebesar 17,4 persen dibandingkan jumlah tahun 2009 sebagai akibat dari badai keuangan dunia. PEMDA yang berhak menerima harus menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen untuk setiap bidang DAK. Pengecualian dari aturan ini diperbolehkan untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas.

Depkeu mengalokasikan DAK ke tiap sektor dan di dalam sector-sektor tersebut PEMDA dapat memilih sub-proyek bagi penempatan investasi

Depkeu mengalokasikan DAK ke tiap sektor dan di dalam sector-sektor itulah PEMDA memiliki keleluasaan untuk menentukan sub-proyek yang akan menerima investasi. Dalam hal bidang prasarana, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menyediakan Keputusan Menteri No. 42/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan, Pengawasan dan Evaluasi DAK untuk setiap bidang prasarana. Pedoman Teknis PU tersebut secara jelas merinci jalur-jalur penggunaan hibah DAK, yang terbatas pada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan atau penyempurnaan prasarana yang telah ada.

Turunnya DAK di tahun 2010 disebabkan oleh krisis keuangan global

Selama bertahun-tahun alokasi DAK telah tumbuh dengan sangat cepat, meningkat dari Rp 2,2 miliar pada tahun 2003 menjadi Rp 24,8 miliar pada tahun 2009, dan masing-masing merupakan 0,7 persen dan 2,4 persen dari APBN. Di tahun 2010, keseluruhan alokasi DAK berjumlah Rp 21,133 miliar, atau 2,0 persen dari APBN. Jumlah ini merupakan penurunan sebesar 17,4 persen dibanding jumlah tahun 2009 yang disebabkan oleh badai keuangan dunia yang dimulai pada penghujung tahun 2008.

Table 10: Alokasi DAK telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam 6 tahun terakhir *(alokasi, miliar rupiah)*

Sector	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Education	625	653	1,221	2,920	5,195	7,015	9,335
Health	375	456	620	2,407	3,381	3,817	4,017
Road Infrastructure	843	839	945	2,576	3,113	4,045	4,501
Irrigation Infrastructure	339	357	385	628	859	1,497	1,549
Drinking Water and Sanitation			204	608	1,062	1,142	1,142
Governance Infrastructure	88	228	148	449	539	362	562
Marine and Fishery		305	322	776	1,100	1,100	1,100
Agriculture			170	1,095	1,492	1,492	1,492
Environment				113	352	352	352
Family Planning						279	329
Forestry						100	100
Rural Infrastructure							190
Trade							150
Total	**2,269**	**2,839**	**4,014**	**11,570**	**17,094**	**21,202**	**24,820**

Sumber: Grand Design *Desentralisasi Fiskal*, 2009

Besaran DAK dan alokasinya merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan dengan perundingan bersama DPR

Penentuan jumlah keseluruhan DAK dan alokasinya kepada PEMDA, adalah berdasarkan keputusan yang dibuat antara Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pusat, termasuk Depkeu, Depdagri, Bappenas dan departemen-departemen teknis di dalam bidang-bidang yang menerima alokasi DAK. Walaupun mekanisme penentuan jumlah DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai jumlah DAK dan alokasinya baik per bidang dan per daerah merupakan tanggung jawab dari Departemen Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR (Grafik 65). Agar berhak mendapat alokasi DAK, PEMDA harus memenuhi: (a) kriteria umum berdasarkan Indeks Fiskal Netto (IFN); (b) kriteria khusus berdasarkan peraturan legislatif dan karakteristik daerah, seperti apakah menerima dana otonomi khusus atau apakah digolongkan

sebagai daerah tertinggal, dsb; dan (c) kriteria teknis yang mengukur kondisi prasarana berdasarkan indeks teknis dalam bidang yang sesuai.

Grafik 65: Mekanisme alokasi DAK daerah

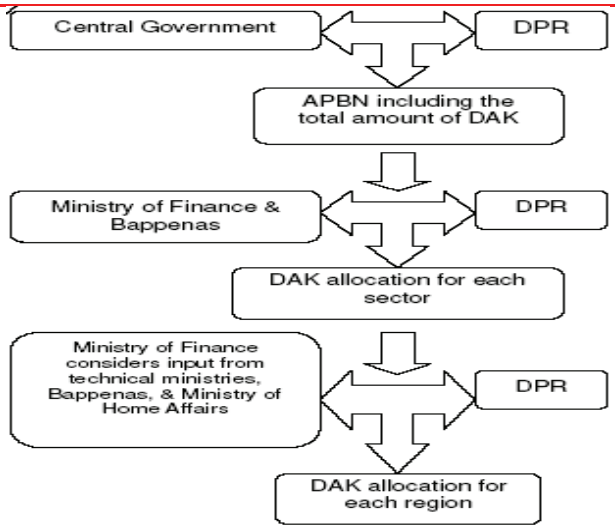

Sumber: MPW, 2007

Proses pencairan DAK dimulai dari rekening umum kas negara dan dilaksanakan dalam tiga tahap

Alokasi DAK kepada daerah-daerah penerima dikirimkan dari rekening umum kas negara ke rekening umum kas daerah. Kepala daerah yang bersangkutan lalu menyusun rencana definitif (RD) dan daftar isian pelaksanaan anggaran allocations (DIPA) berdasarkan surat rincian alokasi anggaran (SRAA) dari Depkeu melalui Kantor Kas Daerah dan panduan teknis dari departemen-departemen yang berhubungan. Saat ini proses pencairan DAK dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahan pertama, PEMDA menerima 30 pesen dari keseluruhan alokasi DAK (pada seluruh bidang) setelah pelaksanaan hal berikut: penyelesaian anggaran mereka (APBD), dan pengiriman APBD dan surat pernyataan komitmen PEMDA untuk memenuhi bagiannya sebesar 10 persen DAK kepada Depkeu. Pembayaran pertama akan dicairkan paling lambat bulan Februari pada setiap tahun fiskal. PEMDA dapat meminta pembayaran kedua, yang berjumlah sampai 45 persen dari keseluruhan DAK, setelah mereka menggunakan 90 persen pembayaran pertama dan memberikan bukti pelaksanaannya. Sisa 25 persen dapat diberikan setelah PEMDA menyerahkan bukti bahwa mereka telah menggunakan 90 persen dari pembayaran kedua.

Departemen lini memberi panduan teknis penggunaan DAK

Departemen-departemen lini memberikan panduan teknis dalam penggunaan DAK. Sebagai contoh, dalam bidang prasarana, PU menyediakan Keputusan Menteri No. 42/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan, Pengawasan dan Evaluasi DAK yang digunakan sebagai aturan dasar penerapan dan pengawasan dan evaluasi proyek-proyek yang didanai oleh DAK untuk sub-bidang prasarana. Keputusan tersebut dilengkapi dengan Surat Edaran PU tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dibiayai oleh DAK, yang diperbaharui setiap tahun.

Pengawasan dan evaluasi proyek-proyek yang didanai DAK sangatlah penting demi penerapan yang efektif

Pengawasan dan evaluasi proyek-proyek/kegiatan yang didanai DAK sangatlah penting demi penerapan DAK yang efektif, efisien dan transparan. Grafik 66 melukiskan mekanisme pelaporan dari PEMDA yang menerima DAK bagi prasarana sub-bidang. Pada intinya, PEMDA harus mengirimkan laporan-laporan kepada departemen-departemen teknis dan Depkeu (melalui Fiskal Berimbang). Jenis-jenis dan frekuensi laporan yang dipersyaratkan diatur sesuai dengan keputusan departemen tersebut tentang DAK.

Grafik 66: Mekanisme pelaporan DAK

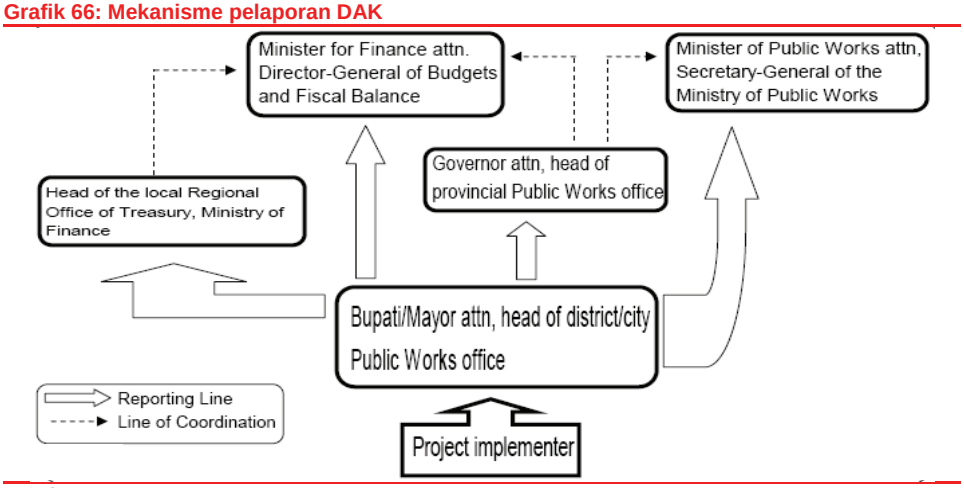

Sumber: MPW, 2007

Penelitian terakhir menemukan bahwa DAK membutuhkan peningkatan dalam bidang pendanaan, teknis, kelembagaan dan pengelolaan

Sejak penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di tahun 2001, kebijakan-kebijakan tentang DAK telah terselenggara dengan baik, walaupun pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana, terutama dalam hubungannya dengan hasil fisik, tetap menjadi tantangan. Penelitian yang baru oleh Bappenas, *Pilihan-Pilihan Peningkatan DAK (2009)*, mengukur pengelolaan DAK pada lima tahun terakhir. Penelitian itu menemukan bahwa dibutuhkan penyempurnaan untuk bidang-bidang pendanaan, teknis, kelembagaan dan pengelolaan. Dalam hubungannya dengan aspek pendanaan, masalah utama adalah ketidakcocokan antara jumlah DAK yang dialokasikan dengan kebutuhan daerah. Laporan keuangan DAK oleh PEMDA kepada Depkeu telah membaik secara berarti sejak Depkeu mulai menerapkan sanksi dengan menahan DAK yang belum dicairkan pada tahun 1998. Mengenai masalah-masalah teknis, PEMDA merumuskan investasi DAK sebagai bagian dari proses perencanaan dan anggaran tahunan mereka. Akan tetapi, hubungan antara perencanaan pembangunan jangka yang lebih panjang dengan pengeluaran DAK tahunan masih lemah. Masalah-masalah kelembagaan berkisar pada kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan prioritas DAK, dan kurangnya laporan dan pengawasan yang memadai akan penggunaan DAK, terutama pemeriksaan hasil-hasil yang diberikan. Kelemahan-kelemahan aspek pendanaan, teknis dan kelembagaan ini seluruhnya berdampak terhadap pengelolaan DAK secara keseluruhan dalam hal transparansi dan tanggung jawab.

LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Gambar 1:Pertumbuhan PDB
(persen pertumbuhan)

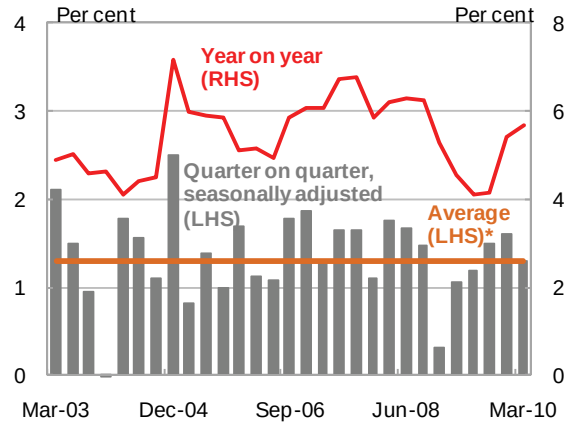

Sumber: BPS, penyesuaian musiman Bank Dunia

Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (Pengeluaran)
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, penyesuaian musiman)

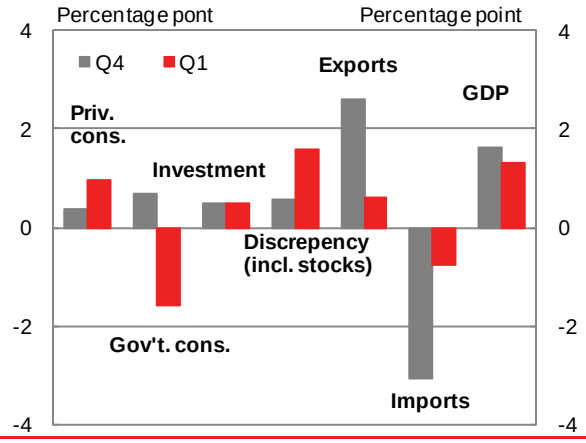

Sumber: BPS lewat CEIC dan Bank Dunia

Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (Produksi)
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, penyesuaian musiman)

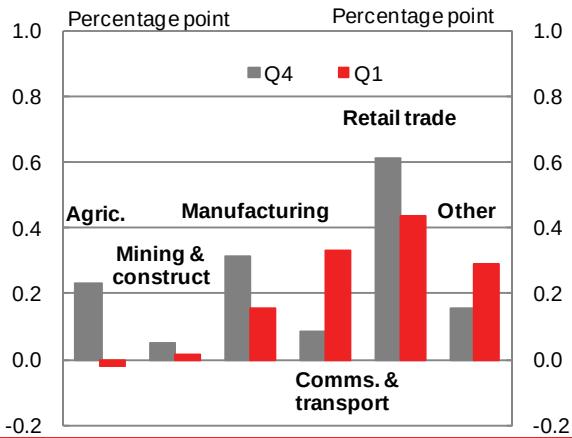

Sumber: BPS lewat CEIC

Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor
(tingkatan)

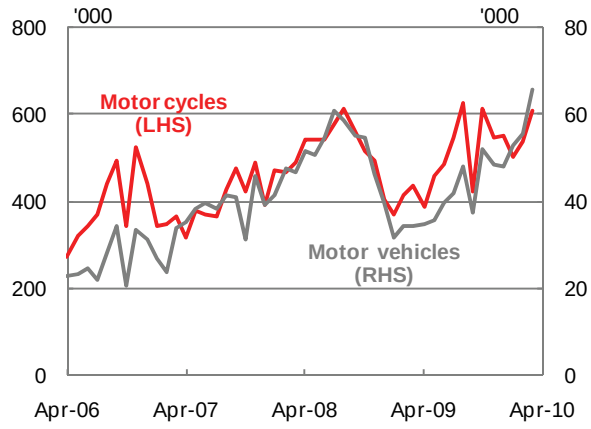

Sumber: CEIC

Gambar 5: Indikator konsumen
(indeks)

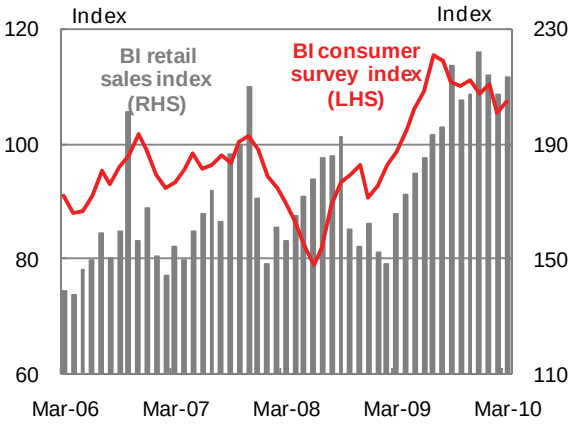

Sumber: BI lewat CEIC

Gambar 6: Indikator kegiatan industri
(pertumbuhan tahun-ke-tahun)

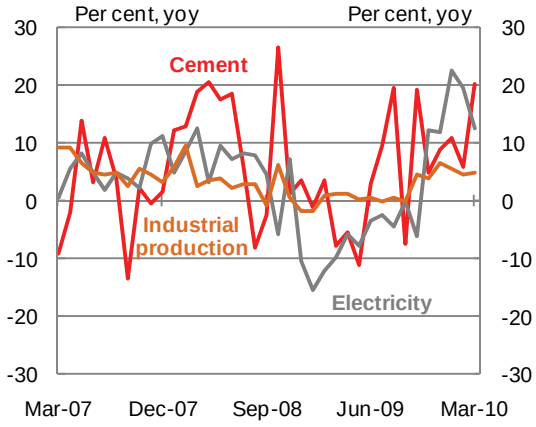

Sumber: CEIC

Gambar 7: Aliran perdagangan riil
(pertumbuhan triwulan-ke-triwulan)

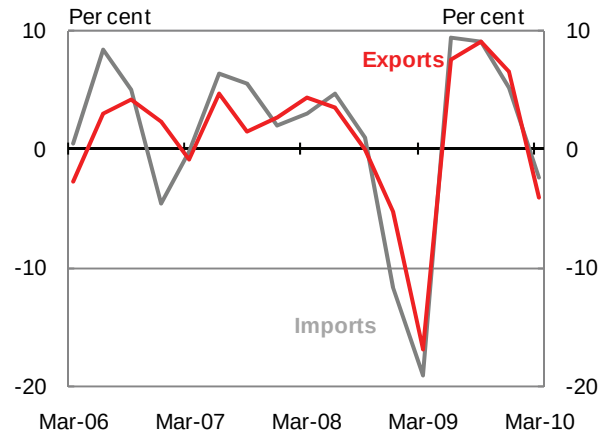

Sumber: CEIC

Gambar 8: Neraca Pembayaran
(miliar dolar Amerika)

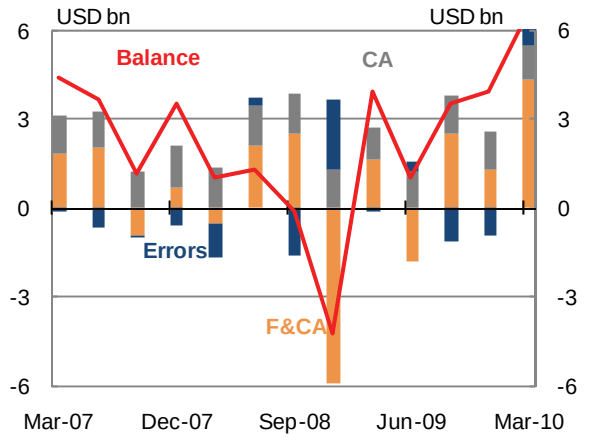

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar 9: Neraca pedagangan
(nilai, miliar dolar Amerika)

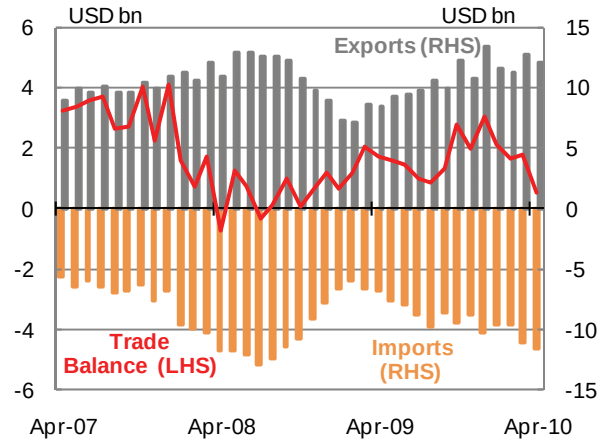

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar 10: Cadangan internasional
(miliar dolar Amerika)

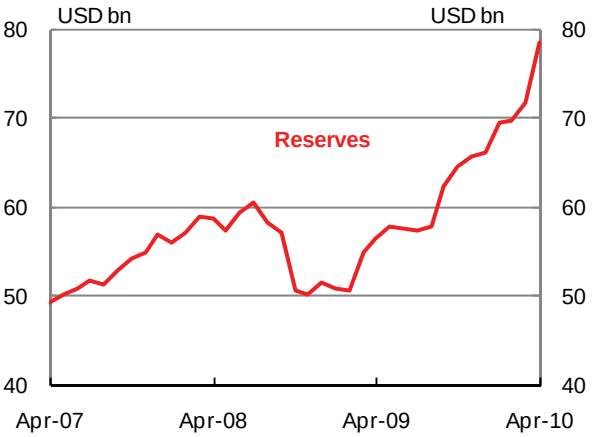

Sumber: BPS

Gambar 11: Syarat perdagangan dan harga implisit ekspor dan impor, triwulanan
(miliar dolar Amerika)

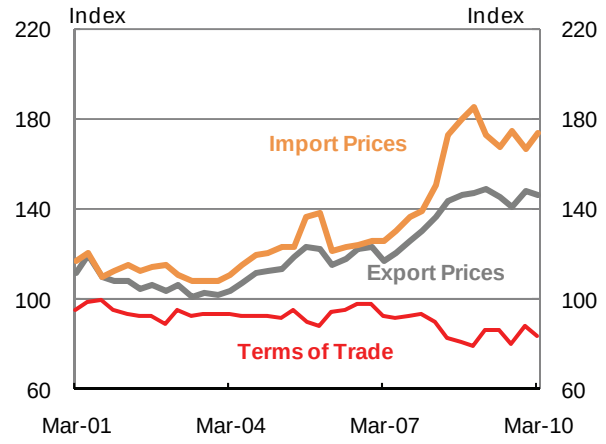

Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar 12: Inflasi
(bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)

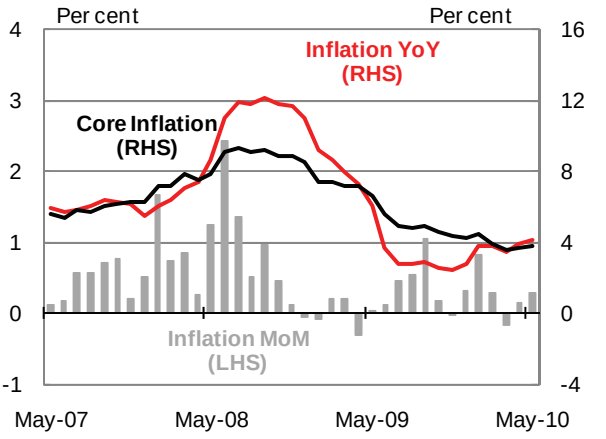

Sumber: BI dan BPS

Gambar 13: Inflasi, harga bahan pangan dan inflasi keranjang kemiskinan

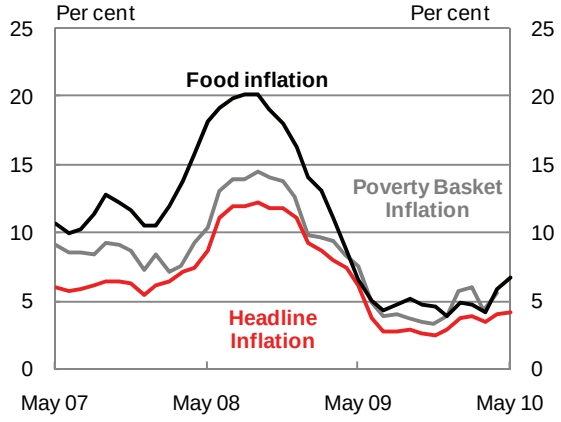

Sumber: BPS, Bank Dunia

Gambar 14: Rincian tingkat inflasi CPI bulanan *(persentase kontribusi bulanan)*

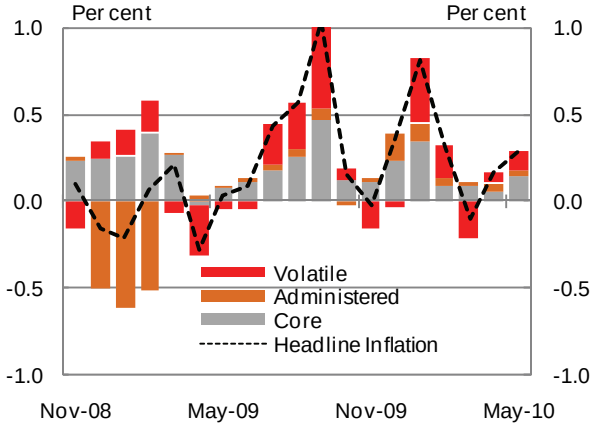

Sumber: BPS

Gambar 15: Inflasi di ekonomi negara tetangga *(tahun-ke-tahun, Mei 2010)*

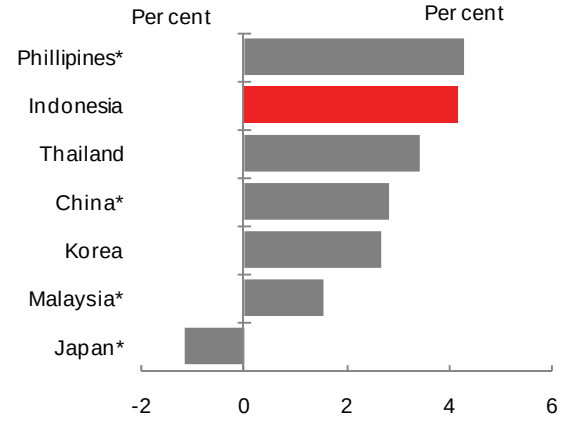

* April 2010. Sumber: Badan-badan statistik nasional, CEIC

Gambar 16: Kemiskinan, pekerjaan sektor formal dan tingkat pengangguran, (pengamatan Februari ke tahun 2005, lalu pengamatan Agustus untuk pekerjaan dan pengamatan Februari untuk kemiskinan)

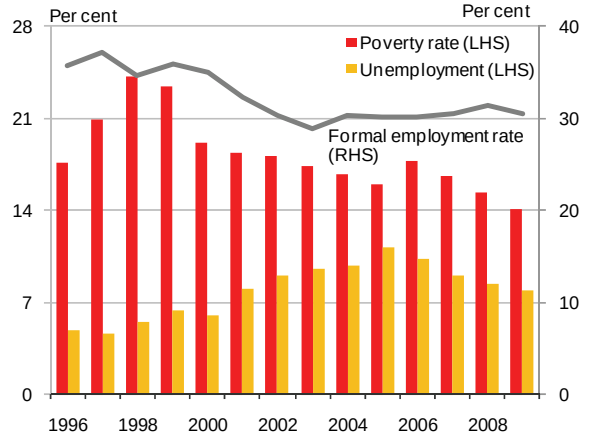

Sumber: BPS, Sakernas dan Bank Dunia

Gambar 17: Indeks saham regional *(harian, indeks)*

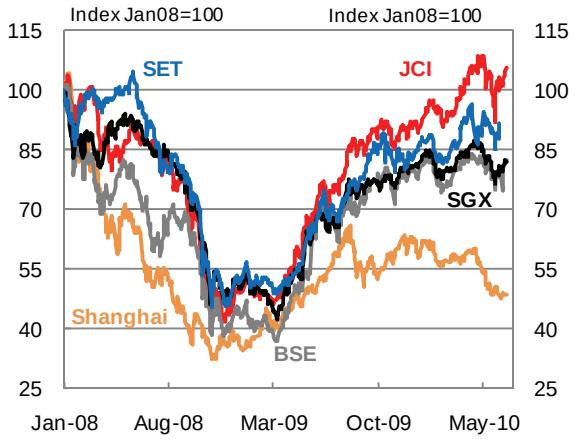

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar 18: Indeks luas dolar dan spot rupiah *(harian, indeks dan tingkat)*

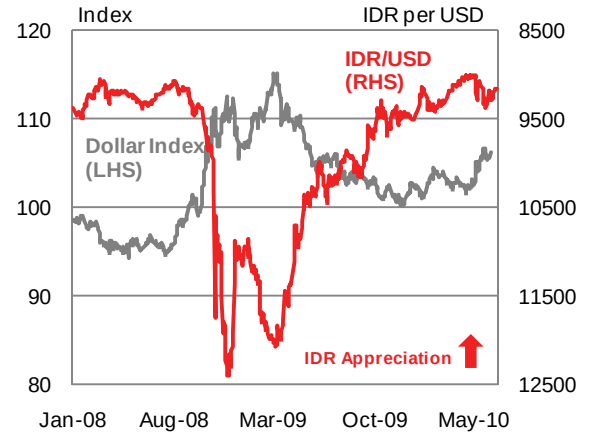

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal
(harian, persen)

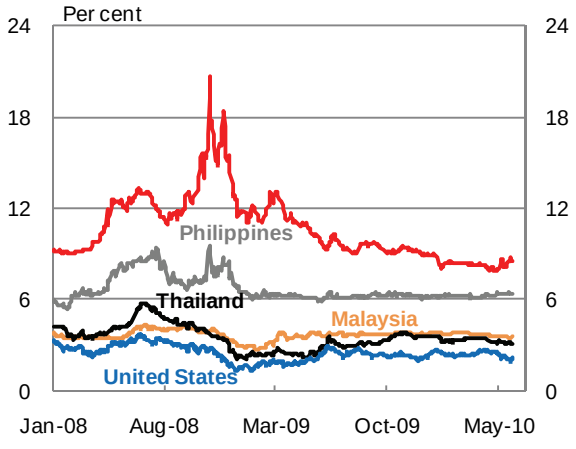

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dolar Amerika
(harian, basis poin)

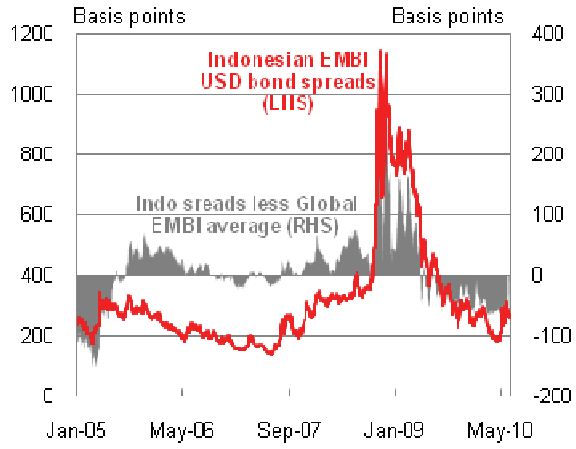

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar 21: Kredit internasional bank umum
(bulanan, indeks)

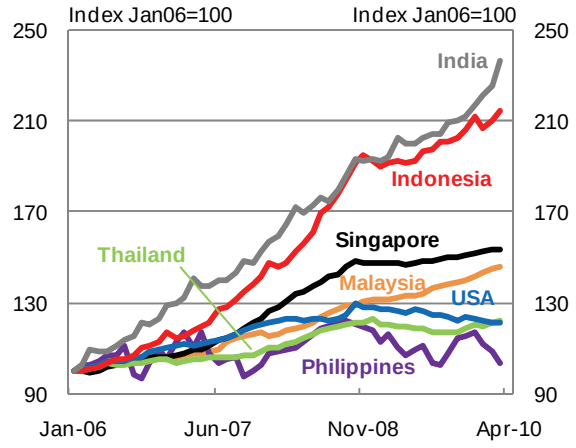

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan
(bulanan, persen)

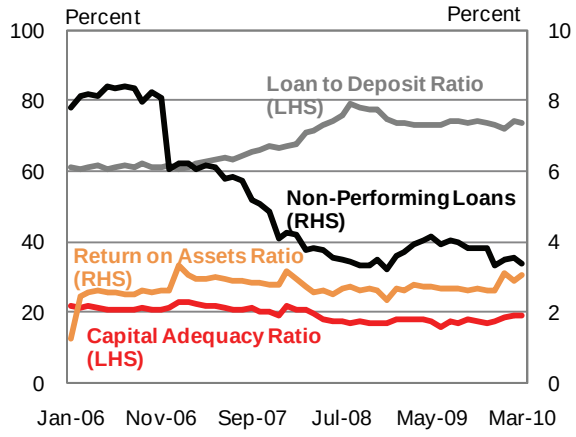

Sumber: Bank Dunia dan BI

Tabel 11: Neraca Pembayaran
(miliar dolar Amerika)

				2009				2010
	2007	2008	2009	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Balance of Payments	12.7	-1.9	12.5	4.0	1.1	3.5	4.0	6.6
Per cent of GDP	*3*	*-0.4*	*2.3*	*3.5*	*0.8*	*2.4*	*2.6*	*4.1*
Current Account	10.5	.1	10.7	2.5	2.5	2.2	3.6	1.6
Per cent of GDP	*2.4*	*0.0*	*2.0*	*2.2*	*1.9*	*1.5*	*2.4*	*1.0*
Trade Balance	20.9	9.9	21.1	4.1	5.1	5.0	6.9	4.4
Net Inome & Current Transfers	-10.4	-9.8	-10.3	-1.6	-2.6	-2.8	-3.2	-2.8
Capital & Financial Accounts	3.6	-1.8	3.5	1.6	-1.8	2.5	1.3	4.3
Per cent of GDP	*0.8*	*-0.4*	*0.6*	*1.4*	*-1.4*	*1.7*	*0.8*	*2.7*
Direct Investment	2.3	3.4	1.9	.5	.4	.5	.6	1.9
Portfolio Investment	5.6	1.8	10.3	2.0	1.9	3.0	3.5	6.2
Other Investment	-4.8	-7.3	-8.8	-.8	-4.1	-1.0	-2.9	-3.9
Errors & Ommissions	-1.4	-.2	-1.8	-.1	.4	-1.1	-.9	.8
Foreign Reserves*	56.9	51.6	66.1	54.8	57.6	62.3	66.1	71.8

Sumber: BI dan BPS

Table 12: Di tahun 2010 defisit diproyeksikan turun menjadi 1,0 persen PDB, dibandingkan dengan proyeksi pemerintah sebesar 2,1 persen PDB, sementara di tahun 2011 defisit dapat turun hingga 0,4 persentase poin dari PDB
(penerimaan dan belanja pemerintah pusat, triliun rupiah)

	2008	2009	2010	2010 (p)	2011	2011 (p)
	Actual	Actual (prelim.)	Revised Budget	WB Estimates	Draft Proposal	WB Estimates
A. State revenues and grants	**981.6**	**868.9**	**992.4**	**1,017.6**	**1,086.7**	**1198.9**
1. Tax revenues	**658.7**	**641.4**	**743.3**	**754.4**	**839.9**	**904.2**
a. Domestic tax	622.4	622.7	720.8	728.5		873.8
i. Income tax	327.5	317.6	362.2	371.7		450.6
- Oil and gas	77.0	50.0	55.4	61.5		71.5
- Non oil and gas	250.5	267.6	306.8	310.2		379.1
ii. Other domestic taxes	294.9	305.1	358.5	356.7		423.2
b. International trade tax	36.3	18.7	22.6	25.9		30.4
i. Import duties	22.8	18.1	17.1	20.6		24.3
ii.Export tax	13.6	0.6	5.5	5.3		6.1
2. Non tax revenues	**320.6**	**226.4**	**247.2**	**263.2**	**243.5**	**294.7**
o/w natural resources	224.5	137.9	164.7	166.5		182.4
i. Oil and gas	211.6	125.7	151.7	151.3		165.2
ii. Non oil and gas	12.8	12.2	13.0	15.3		17.2
B. Expenditures	**985.7**	**956.4**	**1,126.1**	**1,080.1**	**1,204.9**	**1229.5**
1. Central government	**693.4**	**647.8**	**781.5**	**737.2**	**840.9**	**825.3**
- Personnel	112.8	127.7	162.4	152.6		182.0
- Material expenditure	56.0	79.6	110.7	103.2		123.1
- Capital expenditure	72.8	74.5	88.1	85.0		101.3
- Interest payments	88.4	93.8	105.6	102.9		98.1
- Subsidies	275.3	159.5	202.3	196.2		205.0
- Grants expenditure	0.0	0.0	0.2	0.0		0.0
- Social expenditure	57.7	73.8	69.7	66.2		79.0
- Other expenditures	30.3	38.9	42.4	30.9		36.9
2. Transfers to the regions	**292.4**	**308.6**	**344.6**	**342.9**	**364.1**	**404.2**
C. Primary balance	84.3	6.4	-28.1	40.5		67.5
D. SURPLUS / DEFICIT	(4.1)	(87.4)	(133.7)	(62.5)	(118.3)	(30.6)
Deficit (per cent of GDP)	(0.1)	(1.6)	(2.1)	(1.0)	(1.7)	(0.4)
Economic assumptions/outcomes						
Gross domestic product (GDP)	4,954	5,613	6,254	6,506	6,959	7,757
Economic growth (per cent)	6.1	4.5	5.8	5.9	6.2 - 6.4	6.2
Inflation (per cent)	11.1	2.8	5.3	5.3	4.9 - 5.3	6.3
Exchange rate (IDR/USD)	9,691	9,408	9,200	9,218	9100 - 9400	9,200
Interest rate of SBI (average %)	9.3	7.6	6.5	6.5	6.3 - 6.7	6.5
Crude oil price (USD/barrel)	97.0	61.6	80.0	77.7	80 - 85	78.0
Oil production ('000 barrels/day)	931	952	965	965	960 -980	970

Sumber: Departemen Keuangan, Bank Dunia

Investing in Indonesia's Institutions
for Inclusive and Sustainable Development